Laksmi A. Savitri

PUSAKA
untuk memberdayakan hak-hak masyarakat

NEKROPOLITIK NEGARA

MILITERISASI PRODUKSI PANGAN DI TANAH MALIND ANIM

"Loreng dong masuk dong kase hancur Masyarakat. Masyarakat mati"

PUSAKA
untuk memberdayakan hak - hak masyarakat

NEKROPOLITIK NEGARA

MILITERISASI PRODUKSI PANGAN DI TANAH MALIND ANIM

"Loreng dong masuk dong kase hancur Masyarakat. Masyarakat mati"

Laksmi A. Savitri

YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT

2025

Kajian

Judul : NEKROPOLITIK NEGARA
MILITERISASI PRODUKSI PANGAN DI TANAH MALIND ANIM
"Loreng dong masuk dong kase hancur Masyarakat. Masyarakat mati"
Penulis : Laksmi A. Savitri
Layout : taqi
Ukuran : 20 x 27 cm
Tebal : Cover + vi + 80 Halaman
Penerbit : Pusaka Bentala Rakyat

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), didirikan di Jakarta pada Tahun 2007, awalnya bernama Yayasan Pusaka, oleh aktivis pembela hak masyarakat dan lingkungan, yang mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, memajukan upaya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, hak dan kesetaraan antara segmen masyarakat (perempuan dan laki-laki), serta memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

www.pusaka.or.id

Daftar Isi

KATA PENGANTAR v

PENDAHULUAN 2

Menyoal Militerisasi Produksi Pangan 5
Temuan 7

NEKROPOLITIK NEGARA: MILITERISASI DAN REZIM TENAGA KERJA 8

Rezim Tenaga Kerja 9
Militerisasi 10
Nekropolitik 11

PERAMPASAN TANAH ADAT, CETAK SAWAH DAN PERAN MILITER 15

Awal-mula perampasan tanah: Transmigrasi 15
Transmigrasi 1910-1925 dan Proyek Kumbe 1951-1956 16
Transmigrasi 1984-1986 & pengembalian tanah adat 18
Cetak sawah dan Peran militer 21
Program cetak sawah 2009-2017 (MIFEE & LPN): kontrol tenaga kerja 21
Program Oplah 2024: Konsolidasi dan penguasaan tanah 25

REZIM TENAGA KERJA PADI 31

Akses terhadap tanah 33
Tenaga kerja, mekanisasi dan relasi upah 36
Kerja dan relasi produksi 36
Mekanisasi 38
Kerja perawatan 41
Rantai sirkulasi dan relasi komoditi 42

PRAKTIK NEKROPOLITIK 45

Rasialiasi Rezim Tenaga Kerja Padi 45
Teror Militerisasi Produksi Padi 47
Krisis tanah dan *suanggi* 52
Politik Dispnea: 'sesak napas' sebagai kerja nekropolitik 55

Daftar Pustaka 58

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah produksi padi di kampung-kampung Distrik Kurik pada 2022 46

Daftar Diagram

Diagram 1. Produksi Beras 2014-2019 3
Diagram 2. Jumlah impor beras (ton) 2017-2023 3
Diagram 3. Produksi padi dan luas panen 2018-2023 di Kabupaten Merauke 43
Diagram 4. Produksi beras di distrik-distrik eks pemukiman transmigrasi dan kampung lokal 2023 45

Daftar Gambar

Gambar 1. Poster informasi Program OPLAH di Telagasari, Distrik Kurik 6
Gambar 2. Perempuan Jawa di Merauke pada 1932 23
Gambar 3. Orang Marind di Proyek Kumbe 24
Gambar 4. Posko penjualan tanah dan kavling eks trans di Salor 2 (Salor Indah) 25
Gambar 5. Rencana pengembangan Agro Estate KSPP Salor pada 2010 30
Gambar 6. Zonasi dan klaster KSPP MIFEE 2012 32
Gambar 7. Zonasi dan klaster PSN 2024 33
Gambar 8. Panen raya bersama KASAD TNI di Ivimahad 38
Gambar 9. Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman memeriksa demplot pertanian modern 40
Gambar 10. Presiden Prabowo panen padi di Telagasari 42
Gambar 11. Combine harvester (kiri) & Traktor roda 4 (kanan) 53
Gambar 12. Grandong di Salor Indah, Distrik Kurik (Atas) & Traktor angkut di Waninggap Kai, Distrik Semangga (Bawah) 55

Kata Pengantar

Pada Oktober 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meresmikan lima Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan. "Batalyon ini memiliki tugas dan peran yang lebih spesifik untuk mendukung ketahanan, keamanan dan mendorong pembangunan masyarakat" ungkap Panglima TNI, dikutip dari media www.tni.mil.id (3/10/2024).

Pembentukan Yonif baru dan menambah peran militer mengurusi program ketahanan pangan nasional menandakan dan mempertebal militerisasi dalam perluasan dan pengembangan industri keruk atas nama swasembada pangan dan energi. Masyarakat adat Papua protes sejak awal Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Kawasan Pangan dan Energi Merauke, yang melibatkan militer beroperasi dalam senyap (tanpa partisipasi bermakna) maupun terbuka.

Di Tanah Papua, situasi kekerasan pelanggaran HAM, diskriminasi dan pendekatan represif, yang terjadi pada masa lalu dan masih berulang hingga kini, masih menimbulkan luka. Militerisasi PSN Merauke dengan berbagai label operasi menimbulkan momok, reaksi dan rasa tidak aman bagi masyarakat akar rumput. Kekerasan, termasuk kekerasan non fisik, menimbulkan rasa takut teramat sangat. Namun suara dan situasi ini seringkali diabaikan dan ditutupi dengan atas nama pembangunan kesejahteraan.

Laporan dihadapan anda ini menyajikan temuan riset dengan metode etnografi kritis mengungkap kehadiran dan dampak militerisasi dalam PSN Merauke pada proyek Optimalisasi Lahan (Oplah) dan percetakan sawah baru, yang semakin giat dikembangkan. Militerisasi berkelindan dengan krisis tanah, masyarakat adat kehilangan hak kontrol dan akses atas tanah yang merupakan sumber kehidupan. Kejadian ini mendatangkan malapetaka kehancuran dan kematian.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Laksmi dan Maria Goreti Mekieuw, narasumber dan sumber informasi lainnya, sehingga laporan riset ini dapat dihadirkan disini. Semoga kajian ini dapat bermanfaat.

Salam,
Franky Samperante
Direktur PUSAKA

Pangdam XVII-Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa beserta rombongan menanam jagung bersama petani di Distrik Tanah Miring, Merauke. Sumber Foto: Penrem 174-ATW Merauke.

PENDAHULUAN

Prabowo, dalam pidato pertama usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024, mengatakan: "*Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,*"[1] tegasnya. Hal yang sama diutarakan kembali dalam sidang kabinet merah putih pertama, "*Swasembada pangan itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar bisa pecah setiap saat*,"[2] ungkapnya.

Pernyataan Prabowo itu membawa *Deja vu* dengan Orde Baru. Meskipun dalam kondisi dan situasi yang tidak sama, bau nasionalisme bercampur dengan otoritarianisme semakin memenuhi ruang publik di Indonesia hari ini, terutama ketika menyangkut soal pangan. Sejak masa pemerintahan Soekarno, pangan sudah dijadikan persoalan hidup matinya bangsa. Masalah pangan adalah masalah ideologis. Beberapa kajian juga menyepakati duduk soal pangan selalu diwarnai oleh sentimen nasionalisme. Sentimen ini ditandai dengan kemunculan tak henti agenda swasembada pangan demi 'memberi makan bangsa' (Neilson 2017). Bahkan, ada juga peneliti yang mengatakan bahwa cara pikir lumbung memang merupakan budaya masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya menjadi kontradiktif dengan arus liberalisasi perdagangan pangan nasional dan global (Rae & Reuter 2020). Kontradiksi ini mengeras ketika poros retorika lumbung pangan diputar menghadap keluar pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni: "memberi makan Indonesia, memberi makan dunia" (Ito et al 2014, Neilson 2017). Kebijakan yang dijustifikasi oleh Inpres No.5/2011 ini membuka peluang bagi kontrol korporasi terhadap pangan dan lahan pertanian, serta kehidupan petani melalui implementasi berbagai versi *food estate* atau lumbung pangan. 'Mengubah krisis menjadi peluang' adalah kredo dari pemerintahan SBY untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari krisis pangan dan energi dunia pada 2007-2008 (Ito et.al 2014). Dengan memunculkan Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pemerintahan ini menaruh pangan sebagai peraup cuan di koridor ekonomi Papua. Maka lahirlah *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) (Ito, Rachman & Savitri 2014).

---

1 https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-swasembada -pangan-dan-energi-sebagai-prioritas-utama/

2 https://setkab.go.id/sidang-kabinet-paripurna-pertama-presiden-prabowo-subianto-tekankan-pentingnya-persatuan/

Gerak yang sedikit berbeda dan lebih menyerupai model BIMAS di masa Orde Baru mewarnai agenda swasembada pangan pada masa pemerintahan Prabowo saat ini. Dalam menerjemahkan swasembada pangan yang ditargetkan dicapai pada 2027, Kementerian Pertanian menerapkan strategi intensifikasi, berupa optimalisasi produksi (irigasi, pupuk) seluas 1 juta hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah baru) seluas 1,3 juta hektar sampai 2027.[3] Strategi tersebut dilaksanakan melalui cara-cara sekuritisasi atau pendekatan keamanan dan militerisasi. Serupa dengan penurunan Babinsa di desa-desa pada masa Orde Baru, yang lalu diterapkan kembali pada 2015 untuk agenda swasembada pangan Jokowi, metode ini dianggap mampu menjamin pemenuhan target swasembada pangan pada 2027.[4]

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan TNI yang diawali pada 8 Januari 2015 terus diperpanjang setiap tahun. Pada 23 November 2023, dokumen ini juga sudah diperpanjang sampai 2027. Seiring dengan PKS yang akan menugaskan 50.000 Babinsa di seluruh Indonesia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, membentuk Brigade Pangan di 12 provinsi, 85 kabupaten, untuk mengerjakan optimalisasi lahan pangan dan mengolah sawah baru. Brigade pangan ini akan terdiri dari setidaknya 15 orang petani milenial yang akan mengelola lahan ±200 hektar dengan jajaran TNI yang akan mendampingi setiap saat sebagai 'motivator kedisiplinan.'[5]

Beberapa kajian menyoroti bagaimana Babinsa ditancapkan sebagai ujung tombak dari kerja TNI di desa selama periode Menteri Pertanian Amran yang pertama (2014-2019), misalnya Syailendra (2017) yang mendapati bahwa kerja Babinsa di Aceh persis seperti digambarkan oleh Amran Sulaiman, yakni: mengawasi petani melakukan kerja produksi pertanian. Menurut Syailendra, Babinsa memandang bahwa petani (Aceh) malas dan butuh Babinsa untuk berperan sebagai orang tuanya yang memaksa mereka bekerja di sawah. Temuan Kamim (2019) juga menyoroti kerja Babinsa dalam kasus Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (Upsus Pajale) di Kabupaten Sleman. Babinsa dalam jajaran Kodim 0732 Sleman menjadi operator alsintan, mencatat produksi, mengontrol distribusi pupuk, memastikan pembagian benih tepat sasaran, melaporkan kegiatan program setiap hari melalui *whatsapp* sesuai format yang ditentukan oleh Kodim Sleman. Danramil menggunakan laporan Babinsa tersebut untuk melaporkan pelaksanaan dan capaian program Upsus Pajale di Sleman (Kamim 2019, hlm.219-224).

[3] https://money.kompas.com/read/2024/11/26/221300026/alasan-tni-terjun-dampingi-program-swasembada-pangan-menurut-mentan?page=all#google_vignette

[4] Pada 8 Januari 2014 ditandatangani Nota Kesepahaman Kementrian Pertanian dengan TNI yang diperbaharui setiap tahun dalam satu dekade terakhir dalam rangka swasembada pangan (sumber: https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/01/09/pemerintah-gandeng-tni-sukseskan-program-swasembada-pangan.html, diakses 4/12/2024).

[5] https://money.kompas.com/read/2024/11/26/221300026/alasan-tni-terjun-dampingi-program-swasembada-pangan-menurut-mentan?page=all#google_vignette

Ironisnya, pendekatan paternalistik dan panoptik versi militer ini ternyata tidak menghasilkan swasembada pangan. Berdasarkan data BPS, produksi beras memang meningkat terus sejak 2014 sampai dengan 2017, tapi menurun drastis pada 2018 dan 2019 (Diagram 1). Sementara itu, data statistik produksi dan impor beras 2017-2019 menunjukkan bahwa Indonesia tetap mengimpor beras 305.274 ton pada 2017 dan mencapai angka impor tertinggi 2,4 juta ton pada 2018, yang kemudian membongkar karut marut data produksi dan konsumsi beras nasional[6]. Bahkan, angka impor beras melonjak ke 3 juta ton pada 2023 (BPS 2024) (Diagram 2).

Diagram 1. Produksi Beras 2014-2019

Diagram 2. Jumlah impor beras (ton) 2017-2023

6 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210323143320-92-621020/menengok-alasan-pemerintah-impor-beras-sejak-2017/2#goog_rewarded

Fakta tak terbuktinya hubungan antara strategi militerisasi dengan swasembada pangan tersebut jelas-jelas telah diabaikan oleh hasrat pencapaian swasembada melalui *food estate* (ekstensifikasi) dan brigade pangan (optimasi produksi) pada rezim hari ini. Bahkan, Amran Sulaiman menafikan kegagalan tersebut dengan menyatakan optimisme untuk menjadikan Merauke sebagai 'laboratorium raksasa pertanian modern'. Rencana ini mencuat ketika optimalisasi lahan sawah seluas 40.000 hektar di Merauke didaku berhasil, karena mampu meningkatan produksi gabah kering panen dari 2 ton/ha menjadi 6 ton/ha.[7] Optimisme itu dijustifikasi pula dengan dimulainya pembabatan hutan secara ganas di Wanam untuk pembuatan jalan sepanjang 135 km, dermaga dan pembukaan sawah baru yang direncanakan seluas 1 juta hektar, yang dikerjakan oleh Jhonlin Group, perusahaan milik pengusaha batu bara H. Isam.

Rencana-rencana berkacamata kuda tersebut diterapkan terhadap penduduk tanah Merauke yang sudah mengalami berlapis-lapis kerentanan yang diakibatkan oleh struktur ekonomi politik. Salah satunya adalah kerentanan ekologis. Pada bulan Mei 2024 banjir melanda empat Distrik dan mengakibatkan ribuan orang mengungsi, ratusan rumah dan sekitar 950 hektar sawah terendam selama hampir dua minggu.[8] Penduduk mengatakan bahwa mereka menerima banjir dari hulu Kali Bian, karena pembukaan hutan untuk industri perkebunan yang tanpa perhitungan.[9] Kerentanan ekologis yang dibuat oleh kebijakan perubahan bentang alam yang rakus sejak MIFEE itu ikut menambah tebal lapisan kerentanan.

Kerentanan lain yang sudah mendarah daging dalam cerita manusia Papua adalah kerentanan traumatis akibat kekerasan yang dialami oleh orang Malind sejak masa kolonial. Dimulai dari pemberangusan ritual dan tradisi oleh tentara dan agama, sampai pada Indonesianisasi oleh kebijakan transmigrasi, pendidikan dan operasi militer. Trauma dan kerentanan yang sudah mengerak, semakin dipertebal oleh lapisan-lapisan kerentanan yang diakibatkan struktur ekonomi politik berdalih swasembada pangan pada satu dekade terakhir.

7 https://www.antaranews.com/berita/4400105/mentan-bidik-lahan-merauke-jadi-laboratorium-raksasa-pertanian-modern

8 https://jubi.id/Animha/2024/ribuan-warga-salor-merauke-mengungsi-akibat-banjir-ratusan-rumah-dan-sawah-terendam-air/

9 *ibid*

Pantauan udara banjir yang menggenangi sejumlah rumah warga di Merauke, Papua Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. Sumber Foto: Antara Foto – BPBD Merauke.

Menyoal Militerisasi Produksi Pangan

Fakta kegagalan yang diabaikan, seiring dengan dinafikannya kerentanan masyarakat yang terbentuk secara struktural tersebut, mendatangkan pertanyaan: Bagaimana rezim tenaga kerja di wilayah-wilayah persawahan tersebut terbentuk? Kekuatan apa saja yang membentuknya dan bagaimana militerisasi berperan? Mengapa negara secara persisten memobilisasi kekuatan militer dalam produksi pangan? Pertanyaan-pertanyaan ini menavigasi proses untuk memahami secara kritis dua abad upaya-upaya negara di Kabupaten Merauke untuk mengubah tanah dan tenaga kerja menjadi alat produksi yang bekerja merombak hutan dan rawa menjadi sawah. Upaya ini dimulai dengan Proyek Padi Kumbe 1956-1960, Proyek MIFEE (dimulai pada 2008) dan cetak sawah 1 juta hektar atau proyek Lumbung Pangan Nasional (dimulai bersama dengan MIFEE, digencarkan dengan pelibatan militer mulai 2015, dan diperluas pada 2023-2024).

Pada saat studi dilakukan, dua momen historis perubahan agraria sedang terjadi, yaitu pembongkaran lanskap sosial ekologis secara drastis di Wanam dan Sermayam, masing-masing untuk proyek padi dan tebu dengan total luas 1 juta hektar, proyek tebu untuk etanol seluas 500.000 ha, ditambah dengan optimalisasi lahan produksi sawah seluas 40.000 ha sampai 100.000 ha. Khusus untuk proyek optimalisasi lahan, pekerjaan ini tersebar di enam distrik persawahan, yang notabene merupakan kampung-kampung transmigran, yaitu:

- Distrik Tanah Miring seluas 10.708 ha,
- Distrik Kurik 10.628 ha,
- Distrik Semangga 6.564 ha,
- Distrik Malind 6.002 ha,
- Distrik Jagebob 4.518 ha,
- Distrik Merauke 1.580 ha,

Informasi tentang lokasi program optimalisasi lahan (disingkat Oplah) ini dipampang pada poster informasi publik yang dipancangkan di Kampung Telagasari, Distrik Kurik (Gambar 1). Dengan pertimbangan kepadatan proses historis dari orang-orang dan alam yang sudah dijadikan objek kebijakan negara selama lebih dari satu dekade terakhir, kajian ini memilih untuk mempelajari program optimalisasi lahan yang dilakukan pada tanah sawah di Distrik Kurik dan ditelusuri ke belakang, berawal dari program cetak sawah pada 2015 dan sebelumnya.

.

Gambar 1. Poster informasi Program OPLAH di Telagasari, Distrik Kurik

Selama kurang lebih tiga minggu di bulan Agustus dan September 2024, ditemani oleh seorang perempuan Yeinan pegiat kemanusiaan, penulis melakukan wawancara mendalam, diskusi dan observasi di kampung-kampung di mana program cetak sawah secara menyejarah terkonsentrasi, yaitu: Kampung Ivimahad (disebut juga Salor Kampung, kampung orang asli Papua), Kampung Wapeko (juga kampung orang asli Papua), Kampung Telagasari & Kampung Salor Indah (disebut juga sebagai Salor 1 & Salor 2, sebutan sebagai eks-blok pemukiman transmigran) di mana semua percobaan plot dan seremoni proyek optimalisasi lahan ini dilakukan. Lokasi lainnya adalah Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, di mana beberapa kali obrolan mendalam dengan ketua dan anggota kelompok tani orang asli papua dilakukan. Beberapa kampung orang asli Papua memang terselip di antara kampung-kampung sasaran Oplah dan sudah pernah menjadi tempat belajar pada studi sebelumnya (Desember 2017) tentang cetak sawah, sehingga di sanalah studi ini difokuskan.

Etnografi kritis merupakan metodologi yang memandu proses kajian ini. Madison (2019) mengingatkan bahwa dengan menggunakan metodologi ini, peneliti berkomitmen pada tanggung jawab etis untuk menunjukkan proses-proses ketidakadilan di mana ia tinggal atau sementara berada. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan keadilan, serta *do no harm*, menjadi landasan kerja. Mendengarkan dengan seksama dan memahami makna secara mendalam dari setiap tuturan dan praktik, gestur dan perilaku, dari ungkapan pengalaman dan pikiran, merupakan tuntutan dan norma. Maka berangkat dari sini, semua nama yang disebutkan di dalam laporan ini adalah *pseudonym*, kecuali nama-nama terkait dengan posisi dalam institusi militer dan negara.

Temuan

Persistensi militerisasi dalam produksi pangan menunjukkan bahwa negara sedang menjalankan nekropolitik. Negara, menggunakan kekuasaan militer untuk memaksa rakyat, sehingga mengakibatkan konflik dan saling bunuh di antara masyarakat, membiarkan kematian sebagai cara untuk memudahkan kontrol atas produksi pangan, menyeleksi tenaga kerja yang patuh dan tuan dusun yang mau menyerahkan tanah.

Rasialisasi dan diskriminasi gender menjadi rona dari rezim tenaga kerja padi yang membuat pertanian padi sebagai penanda batas dari modernitas dan hirarki ras. Mekanisasi menjadi elemen penting yang mendeterminasi proses rasialisasi dan menyingkirkan perempuan dari diskursus swasembada pangan. Pada akhirnya, akumulasi kapital menjadi rasial bukan serta-merta karena kebanyakan pemilik kapital adalah non-Papua, namun karena akumulasi kapital dirasialisasi dengan cara mendiskriminasi akses orang asli Papua pada kapital (tenaga kerja, alsintan, modal finansial).

Militerisasi kontrol produksi berjalan seiring dengan eksistensi komando teritorial oleh militer di tanah Malind. Di keseharian orang asli Papua, eksistensi militer bukan lagi hadir sekedar sebagai institusi represif, tapi sudah menjadi teror itu sendiri. Itu sebabnya pengambilalihan kontrol atas produksi pangan yang dilaksanakan dengan cara persuasif-manipulatif, berhasil dilakukan oleh militer bukan karena kemanjuran *soft power*, melainkan karena berjalan di atas trauma sosial yang meluas dan dalam.

Sejarah kolonialisme dulu dan kini, memperlihatkan bahwa kehidupan sebagian besar Malind *Anim* terus terengah-engah. Hidup sekedar mencoba bernafas agar tubuh tetap bernyawa sampai besok pagi. Penghancuran tubuh secara material dimulai dari penghancuran harapan hidup. Hidup hanya dijalani oleh tubuh, tapi aspirasi dan harapan sudah mati. Menjadi *Anim-Ha* atau menjadi manusia sejati, sebagai aspirasi tertinggi manusia Malind, telah digerus terus-menerus oleh gelombang kekerasan. Maka ketika negara berperan secara tak henti dalam membentuk kekuatan pencekik, sesungguhnya negara sedang menjalankan politik dispnea. Dispnea, secara populer disebut sebagai kondisi sesak nafas.

Dengan begitu, pengalaman Malind *Anim* telah mengungkap bagaimana nekropolitik terjadi sebagai proses mematikan harapan, sebelum tubuh secara material pada akhirnya dihancurkan. Sesak napas, menjadi metafora atau jembatan konseptualisasi untuk dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana nekropolitik bekerja lewat tangan negara. Politik sesak napas (dispnea) adalah bagian dari kerja politik kematian.

Perempuan adat Suku Malind bersama anaknya di sebuah Bevak, di Kampung Zanegi, Merauke. Sumber foto: betahita.id

NEKROPOLITIK NEGARA: MILITERISASI DAN REZIM TENAGA KERJA

Dari waktu ke waktu, sejak kolonialisme Belanda hingga kini, persoalan terbesar dari hasrat swasembada pangan yang mengandalkan pertanian berskala luas, mekanisasi dan intensifikasi produksi, sering terbentur pada kondisi ekologis, masalah kepemilikan tanah dan tenaga kerja.[10] Bukan saja terbatas pada masalah teknis produksi, hal-hal yang kerap menjadi kendala juga adalah persoalan sosial dari produksi itu sendiri, yaitu: 1) siapa memiliki apa; 2) siapa mengerjakan apa; 3) siapa mendapatkan apa; dan, 4) apa yang dilakukan terhadap pendapatan itu (Bernstein 2010, 2017). Ekonomi politik dari dinamika agraria pedesaan di mana tanah dan orang berada, hidup di lokasi itu, dan relasi internal dan eksternal kampung, merupakan titik berangkat untuk memahami perubahan agraria.

[10] Abdulgani & Savitri (dalam proses publikasi)

Presiden Prabowo bersama Menteri Pertanian Meninjau Lokasi Food Estate di Merauke. Sumber foto: presidenri.go.id

Maka berawal dari empat pertanyaan mendasar tersebut, kajian ini memahami bahwa dimensi krusial dari perombakan lanskap untuk 'dicetak' menjadi persawahan seluas 1 juta hektar dan mengintensifkan produksi seluas 40.000 hektar adalah persoalan tenaga kerja (*labour*). Siapa dan dari mana tenaga kerja didapat, serta bagaimana pula memobilisasinya, ketika mekanisasi secara penuh pun tetap memerlukan operator? Di Kabupaten Merauke yang pada 2023 hanya berpenduduk 243.772 jiwa dengan kepadatan penduduk hanya 5,41 jiwa/km dan setengah dari populasi tinggal di kota (BPS 2024), siapa yang akan menjadi pekerja untuk 1 juta hektar lebih sawah dan mengintensifkan produksi padi di lahan seluas 40.000 hektar? Persoalan yang juga sama gentingnya adalah di tanah siapa sawah itu akan dicetak dan dioptimalisasi produksinya?

Beberapa kajian telah menunjukkan bahwa perubahan kehidupan Malind *Anim* pada era MIFEE (2008-2022) di tengah lanskap ekologis yang terus dirombak, dari hutan dan rawa alam menjadi tanaman akasia, menjadi padi dan dibabat lagi untuk menjadi bahan bakar biomass, telah membentuk ketergantungan orang Malind yang semakin tinggi pada kerja upahan (Savitri 2018, Rassela et.al 2022). Di Distrik Animha, kerja upahan diawali oleh inkorporasi tenaga kerja Malind *Anim* pada produksi *wood pellet* PT SIS untuk ekspor ke Cina dan Korea. Ketika perlawanan Malind *Anim*[11] dan tenggelamnya tongkang pengangkut wood pellet menghentikan kerja pabrik, kerja upahan muncul dari tengkulak-tengkulak atau penarik rente kayu gambir. Begitu program cetak sawah Jokowi dimulai di Distrik Kurik dan sekitarnya, orang Malind dan migran menjual tenaga kerja pada PT Parama Pangan Papua dan Korindo, termasuk kepada para tuan dusun. Kondisi terakhir memunculkan formasi baru rezim tenaga kerja, yaitu: bagi hasil atau tarik karung. Skema multi usaha kehutanan memungkinkan PT SIS untuk mengubah 5.330 ha konsesinya menjadi *agroforestry* pangan, HHBK-minyak atsiri, jasa lingkungan karbon dan energi biomassa (Prayogo et.al t.t), membentuk anak perusahaan, sekaligus mengikat dan melepas manusia di Merauke sebagai tenaga upahan untuk melumas kelancaran perputaran kapital MEDCO. Secara metaforis, uang telah mengubah *Anim-Ha*, Sang Tuan, menjadi Budak.

[11] https://nasional.tempo.co/read/327674/warga-merauke-tutup-paksa-pt-medco-papua

Proyek MIFEE di Merauke. Sumber foto: Film Mahuze.

Rezim Tenaga Kerja

Berangkat dari hasil kajian-kajian tersebut, alur pikir analisis rezim tenaga kerja menjadi relevan untuk dapat mengungkap bagaimana secara historis "seperangkat relasi dan institusi *menciptakan* pekerja dan membentuk eksploitasi di berbagai skala dan area ekonomi global" (Baglioni et.al 2022, hlm. 82). Dalam formulasi Bernstein (1998, hlm. 31-32), rezim tenaga kerja adalah 'berbagai metode mobilisasi tenaga kerja dan pengorganisasiannya dalam produksi, termasuk kondisi sosial, ekonomi dan politik yang melingkupinya.' Oleh para pengkaji rezim tenaga kerja, analisa rezim tenaga kerja ini diperlebar dari kaca mata produktivis, menjadi empat arena atau momen yang berkelindan, yaitu: produksi, sirkulasi, reproduksi sosial dan ekologi (Baglioni et al. 2022).

Cara analisa tersebut dipraktikkan dalam konteks perubahan agraria 'lokal' oleh Pattenden (2021) yang memperlihatkan bagaimana rezim tenaga kerja dalam konteks desa pertanian membentuk relasi bagi hasil dan menjadi mekanisme eksploitasi dalam proses akumulasi pemilik tanah yang tidak berada di lokasi tanah miliknya (*absentee landowner*). Dalam hal ini, eksploitasi didudukkan sebagai kategori analitis, bukan sekedar deskripsi normatif tentang kondisi kerja dan hidup yang menyedihkan (Baglioni et.al 2022). Dengan begitu, eksploitasi merujuk pada perbedaan nilai antara apa yang diproduksi oleh pekerja dan berapa upahnya. Pada kasus bagi hasil, Pattenden (2021) melihat bahwa mekanisme tersebut adalah kerja upahan terselubung. Nilai lebih ini diekstrak dari waktu kerja yang seharusnya dipakai untuk mereproduksi diri, namun dicurahkan untuk mereproduksi kapital (Baglioni et.al 2022). Dengan kata lain, pekerja diikat oleh kapital untuk mencurahkan waktunya demi menghasilkan komoditi yang menguntungkan bagi pemberi kerja, alih-alih menggunakan waktu tersebut untuk menghasilkan komoditi yang mencukupi subsistensinya. Oleh sebab itu, eksploitasi adalah episentrum dari rezim tenaga kerja karena kontrol atas tenaga kerja harus dijalankan demi kesuksesan produksi nilai lebih, tanpa itu kapital akan mati.

Cakupan analisa rezim tenaga kerja dari skala mikro ke makro dan dari momen produksi sampai ke ekologi, memerlukan alat teoretik yang tepat untuk menavigasi arah analisis. Dalam konteks Papua, konsep rasialisasi (Ogunrotifa 2024) berguna untuk membawa analisis rezim tenaga kerja berjalan seiring dengan gender dan kelas (Belkhir 2001). Ia menekankan bagaimana negara (kolonial) membentuk rasialisasi demi kepentingan politik, yaitu untuk mempertahankan prestis dan pengaruh kelas penguasa. Dengan kata lain, kita perlu menelaah dengan cermat, terutama dalam konteks masyarakat pribumi yang mengalami perampasan, bukan proletarianisasi, bagaimana kerja diciptakan dan sejauh mana opresi non-ekonomi berkontribusi pada pemantapan posisi kelas penguasa dan pelancaran akumulasi.

Salah satu proses penting dalam menciptakan pekerja adalah dengan mengambil alih kontrol atas tanah. Mulai dari konsepsi akumulasi primitif yang diajukan oleh Marx (1976), debat terhadap konsepsi ala Marx tersebut yang diawali oleh Rosa Luxemburg dan diteruskan oleh Harvey, Perelman, de Angelis, sampai dengan konseptualisasi kontemporer tentang mekanisme kontrol atas tanah oleh berbagai sarjana agraria (Peluso & Lund, Tania Li, dll.),

semua mendudukkan perkara kontrol atas tanah sebagai analisis kunci. Tawaran terbaru datang dari Giorgio (2023, hlm.12) tentang kerangka kerja yang lebih rinci untuk menganalisis struktur dari kontrol atas tanah, yaitu: meruntuhkan (*break down*), membangun (*build up*) dan mempertahankan (*hold on*).

Dalam konteks kajian ini, analisa rezim tenaga kerja dan tawaran Giorgio untuk memeriksa lebih teliti mekanisme kontrol atas tanah, sangat membantu untuk melihat dan memahami bagaimana militerisasi bekerja dan mempengaruhi kontrol atas tanah, tenaga kerja dan teknologi.

Seorang anak mengumpulkan leles (ranting dan dahan sisa penebangan hutan) di sekitar bivak di Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua, Jumat, 11 November 2022.
Sumber foto : Kompas / Agus Susanto.

Militerisasi

Tidak ada militerisasi tanpa militerisme, sebab militerisme adalah ideologi yang memprioritaskan kekuatan militer sebagai cara penyelesaian masalah. Berdasarkan ideologi ini militerisasi menjadi pendekatan yang diterima dalam proses-proses sosial, ekonomi dan politik (Woodwrad 2014). Opresi non-ekonomi, atau meminjam istilah Marx (1976) 'koersi di luar ekonomi' (*extra-economic coercion*) adalah kekuatan memaksa yang penting untuk menyediakan tanah dan menciptakan kerja bagi akumulasi kapital. Di sinilah, secara teoretis bisa ditelusuri bagaimana militerisme dan/atau militerisasi bekerja, khususnya dimulai dari masalah tanah dan sumber daya alam. Di Indonesia, masuknya militer pada bidang-bidang sipil sudah terlembaga dan mengakar menjadi budaya sejak pemerintahan Presiden Suharto melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI (Kingsburry 2003, McCulloch 2003). Lebih jauh lagi, dimulai dari Presiden pertama, Sukarno, kekuasaan militer selalu dibutuhkan oleh setiap pemimpin negara untuk memperkuat dan melegitimasi kekuasaannya (Crouch 1979, Kingsburry 2003, McCulloch 2003). Hubungan militer dan sipil dilegitimasi dengan doktrin Dwi Fungsi ABRI yang menggunakan sejarah hubungan rakyat dan tentara semasa revolusi kemerdekaan untuk menjustifikasi doktrin tersebut. Secara kritis McCoullough (2003) menyebutnya sebagai Trifungsi, karena ada fungsi bisnis militer yang berjalan dalam praktik, tapi disembunyikan (Crouch 1979).[12]

Patung Tugu Tentara di Merauke. Sumber foto: Pusaka Bentala Rakyat.

[12] Bahkan, Panglima TNI Jendral Agus Subyanto menyebut TNI memiliki 'multifungsi'. Suatu posisi yang sesungguhnya melanggar UU TNI (https://www.voaindonesia.com/a/pakar-dan-aktivis-pernyataan-panglima-tni-soal-multifungsi-tni-salah-dan-keliru/7647898.html)

Pasca reformasi, tepatnya pada periode pertama Jokowi (2014-2019), posisi militer malah kembali menyerupai Dwi Fungsi ABRI, meskipun secara *ad hoc* dan sektoral. Sebastian et.al (2018) memandang bentuk relasi itu sebagai relasi percampuran (*fusionism*), karena sekedar berbasiskan kebutuhan dan bersifat transaksional *(transactional fusionism*). Berbasis kebutuhan berarti militer terlibat dalam urusan sipil/politik berdasarkan permintaan yang lingkup dan derajatnya diatur oleh sipil, sebagaimana digambarkan oleh 41 MoU TNI dengan semua kementrian dan lembaga di kabinet Jokowi sejak 2014-2019 (Imparsial 2020, hlm.129). Transaksional merujuk pada kesetujuan militer untuk terlibat adalah berdasarkan kepentingan personal atau institusional.

Meskipun berbasis kebutuhan dan transaksional, pola relasi elit sipil dan militer di atas kertas jauh berbeda dengan relasi tentara dengan orang biasa di lapangan. Lebih dari sekedar sebuah 'resiko mengesampingkan aturan' dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana ditengarai oleh Sebastian et.al (2018). Salah satu penyebabnya, menurut Haripin (2019, hlm.106), adalah komando teritorial yang dipegang oleh TNI. Haripin menjelaskan bahwa dengan komando teritorial, TNI menguasai posisi strategis untuk mengawasi dan mengontrol populasi, sehingga menjadikan peran politik militer ala Orde Baru terus hidup. Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di lapangan, institusi militer di setiap level administrasi pemerintahan hadir sebagai aparatus koersif untuk mengintimidasi dan mengendalikan oposisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menjaga integritas rezim yang berkuasa. Dalam konteks tersebut, peran militer yang digerakkan oleh negara adalah wujud dari koersi di luar ekonomi untuk membuka sumbatan-sumbatan akumulasi, yang dipandang oleh Ince (2018) sebagai 'kekerasan kapital' (*capital violence*).

Penjelasan koersi non-ekonomi dalam proses akumulasi kapital dipertebal oleh Onur Ulas Ince dari sisi politik hukum dan kekerasan (2014, 2018). Ince menekankan pentingnya menggeser akumulasi primitif selingkup negara menjadi seluas imperium kolonial untuk memahami bagaimana jejaring kolonial bekerja demi akumulasi. Salah satu dimensi penting yang ia ajukan adalah bagaimana tatanan politik hukum, sebagai tatanan kekerasan, memaksa terbukanya ruang bagi kapital (*capital-positing violence*) dan menjaga agar ruang itu terus melebar (*capital-preserving violence*). Dalam konteks itu, militer memegang peran sentral dalam mobilisasi kekerasan kapital karena secara otoritatif dapat menata (atau menata ulang) politik ruang di mana kapital bisa menyubur (Ince 2014, hlm.110).

Panen padi gapoktan Kampung Bokem, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sumber foto: suara.merauke.go.id

Nekropolitik

Kelindan antara kolonialisme, rasialisasi dan kehadiran masif militer dalam produksi pangan, pertama-tama diperlukan untuk memeriksa lebih dalam watak kelas penguasa (negara kapitalis) dan politik yang dijalankannya. Di wilayah-wilayah koloni, normalisasi peran militer dalam urusan sipil dan implikasinya pada mobilisasi kekerasan adalah persoalan tentang teknologi kekuasaan. Untuk membedah bagaimana teknologi kekuasaan bergerak mengatur kehidupan dan kematian, bagian ini akan mengulas perdebatan mengenai biopolitik dan nekropolitik yang berlangsung dalam dua dekade terakhir.

Dalam bukunya, History of Sexuality Vol.1, di bab terakhir, Foucault (1978) menulis tentang *Right of Death and Power over Life*. Foucault menelusuri sejarah Masyarakat Barat dan mendapati bahwa dalam waktu yang sangat panjang salah satu ciri dari kekuasaan tertinggi atau kuasa daulat (*sovereign power*) di zaman Romawi kuno adalah kekuasaan untuk menentukan hidup dan mati manusia. Namun demikian, kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam hal menentukan kehidupan dan menjatuhkan kematian, ia tidak simetris. Pemegang kuasa menjalankan haknya untuk mendatangkan kematian atau menghindari kematian (*the right to take life or let live)* hanya dalam rangka memenuhi haknya atas kehidupan. Dengan kata lain, kekuasaan menjatuhkan kematian itu bersyarat yuridis, yaitu hanya jika hak atas kehidupan harus dipertahankan. Namun, menjalankan perang, bukan semata-mata urusan strategi negara yang dilandaskan pada eksistensi hukum, tapi sudah melibatkan eksistensi biologis ketika seluruh atau sebagian dari populasi kehilangan nyawa. Termasuk di dalamnya adalah menjatuhkan hukuman mati atau mendatangkan kematian pada eksistensi biologis yang dikonstruksi sebagai berbahaya, jahat dan kriminal. Dengan demikian, kuasa daulat (*sovereign power*) memiliki hak atas kehidupan sedemikian rupa, sehingga mendatangkan kematian adalah juga hak, atau hak atas kehidupan dibela dengan sedapat mungkin menghindari kematian (*the power to foster life or to disallow it to the point of death*).

Seiring dengan perjalanan kuasa pengetahuan, kekuasaan untuk menjaga dan mengatur kehidupan, termasuk membolehkan kematian atas nama kehidupan, tidak lagi melulu berpusat pada kedaulatan negara. Di era modern (versi Barat), kekuasaan yang disebut sebagai *Biopower* (Focault 1978, hlm. 139-141) dijalankan oleh berbagai institusi, seperti militer, sekolah, penjara, rumah sakit jiwa, praktik vaksinasi, pabrik dan perkebunan. Ada dua teknik yang diterapkan, yaitu membentuk tubuh sebagai mesin melalui pendisiplinan (*anatomo-politics of the human body*) dan mengatur tubuh sebagai spesies melalui regulasi terhadap populasi (*regulatory control of population*). Tubuh didisiplinkan agar menjadi patuh pada logika sirkulasi kapital dan disehatkan terus-menerus agar mudah untuk diatur. *Biopower*, dengan demikian, adalah teknologi kekuasaan yang mengatur bukan melalui wacana secara spekulatif (akan menjadi hegemonik atau tidak), tapi melalui pengaturan konkrit atas tubuh manusia dan kehidupan hayati lainnya, baik sebagai individu maupun sebagai populasi. Melalui kuasa pengetahuan, pengaturan tubuh dan populasi ini dinormalisasi.

Bagi Giorgio Agamben (1998) dalam *Homo Sacer*[13] (Manusia Kudus), argumen Foucault masih menyisakan pertanyaan tentang politik seperti apa yang memungkinkan kekuasaan mendikte kematian dan kepada siapa ini didiktekan, di tengah demokrasi masyarakat hukum Barat. Ia kemudian memusatkan analisanya pada kuasa daulat (*sovereign power*) dan bagaimana kekuasaan ini bekerja terhadap figur yang kontradiktif. Dengan strategi analisa itu, Agamben berbeda pendapat dengan Foucault tentang kapan *biopower* itu muncul. Baginya *biopower* itu sudah ada sejak politik memunculkan kekuasaan untuk membuat pengecualian atas kehidupan, sehingga kematian boleh dijatuhkan. Terhadap apa atau siapa pengecualian ini dikenakan, sejak awal merupakan persoalan konkrit hidup manusia dan atau entitas hayati yang eksistensinya dianggap 'sekedar hidup' (*bare life*). Dengan membedah kuasa daulat dan menggesernya dari makna kekuasaan tertinggi menjadi pemilik pengetahuan tertinggi, Agamben mendudukkan kekuasaan sebagai daya yang digunakan oleh pemegang pengetahuan tertinggi untuk menunda hukum dan melakukan pengecualian. Dengan demikian, modernitas bukan menjadi batas dari kemunculan *biopower*.

Kemudian, alih-alih berada di luar hukum, pengecualian menjadi hukum itu sendiri, sehingga apa yang sebelumnya dilarang, menjadi boleh karena dikecualikan. Pengecualian membuat apa yang dilarang dan dibolehkan ini tak lagi bisa dipisahkan, karena keduanya menjadi hukum. Inilah momen di mana begitu tiba pada nasib *homo sacer*, larangan membunuh ditunda, tapi tidak dimasukkan pada pembolehan pembunuhan. Bagi Agamben inilah biopolitik itu sendiri. Kuasa daulat boleh mendatangkan kematian pada *homo sacer* (figur yang menyandang 'kehidupan telanjang' karena sudah dikecualikan sebagai entitas yang setara dengan manusia biasa), tapi si pembunuh tidak dapat dihukum, karena pembunuhan kepada *homo sacer* adalah pembunuhan yang dikecualikan. Biopolitik ini terjadi ketika negara, sebagai institusi kekuasaan, menggunakan *biopower* sebagai teknik kekuasaan untuk menciptakan keadaan pengecualian (*the state of exception*) di mana kematian dinormalisasi dan diterapkan kepada mereka yang memiliki *kapasitas untuk dibunuh*. Agamben mencontohkan kehidupan orang Yahudi di dalam kamp-kamp Nazi dan bagaimana pembunuhan oleh Hitler atas nama pemurnian ras adalah sesuatu yang menjadi normal, pada masa itu.

Dengan kontekstualisasi yang sangat panjang pada kehidupan masyarakat jajahan (sang 'Homo Sacer'), Achille Mbembe (2003), seorang filsuf Kamerun, memperlihatkan bagaimana demokrasi dan politik Barat (sebagai *sovereign power*) telah menciptakan kolonialisme di belahan dunia Selatan. Dalam perspektif pasca kolonial yang ia gunakan, pada akhirnya, wilayah-wilayah pasca koloni tidak jauh beda dengan kamp konsentrasi Auschwitz. Begitulah rupa dari wajah nokturnal demokrasi Barat. *Sovereign power* tidak bisa dibaca secara normatif, demikian kritik Mbembe pada Agamben. Merujuk pada pemikiran Bataille, Mbembe meyakini bahwa politik adalah spiral transgresi di mana kematian dinafikan

[13] Merujuk Pompeius Fetus, *homo sacer* adalah sebutan bagi mereka yang didakwa berbuat kejahatan, *Sacer* berarti suci, sakral, kudus. Dinamai 'kudus' secara kontradiktif karena mereka tak bisa dijamah (*untouchable*) tanpa mengotori si penjamah, sehingga boleh dibunuh tanpa mengaikatkan sanksi pada pembunuhnya. Pada saat bersamaan, mereka tak suci sehingga tak bisa dikorbankan dalam ritual keagamaan. Padahal penghilangan nyawa manusia pada masa itu hanya diperbolehkan atas nama sakralitas pengorbanan.

sebagai limit kekuasaan. Dengan kata lain, *sovereign power* justru ada ketika kematian adalah kekuasaan. Oleh sebab itu, ada figur pemegang kuasa daulat yang menjadikan eksistensi manusia sebagai instrumen dan menjadikan penghancuran material dari tubuh manusia serta populasi sebagai wujud dari kedaulatan (Mbembe & Corcoran 2019, hlm. 68). Dari argumen itu, Mbembe menawarkan gagasan tentang nekropolitik atau politik kematian sebagai kritik atas konsep biopolitik atau politik kehidupan yang menurutnya bias kolonial.

Perbudakan dan kolonialisme kontemporer menunjukkan bahwa perang adalah sebuah bentuk biopolitik, bukan antitesis dari demokrasi. Dalam kondisi seperti itu, kematian menjadi norma. Sebabnya, di wilayah koloni, negara kapitalis secara inheren selalu menciptakan kondisi yang membuat kehidupan di wilayah pendudukan hampir tak mungkin dijalani. Melalui tangan-tangan kelembagaan pembuat kematian (*death-making institutions*), seperti militer, penjara, perbatasan, datangnya kematian terhadap populasi dinormalisasi. Mereka menciptakan zona-zona yang tidak memungkinkan hidup dijalani secara normal (*death worlds*), karena teror adalah makanan sehari-hari. Kelompok sosial yang berada dalam tatanan politik seperti itu menjadi sosok-sosok 'mayat hidup' (*living dead*), terombang-ambing antara menjalani hidup sebagai manusia (subyek) atau sekedar menjadi benda (*objecthood*) (Mbembe 2003, hlm. 26-30). Mbembe menyodorkan perkebunan sebagai contoh, serta tampilan paling aktualnya adalah Palestina.

Dalam konteks Papua yang sarat dengan intervensi militer dari negara kolonial (McNamee 2023), institusi ini berhasil menjadi pencipta teror, ketakutan dan kematian secara menyejarah (Hernawan 2018, Pakage 2018). Mengutip pendapat Hernawan (2018, hlm. 4): "*Penyiksaan di Papua adalah sebuah teater. Tak pernah dilakukan di ruang tersembunyi. Dalam setengah abad terakhir, praktik penyiksaan secara publik menjadi bagian integral dari cara Indonesia menjalankan pemerintahan di Papua dengan impunitas penuh. [...] dan itu hanya puncak gunung es dari sejumlah penyiksaan yang disponsori oleh negara.*" Berangkat dari kesejarahan tersebut, nekropolitik seperti menyediakan cara pandang atas tak hentinya kehadiran militer dalam kehidupan sehari-hari rakyat biasa di Merauke. Meskipun kematian datang tanpa melalui senjata dan pertempuran, bahkan melalui tangan saudara dan kerabat, dan atas nama kebijakan patriotik bertajuk swasembada pangan. Dalam kondisi seperti apa militerisasi bekerja, bagaimana militer menjadi elemen dalam menyediakan tanah dan 'menciptakan kerja', serta sejauh mana bentuk-bentuk militerisasi efektif sebagai mekanisme perampasan tanah dan eksploitasi sehingga membuat nekropolitik sebagai bentuk biopower yang dijalankan oleh negara, semua akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

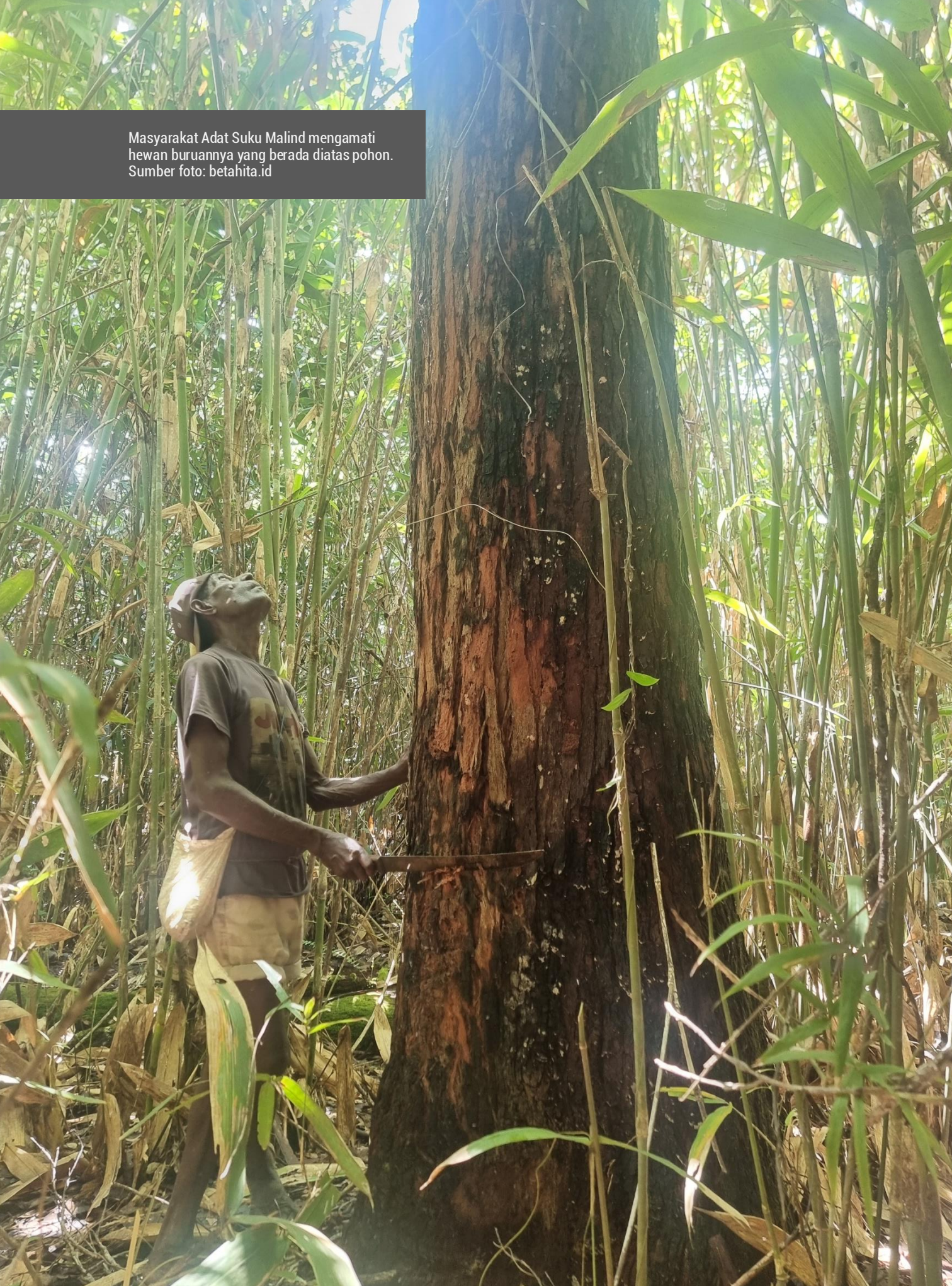

Masyarakat Adat Suku Malind mengamati hewan buruannya yang berada diatas pohon. Sumber foto: betahita.id

PERAMPASAN TANAH ADAT, CETAK SAWAH DAN PERAN MILITER

Tanah (*makan*) bagi *Malind Anim* (orang Malind) adalah pemberi kehidupan. Alam adalah leluhur (*amai*) yang pemurah. Malind *Anim* bersatu dengan segala sesuatu yang ada di atas dan di bawah tanah dalam totemisme (Van Baal, 1982; Verschueren, 1970). Memisahkan Malind *Anim* dengan tanah/alam berarti menghilangkan tugas suci mereka sepanjang masa untuk menjaga elemen-elemen alam yang menjadi dirinya (Samkakai 2009).

Kebersatuan Malind *Anim* dengan alam dari waktu ke waktu terus mengalami deraan pemisahan. Kolonisasi menjadi salah satu akar dari kemunculan berbagai kekuatan yang sampai hari ini tidak henti berusaha memisahkan manusia alam Malind, Yei, Maklew dari keutuhan eksistensinya. Berikut ini akan dituturkan sejarah perampasan tanah Malind sudah berlangsung sejak satu seperempat abad terakhir.

Anak di Kampung Zanegi, Distrik Animha, Merauke, Papua, makan nasi tanpa lauk, Kamis (11/10/2022).
Sumber foto: Kompas / Ahmad Arif.

Awal-mula perampasan tanah: Transmigrasi

Lembaga Masyarakat Adat Merauke, yang diketuai oleh Ignas Ndiken dan wakilnya Alberth Mouyend Gebze, pada 26-31 Juli 2007 mengadakan sidang adat suku besar Malind di Salor. Menurut catatan LMA, sidang ini diadakan dalam rangka merespon rencana MIFEE yang mulai merebak, seiring dengan ambisi pemekaran menjadi provinsi Papua Selatan. Sidang tersebut bertujuan untuk 'menyatukan dan mengembalikan identitas Malind Anim' (LMA 2007, hlm. 1). Salah satu hasil sidang adalah berupa pernyataan terhadap investor sbb: 'Investor jangan merencanakan dan membagi tanah-tanah adat dan ditentukan dengan keinginannya sendiri. Kami masyarakat adat suku Malind Anim sekabupaten Merauke, kami tidak akan pelepaskan tanah adat kami" (hlm. 5). Terhadap rencana pemekaran menjadi provinsi Papua Selatan, sidang tersebut memandang "PPS adalah untuk pendatang bukan untuk kami Malind Anim" (hlm.5).

Tugu KTM Salor di Merauke, Papua Selatan. Lokasi ini telah ditunjuk sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Sumber foto: Facebook @official.informasi.merauke

Dalam perjalanan akuisisi tanah untuk MIFEE, LMA yang dibentuk atas persetujuan Bupati pada tahun 2002 ini memang menjadi salah satu aktor pelicin pelepasan tanah adat di tingkat kampung (Dewi 2017, Savitri 2015). Namun demikian, apa yang dihasilkan dari sidang dewan adat pada 2007 tersebut menggambarkan reaksi Malind *Anim* terhadap deraan berbagai kekuatan yang memisahkan mereka dari tanah berikut semua totemnya. Dalam logika biner Malind *Anim*, hanya ada dua kategori manusia: mereka yang sedarah dan kerabat, dan di luar ini adalah lawan (Boelaars 1972). Orang Zanegi, berdasarkan pengalamannya menghadapi polisi kolonial dan pemburu bersenjata mesin yang mengeluarkan bunyi 'pu' saat digunakan, menyebut lawan ini sebagai *pu Anim*. Dalam perjalanannya, istilah ini akhirnya disematkan kepada pendatang. Ketika lawan tidak bisa dikalahkan dan tetap berada di sekitar mereka, *pu Anim* menjadi sumber ketakutan (Boelaars 1972). Ketakutan ini menghasilkan *matohale* atau depresi moral yang membuat Malind Anim menarik diri dari kekuatan perubahan yang datang (Overwheel 2012).

Salah satu *pu Anim* yang tak bisa mereka kalahkan adalah program transmigrasi yang membawa pendatang dari nusantara (Jawa, Makasar, Timor dll.) ke tanah-tanah Malind *Anim*. Mendatangkan orang Jawa ke Merauke sudah digagas oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 1903 (Bachtiar 1993), lalu dijalankan mulai 1910 sampai 1925 (Pakage 2018). Orang-orang keturunan Jawa yang datang sejak masa Belanda, kawin-mawin bercampur ras dan etnis (Jawa, Cina, Papua, Kei) dan melahirkan kaum peranakan. Bagi keturunan Jawa, mereka dinamai Jamer (Jawa Merauke). Program transmigrasi kemudian dilanjutkan oleh kolonisasi Indonesia sebelum dan sesudah PEPERA, serta memuncak pada 1982-1986. Hingga hari ini, praktik itu digemakan kembali demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk *food estate*.[14] Transmigrasi adalah pengalaman kehilangan tanah terbesar pertama bagi Malind Anim, terutama karena dikawal oleh kekuatan militer (Pakage 2018). Tidak kalah penting seiring dengan kehadiran transmigrasi di Merauke ini, baik diprogramkan atau tidak, adalah introduksi sawah dan sapi. Bagian selanjutnya akan menjelaskan bagaimana proses migrasi dan produksi padi sawah berkelindan menjadi mekanisme komodifikasi tanah melalui dua cara yang saling menguatkan, yaitu koersi secara non-ekonomi dan paksaan halus (*dull compulsion*) secara ekonomi.

[14] Tempo, 12 November 2024, Menteri Transmigrasi Pastikan Tidak Ada Program Pemindahan Penduduk ke Papua (https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-transmigrasi-pastikan-tidak-ada-program-pemindahan-penduduk-ke-papua-1167217)

Transmigrasi 1910-1925 dan Proyek Kumbe 1951-1956

Pada awalnya, orang-orang Jawa datang ke Merauke sebagai pembantu rumah tangga residen, kontrolir dan staf pemerintahan kolonial Belanda (Schoorl 2001). Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai dan penduduk di kota Merauke, pemerintah Belanda kesulitan memasok bahan pangan sesuai kebutuhan, karena hanya tergantung pada kapal NNGPM yang berlabuh sebulan sekali di Merauke (Beck 1957). Sebagai solusi, Pakage (2018) mencatat bahwa pemerintah Belanda mendatangkan orang Jawa pada 1908 untuk bertanam padi dan sayur-mayur dan ditempatkan di Kuprik. Kedatangan mereka juga disertai penempatan orang-orang dari pulau Rote dan Timor untuk beternak dan menjaga sapi dan kuda milik pegawai-pegawai Belanda. Untuk keperluan pemukiman dan pertanian tersebut, pemerintah Belanda menduduki tanah-tanah orang Malind dengan cara perang dan menangkap, lalu mengasingkan, ketua-ketua suku Malind ke Ambon. Kedatangan orang-orang Jawa ini terus berjalan pada 1910 seiring dengan penempatan mereka ke Fiji dan Suriname sebagai buruh kontrak di perkebunan-perkebunan milik orang Belanda. Mereka yang didatangkan pada 1910 ditempatkan di Spadem dan Mopah lama. Arus kedatangan mereka terus berlangsung sampai 1925.

Sejalan dengan itu, untuk mengontrol persebaran orang Malind yang hidup di *bevak-bevak* di atas dusun-dusun yang mereka miliki, polisi kolonial Belanda membuat Malind Anim tinggal menetap di kampung-kampung. Pembentukan kampung, yang juga dipicu karena munculnya wabah dan pasifikasi, dilakukan dengan memaksa sebagian besar Malind Anim pindah dan tinggal bersama di tanah milik salah satu marga atau sub-suku lain yang bukan haknya secara adat. Kekacauan sistem tenurial adat mulai terjadi dari sini. Kekacauan terjadi karena perpindahan ini tidak diiringi oleh perubahan terurial berdasarkan kesepakatan secara internal adat. Masing-masing pihak saling bertenggang rasa dan memberi ruang, tapi tak memiliki nama atau sebutan bagi mereka yang pindah tinggal ini.[15] Dengan demikian, permasalahan tanah yang terjadi karena kedatangan orang luar bukan hanya membawa permusuhan keluar tapi juga ke dalam.

[15] Hasil diskusi dengan Ketua Adat Kampung Zanegi dan para tetua pada bulan Maret 2011

Gambar 2. Perempuan Jawa di Merauke pada 1932[16]

Hampir tiga dekade kemudian, Karel Knödler, residen Afdeling *Zuid-Nieuw-Guinea*, dalam perjalanan inspeksi ke Merauke pada 1953, sebagai salah satu *onderafdeling* di bawah pengawasannya, melaporkan kekagumannya pada proyek-proyek pemerintah skala besar, yaitu peternakan sapi di Mopah dan proyek budidaya padi secara mekanis di tepi sungai Kumbe (Schoorl 2001). Kedua proyek ini, menurut Knodler, "..dipimpin insinyur pertanian yang berpengalaman dengan beberapa pegawai Belanda. Selain ditargetkan mengurangi impor beras, budi daya padi ini diharapkan dapat merangsang Orang Marind, penduduk asli yang congkak dan dahulu terkenal ganas di bagian *onderafdeling* ini.." (hlm. 335). Tidak ada data bagaimana tanah yang dibuka seluas 400 hektar di tepi Kumbe ini bisa digarap tanpa serangan berarti dari orang Marind.

Proyek ini dilaksanakan oleh Yayasan Persiapan Usaha Pertanian (*Stichting Tot Voorbereiding Van Agrarische Bedrijven*) yang didirikan oleh pemerintah Belanda, di bawah Kementerian Pertanian dan Kementerian Bisnis Luar Negri. Tanah seluas 60 hektar disiapkan sebagai lahan percobaan beragam varietas padi. Laporan manajer proyek Kumbe pada 1957 menggambarkan pelibatan orang Malind hanya sebagai tenaga kerja kasar. Mereka dikerahkan dalam pembuatan polder, tapi tidak tertarik pada upah dan tidak suka bekerja secara teratur, apalagi karena diharuskan. Mereka mau bekerja di proyek Kumbe semata karena ketertarikan pada barang-barang yang ada di toko proyek (Beck, 1957).

[16] Corbey, R. 2010. *Headhunter form the swamp: The Marind Anim of New Guinea as seen by the Missionaries of the Sacred Heart*, 1905-1925. KITLV Press, Leiden.

Hasil panen dari lahan percobaan ini sangat fluktuatif karena deraan hama dan penyakit sejak benih ditanam, yaitu: 1,35 ton/ha pada 1956, 1,04 ton/ha pada 1957 dan 1,80 ton/ha pada 1960 (Katayama, 1962). Hasil yang masih dalam taraf percobaan ini kemudian dikirim ke seluruh Tanah Papua yang dikuasai Belanda. Rencananya proyek Kumbe akan dijadikan bisnis pertanian skala besar, tapi tidak berhasil menarik investasi swasta karena dinilai tidak menguntungkan dan ada masalah politik penyerahan kedaulatan pada 1962, sehingga dihentikan (Bartels et.al 1993).

Gambar 3. Orang Marind di Proyek Kumbe[17]

Gelombang pertama perampasan tanah Malind Anim berjalan seiring dengan pendudukan kolonial Belanda. Koersi non-ekonomi untuk merampas tanah Malind dilakukan melalui peperangan dan pengasingan. Namun, Proyek Kumbe menandai pergeseran dari perampasan tanah untuk produksi yang bertujuan memberi makan penduduk menjadi produksi untuk bisnis pertanian skala luas, yang gagal.

[17] https://picryl.com/media/midden-door-het-areaal-van-het-koembe-rijstproject-efbb30

Transmigrasi 1984-1986 & Pengembalian Tanah Adat

Pertanian padi sawah seiring dengan kedatangan orang Jawa di masa kolonial ini membawa preseden bagi pengembangan program transmigrasi di masa pemerintahan Indonesia. Ada dua preseden yang dilanjutkan, yaitu: 1) migran sebagai instrumen kolonisasi; 2) migran sebagai tenaga kerja pertanian. Analisa McNamee (2023, hlm.79) sedikit banyak juga mengafirmasi kedua preseden ini. Ia memandang transmigrasi di West Papua sebagai cara untuk menguras sumber daya dan mengkonsolidasi teritori.

Kedatangan migran Jawa sebagai instrumen kolonisasi datang dari cerita seorang perempuan Jawa asal Muntilan, dipanggil Bu Sri, yang datang ke Merauke pada 1967.[18] Setelah gelombang sebelumnya didatangkan pada 1964 dan ditempatkan di Kumbe, gelombang ke-2 pada 1966-1967 ditempatkan di kampung Wonorejo, Distrik Merauke dan di kampung Sidomulyo, Distrik Semangga. Bu Sri menyebut gelombang ke-2 ini sebagai: 'didatangkan oleh Soekarno untuk menambah suara PEPERA'. Di Wonorejo ada 90 orang, termasuk Bu Sri, dan total semuanya tidak sampai 300 orang[19]. Ia menceritakan alasannya ikut transmigrasi, "*Di Jawa tanah sudah susah untuk usaha. Dapat warisan tanah sempit saya kasihkan ke keponakan. Di sini, buat rumah sendiri, pertama dari alang-alang, tidak disediakan pemerintah. Saya dan suami buka sawah sendiri, pertama 5 hektar, sampai 10 hektar. Baru buka penggilingan. Dulu hasil suami dari sensor kayu. Saya ambil modal dari bos yang beli kayu untuk buka usaha*." Generasi transmigran PEPERA ini menurut Bu Sri banyak yang bertahan dan berhasil, hanya 1-2 keluarga yang memutuskan kembali ke Jawa. Keluarga Bu Sri sendiri merupakan kisah keberhasilan yang diimpikan para migran: memiliki usaha yang terus berkembang, dan dua orang anak yang lulus perguruan tinggi di Jawa, sudah bekerja dan memiliki usaha sendiri.

Orang Jawa yang lapar tanah dan sudah terbiasa dengan pertanian sawah membuat kondisi produksi padi di Merauke tampak sepadan bagi pemosisian transmigran sebagai tenaga kerja di pembukaan lahan pertanian baru. Gelombang transmigrasi ke Merauke di masa Suharto (1982-1984) adalah gelombang mobilisasi tenaga kerja untuk produksi beras. Para transmigran sebagian besar ditempatkan di wilayah yang dialokasikan atau pernah dibuka untuk pertanian padi sawah. Menurut Manning & Rumbiak (1989), penetapan transmigran Merauke sebagai 'petani penghasil beras di Irian Jaya' tidak berasal dari para perencana program transmigrasi di Jakarta, tapi berdasarkan permintaan provinsi.

---

[18] Wawancara di kios Bu Sri, Pasar Kurik, 14 Juli 2012, dalam perjalanan ke Kaliki untuk melihat upacara pelepasan tanah adat kepada perusahaan

[19] Data Manning & Rumbiak (1989, hlm.49) jumlah transmigran dari Jawa ke Merauke pada 1964-1979 adalah 167 keluarga.

Proyeksi Merauke sebagai penghasil beras memang dikonfirmasi oleh peningkatan produksi secara signifikan pada 1985. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut ditebus oleh kehidupan transmigran yang tidak mudah. Daerah rawa yang mendominasi perkampungan menyebabkan pertanian padi sangat tergantung pada kondisi musim. Ditambah dengan sering terlambatnya pasokan pupuk dan pestisida kepada petani, mengakibatkan banyak migran Jawa memilih untuk mencari pekerjaan ke kota ketika musim kering atau pindah ke kota, bahkan kembali ke Jawa (Manning & Rumbiak 1989).

Kesaksian Mbah Ratno, eks-trans yang tinggal di kampung Salor 2 (Salor Indah) sejak 1983, menggambarkan kondisi yang diidentifikasi oleh Manning & Rumbiak tersebut. Mbah Ratno dan istrinya sempat memutuskan untuk bekerja dulu di proyek di kota Merauke, setelah jatah hidup (jadup) mereka habis. Ketika proyek selesai, mbah Ratno ditawari untuk melanjutkan kerja ke Mappi dan ia bersama istrinya tinggal di sana sampai dua tahun, baru kemudian kembali lagi ke Salor 2 (Salor Indah). Keputusan mbah Ratno untuk ikut proyek bukan saja karena jadup habis, tetapi juga karena lahan-2, jatah lahan bagi transmigran untuk digarap di luar kapling tempat tinggalnya, sudah 'dibayar dan diambil alih oleh pemerintah.' Hilangnya lahan-2 dan sulitnya bertani di lahan-1 yang berpasir juga menyebabkan tetangga depan Mbah Ratno meninggalkan rumah untuk berdagang dan membuka warung di Wayau. Alih-alih bertani, tetangga Mbah Ratno lainnya, yang menurut Mbah Ratno bahkan buta huruf tapi tahu berhitung uang, malah mulai berjualan naik sepeda ke kampung-kampung, hingga anaknya sekarang memperluas usaha dagang keluarga dan menjadi toserba terbesar di wilayah Kurik. Ada juga mas Rukhani, karena gagal bertani, sehari-hari berdagang menggunakan mobil bak keluar masuk kampung dan biasanya mangkal di kampung Zanegi menjajakan berbagai barang kelontong, jajanan dan bahan makanan.

Banyaknya transmigran yang datang pada 1983-84 dan meninggalkan lahannya juga digambarkan oleh peruntungan yang diraup oleh Ir. Anton, pensiunan pegawai kehutanan dan keluarga dari anak menantu Mbah Ratno. Ir. Anton memasang poster 22 hektar tanah yang sudah dibagi-bagi menjadi kavling siap jual. Menurutnya, semua tanah itu ia beli di tahun 80-90an dari para transmigran yang meninggalkan tanah jatahnya dengan harga keseluruhan hanya 45 juta rupiah. Saat ini harga kavling siap bangun yang berlokasi di wilayah yang akan dikembangkan menjadi ibukota provinsi Papua Selatan itu bernilai 500 juta rupiah per hektar. Ia menjadikan rumah Mbah Ratno sebagai 'Posko Tanah & Kavling Salor 2 (Salor Indah)' (**Gambar 4**). Belum lagi tanah eks-trans di Jagebob yang ia pegang setumpuk sertifikatnya, tapi tidak tahu di mana lokasinya.

Gambar 4. Posko penjualan tanah dan kavling eks trans di Salor 2 (Salor Indah)

'Lahan-2 yang diambil kembali oleh pemerintah' dan lahan-1 yang tidak subur dikatakan oleh Pak Komar sebagai salah satu penyebab petani eks-trans mencari tanah untuk disewa. Lahan-2 ini menurutnya dikembalikan oleh negara kepada adat setelah terjadi 'rame-rame di Merauke' pada tahun 2000. Para eks trans menerima uang penebusan tanah karena tidak mau terjadi keributan dan merasa bersyukur karena sejak itu ada penempatan kompi (barak/asrama tentara) di Salor Kampung (Ivimahad), demikian tutur Komar.[20] Penuturan pak Komar ini selaras dengan catatan Pakage (2018, hlm. 90) mengenai pendirian markas batalion baru. Pada 24 Juli 2004, Malind *Anim* melakukan upacara pelepasan tanah seluas 20 hektar kepada PANGDAM XVII/Trikora untuk pembangunan markas batalyon infanteri 755.[21] Selanjutnya, Kompi C ditempatkan di Kurik dan lokasi asramanya menjadi bagian dari wilayah administrasi Kampung Ivimahad (Salor Kampung), yaitu di RT 5.

[20] Berdasarkan pengamatannya, Pakage (2018, hlm.55-56) menyatakan bahwa TNI memberikan jaminan keamanan yang cenderung berpihak pada orang non-Papua (migran), sedangkan orang asli melihat TNI sebagai 'ancaman' karena berbagai kekerasan yang dialami (intimidasi, teror, penyiksaan dan pembunuhan)

[21] Sejak 2018 Kompi C/755 Yalet menjadi bagian dari Yonif 757/Guktavira sebagai pasukan pemukul dan akan bermarkas di Boven Digul (https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/327924/personel-batalyon-757-guktavira-mulai-diisi-bertahap)

Pengalaman pengembalian tanah adat ke marga-marga orang Malind ini menyebabkan hubungan orang Salor 2 (Salor Indah) dengan Salor Kampung tidak sebaik seperti hubungan orang Salor Kampung dengan para keturunan migran Jawa di Salor 1 (Kampung Telagasari). Penilaian ini disampaikan oleh seorang petani penyewa tanah adat di Salor 1, karena sesekali muncul ketegangan atau sentimen negatif antara petani penyewa tanah di Salor 2 (Salor Indah) kepada pemilik tanah adat di Salor Kampung, sementara petani di Salor 1 lebih terbuka untuk bercampur. Ada anak-anak Salor Kampung yang tinggal di rumah-rumah pemukim eks trans di Salor 1 untuk bersekolah, karena SD terdekat ada di situ. Dengan begitu, ia merasa hubungan mereka sudah seperti keluarga, bukan hubungan antara pemilik dan penyewa tanah.

Relasi penyewaan tanah antara petani eks-trans dengan pemilik dusun, termasuk penjualan tanah dari orang Malind ke petani eks trans, berlangsung sejak pencetakan sawah dimulai oleh program MIFEE 2009 dan semakin meluas pada era pencetakan sawah sejuta hektar periode Jokowi (2015). Babinsa pun mulai tinggal di kampung dan berada setiap hari di sawah atau mengurus persoalan terkait bantuan sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Babinsa Kampung Telaga Sari Koramil 1707/05/Merauke Kopda Slamet Kurniawan mengajar Wawasan Kebangsaan kepada siswa-siwi SDN Inpres Salor 1, Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan.
Sumber foto : papua.us

Cetak sawah dan Peran militer

Sejak 2011, Inpres No.5 telah menginstruksikan 18 unsur pemerintahan (Kementerian/ Lembaga) termasuk Panglima TNI dan Kepala Kepolisian untuk mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respons cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim. Dengan gerak cepat, pada 13 April 2012, Kementerian Pertanian dengan TNI menandatangani kesepakatan kerja sama bernomor 13.002/HK.130/F/04/2012 dan KERMA/10/IV/2012MoU sebagai tindak lanjut dari MoU bernomor 03/MoU/PP.310/M/4/2012 dan NK/9/IV/2012 tentang Kerjasama Program Pembangunan Pertanian untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.[22]

Karena dianggap berhasil, Inpres yang sama digunakan untuk menjustifikasi keterlibatan militer dalam produksi pangan di masa pemerintahan Jokowi. Realisasi Inpres ini adalah Nota Kesepahaman yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja sama antara TNI dan Kementerian Pertanian sepanjang satu dekade terakhir. Berdasarkan perjanjian tersebut, diturunkan Babinsa di seluruh desa pertanian di Indonesia sejak 2015, untuk 'membantu sosialisasi bidang pertanian,' disebabkan Kementerian Pertanian kekurangan tenaga penyuluh.[23] Di bawah koordinasi Menteri Pertanian 2014-2019, Amran Sulaiman, yang di akhir masa jabatan Jokowi dan pada kabinet Prabowo menjabat lagi sebagai Menteri Pertanian, berbagai peraturan menteri dan petunjuk teknis yang mendasari mekanisme kerja sama Kementerian Pertanian dan TNI pun dikeluarkan.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) di lahan food estate, Merauke, Papua Selatan, pada 24 Mei 2024.
Sumber foto : rmol.id

22 https://tni.mil.id/view-35099-penandatanganan-kesepakatan-bersama-kementerian-pertanian-ri-dan-tni.html; Wahyu Aji, 13/4/2021. "TNI dan Kementerian Pertanian Teken MoU", https://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/13/tni-dan-kementerian-pertanian-teken-mou

23 https://www.kemhan.go.id/badiklat/2015/01/15/bantu-sosialisasi-pertanian-babinsa-masuk-sawah.html

Program cetak sawah 2009-2017 (MIFEE & LPN): Kontrol Tenaga Kerja

Dalam Grand Design MIFEE (Kementerian Pertanian, 2010), tanah Malind Anim dibagi menjadi 10 klaster pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dan memprioritaskan KSPP Salor (Greater Merauke) sebagai daerah pengembangan Agro Estate yang berpusat di Distrik Kurik, serta menjadikan KTM Salor Indah sebagai pusat KSPP atau Agropolitan (**Gambar 5**).

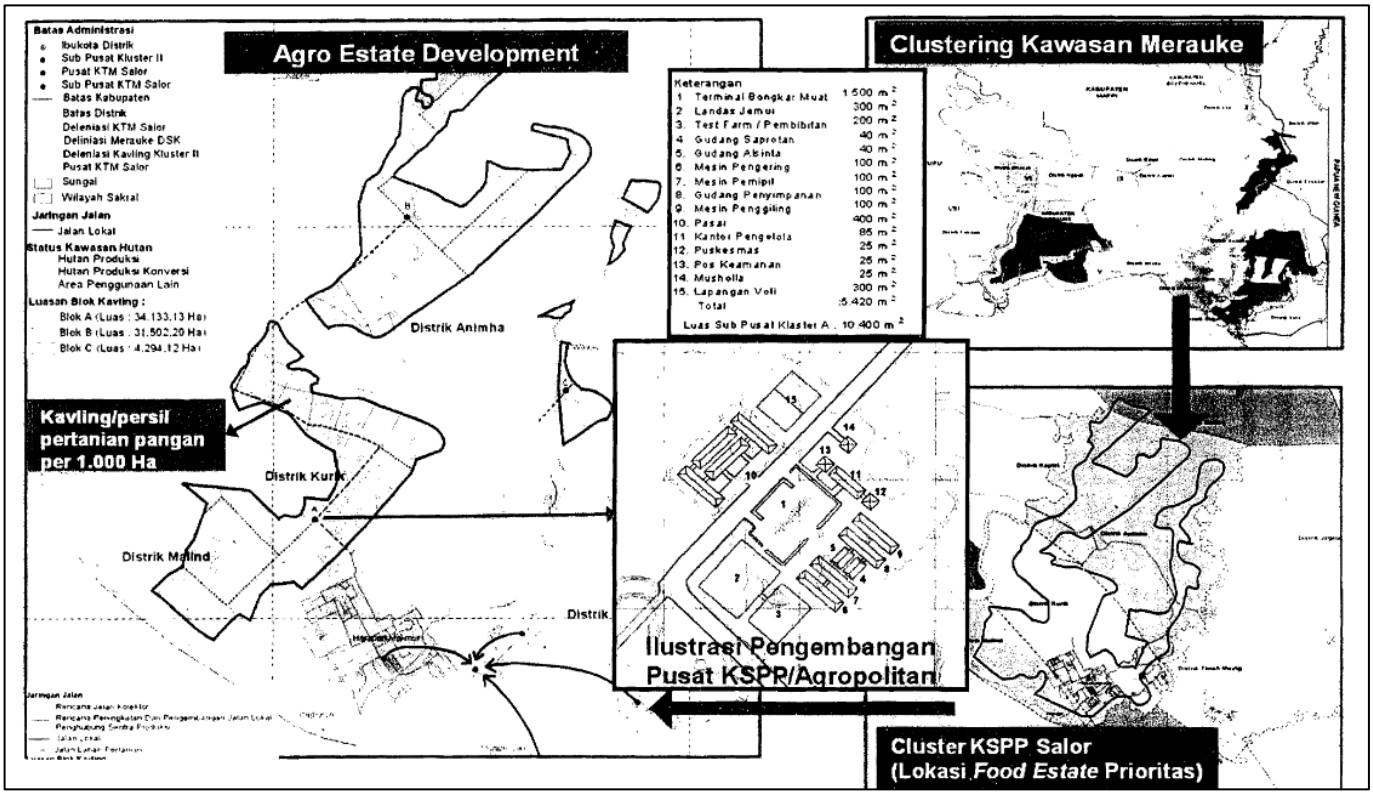

Gambar 5. Rencana pengembangan Agro Estate KSPP Salor pada 2010

Program cetak sawah yang ditargetkan 1 juta hektar dan terealisasi 10.000 hektar pada 2015-2017 atau program Lumbung Pangan Nasional (LPN), kini berlanjut dengan program optimalisasi lahan (Oplah) yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional Pangan di Merauke. Menurut Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Papua, cakupan program Oplah adalah sbb:

- Zona I (5.282 Ha) berada di Kp. Telaga Sari, Salor Indah dan Wapeko.
- Zona II (5.638 Ma) berada di Kp. Wind Jaya, Jaya Makmur, Anumbob, Suka Maju dan Sumber Mulya.
- Zona III (5.764 Ha) berada di Kp. Ivimahad, Harapan Makmur, Candra Jaya dan Wonorejo.
- Zona IV (5.319 Ha) berada di Kp. Kurik, Rawasari, Padang Raharja, Kumbe, Kaiburse, Onggari dan Domande.
- Zona V (4.453) berada di Kp. Kamangi, Yasa Mulya, Waninggap Say, Hidup Baru, Tambat, Sermayam Indah, Ngguti Bob, Senayu dan Bersehati.
- Zona VI (5.995 Ha) berada di Kp. Muram Sari, Waninggap Kai, Marga Mulia, Sumber Harapan, Waninggap Miraf dan Amunkal.
- Zona VII (5.419 Ha) berada di Kp. Semangga Jaya, Kuprik, Sidomulyo, Urumb, Waninggap Nanggo, dan Matara.
- Zona VIII (5.060 Ha) berada di Distrik Jagebob.
- Luas total lahan adalah 42.930 H[24]

Zonasi ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan zonasi KSPP pada era MIFEE (**Gambar 6 & 7**), yaitu KSPP Greater Merauke dan KSPP Yeinan, yang sepadan dengan Cluster 3 (Oplah dan B50 tebu).

Plang konstruksi Optimalisasi Lahan Rawa di Distrik Jagebob, Merauke.
Sumber foto : Pusaka Bentala Rakyat.

[24] https://papua.bsip.pertanian.go.id/berita/bsip-kementan-mendampingi-oplah-kab-merauke

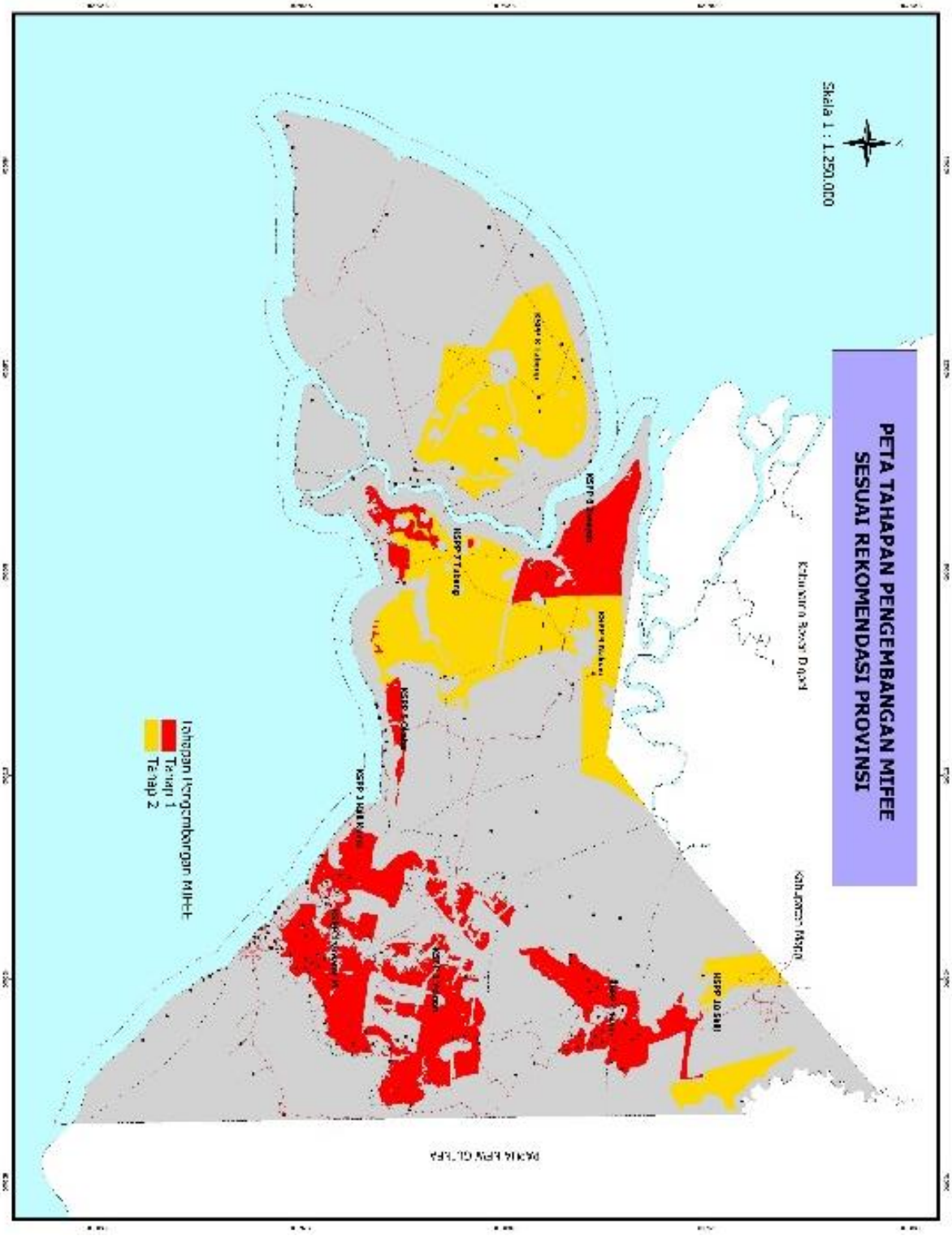

Gambar 6. Zonasi dan klaster KSPP MIFEE 2012

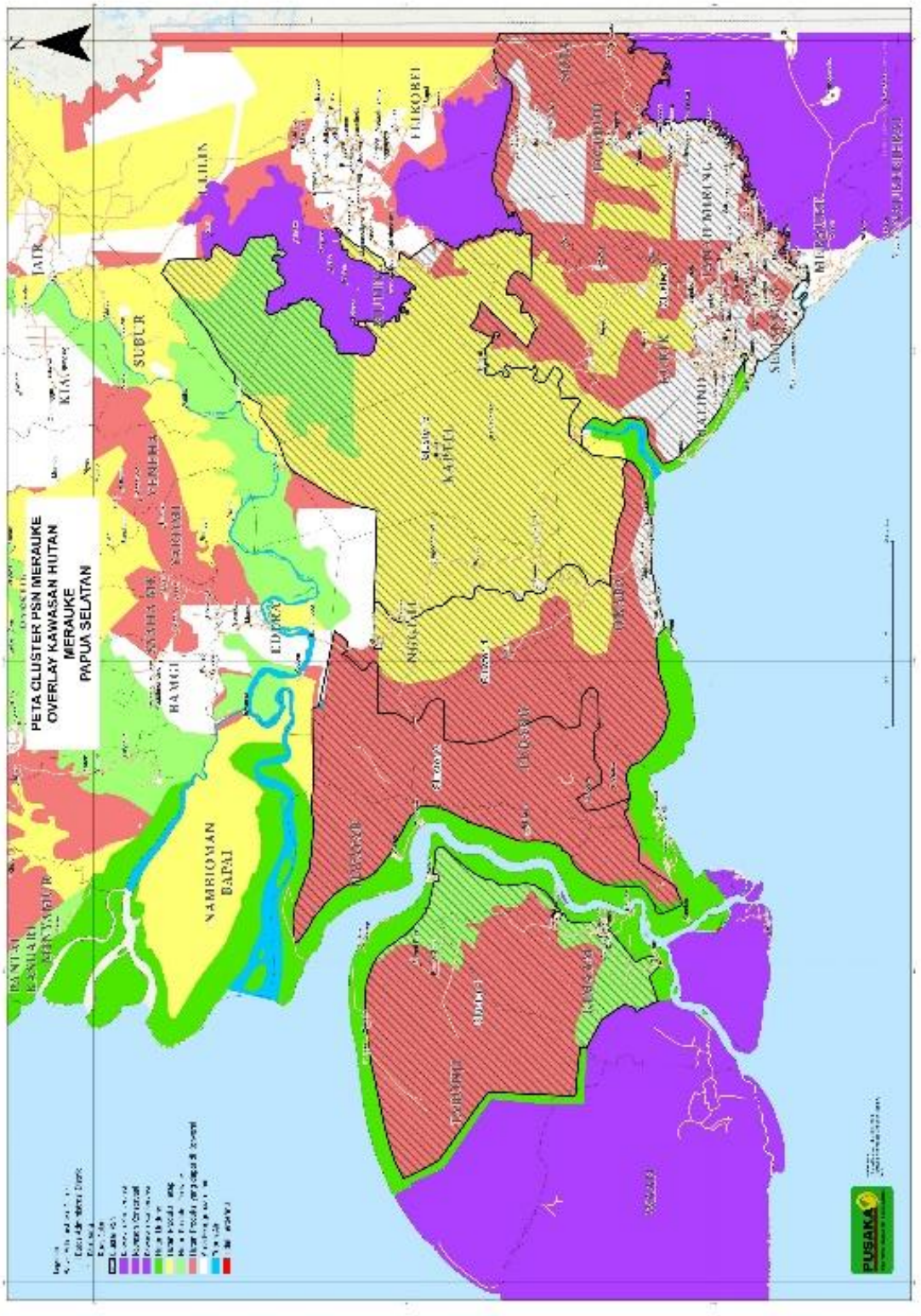

Gambar 7. Zonasi dan klaster PSN 2024

Konsistensi spasial dan alokasi lahan untuk padi selama satu dekade ini ternyata tidak diiringi oleh konsistensi implementasinya secara sosial. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjabat pada 2017, gagasan menjadikan Merauke sebagai lumbung padi menurutnya sudah dibicarakan sejak 2001 dan dikonsepsi oleh Bupati John Gluba Gebze (2001-2010) sebagai Merauke Rice Estate (MIRE). Pada Grand Design MIFEE ini masih terlihat penekanan pada produksi beras atau tanaman pangan. Namun, Kadis Pertanian juga menyatakan sudah terjadi *penyimpangan* setelah menjadi kebijakan nasional (Savitri 2018, hlm.180). Untuk menebus 'penyimpangan' tersebut, sejak 2014 cetak sawah diprioritaskan di tanah ulayat, bukan lagi di lahan-2 transmigran seperti era Bupati Romanus Mbaraka (2010-2014).

Dalam pandangan seorang tokoh migran Jawa di Kurik, keterlibatan tentara untuk cetak sawah sejak pencanangan sawah sejuta hektar pada 2015, telah memperlancar program. Menurut pandangan tokoh ini, 'masuknya tentara dalam pekerjaan ini dapat menghilangkan hambatan yang biasanya terjadi karena ketegangan antar warga soal upah buka lahan' (Savitri 2018, hlm.180). Pengalihan pekerjaan pembukaan lahan dan pencetakan sawah dari sipil ke militer dilaksanakan berdasarkan PKS Kementerian Pertanian dengan TNI pada 2015. Seluruh pendanaan berasal dari APBN 2015, sebesar 353 miliar dan diluncurkan melalui mekanisme swakelola kepada TNI, termasuk pemberian 'insentif' untuk prajurit sebagai tenaga kerja pembukaan lahan (hanya dibayar dengan tambahan uang lauk pauk 100 ribu rupiah). Kegiatan cetak sawah tahun 2016 itu dilaksanakan di sembilan provinsi dan 11 kabupaten, di mana terbesar berada di kabupaten Merauke seluas 10.000 Ha.[25]

Truk-truk besar TNI terlihat sering hilir-mudik keluar masuk kota Merauke, ketika penulis berada di Merauke pada Desember 2017. Kadis Pertanian waktu itu menjelaskan bahwa kegiatan TNI ini memang hanya membantu pembukaan lahan dan pencetakan sawah, tapi pengerjaan sawah dilakukan oleh petani (Savitri 2018). Seorang mantan kepala kampung Salor, pada diskusi kami di Salor mengatakan bahwa ia mengerjakan sawahnya sendiri dan sudah mengoperasikan dan memiliki *combine harvester* yang diberikan oleh Bupati. Dalam pengerjaan sawah, Babinsa lebih sering ada di sawah daripada PPL, demikian kesaksiannya.

Rupanya, kewenangan Babinsa ini juga mencakup urusan lain di luar pertanian. Ketika obrolan kami berlangsung dengan Kepala Kampung Wapeko, Babinsa datang dan ikut hadir mendengarkan. Ia juga beberapa kali menanyakan berapa lama saya akan tinggal di sana. Akan tetapi, tak berapa lama kemudian, perhatian Babinsa beralih pada masalah pekerjaan pembuatan fasilitas sanitasi yang sedang berlangsung di lokasi obrolan dan menurutnya bermasalah. Ia memanggil seorang warga yang dianggap bertanggungjawab atas penyelewengan dana proyek sanitasi dan langsung dipukul wajahnya di hadapan semua orang.[26] Tak seorang pun bereaksi kaget atau membela orang yang dipukul itu, seakan pemukulan adalah hal yang biasa saja terjadi dan wajar dilakukan oleh pak Babinsa.

---

25 https://nasional.kontan.co.id/news/kemtan-gandeng-tni-cetak-sawah-32-ribu-hektare

26 Catatan harian, data observasi 12/12/2017

Sebelum terjadi pemukulan oleh Babinsa, Kepala Kampung Wapeko dan mantan kepala kampung Salor sedang bercerita tentang pengalaman mereka mengikuti Diklat Kesiapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baru saja diikuti oleh Kepala Kampung Wapeko sebulan sebelumnya. Diklat ini diadakan setiap tahun, selalu menyertakan kepolisian dan TNI sebagai penyelenggara. Pada tahun 2017 diklat ini diadakan di salah satu fasilitas militer dan dilaksanakan secara militeristik. Semua kepala kampung diasramakan selama satu minggu dengan jadwal ketat. Selama proses diklat berlangsung, Babinsa dan anggota Koramil memberi sanksi fisik pada peserta yang dianggap melanggar aturan, termasuk di antaranya hukuman *push up*, lari keliling lapangan, sampai ditendang jika melawan. Menurut sang mantan kepala kampung Salor, 'pada waktu itu hak asasi manusia dicabut.' Namun, pernyataan ini diutarakan dengan tertawa-tawa, seolah menertawakan diri sendiri yang 'tidak menjadi manusia' pada saat itu.

Kedua cerita ini menggambarkan bahwa kehadiran militer sebagai 'motivator kedisiplinan' di tanah Malind bukan saja merupakan kontrol atas tenaga kerja di bidang pertanian, tapi sudah menggunakan metode militerisasi untuk pendisiplinan tubuh melampaui urusan produksi. Bahwa Babinsa bisa melakukan tindak kekerasan di depan publik dan dipandang wajar, bahkan tanpa harus mengenakan seragam militer, menandai internalisasi atas normalisasi kekerasan yang dilakukan oleh militer dalam kehidupan sehari-hari orang Malind.

Panglima TNI Agus Subiyanto, meninjau lahan Food Estate Merauke, Papua Selatan, pada Rabu 22 Mei 2024.
Sumber foto: Puspen TNI / Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Program Oplah 2024: Konsolidasi dan Penguasaan Tanah

Dari perbandingan spasial sebelumnya (**Gambar 6 & 7.**), dapat dikatakan bahwa program Oplah sekedar melanjutkan target-target yang tidak bisa dicapai pada masa MIFEE dan cetak sawah sejuta hektar dalam program Lumbung Pangan Nasional (LPN). Persamaan lainnya adalah skema insentif untuk petani agar bersedia menanam tiga kali setahun, yaitu bantuan berupa 900 ribu rupiah per petani yang bersedia tanam di musim tanam ke-3. Untuk Oplah 2024 total dana yang disalurkan melalui Gapoktan adalah sekitar 30 milyar rupiah.[27] Perbedaan pelaksanaan Oplah 2024 dengan MIFEE terletak pada derajat keterlibatan militer, yang khusus untuk pertanian padi sawah, secara formal baru dimulai sejak periode pemerintahan Jokowi dalam program LPN, dan tepatnya sejak Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian. Salah satu peran yang cukup kentara dirasakan oleh masyarakat adalah gerak-gerik tentara untuk mengumpulkan atau 'mengkonsolidasi tanah.'

Dalam rangka mengumpulkan tanah untuk digarap menjadi sawah, nama Jokowi, sebagai presiden, digunakan oleh Wadan Denbekang XVII-44-04 Merauke Mayor CBA Philips Y. Hutapea, yang namanya teridentifikasi dalam kegiatan-kegiatan operasi militer selain perang (OMSP) di Merauke,[28] untuk meyakinkan marga Mahuze, Kaize dan Basik-Basik di Salor Kampung, bahwa ia mendapat surat perintah Presiden untuk mengembalikan tanah adat yang dibeli dan sudah disertifikatkan oleh pihak kedua. Surat perintah ini ia tunjukkan ketika melakukan sosialisasi ke Salor pada 2022 dan membuat hampir semua warga percaya.

Sang Mayor juga ternyata pernah datang ke Wapeko. Menurut pendapat Ketua Dewan Gereja, "Orang ini mau cabut hak tanah marga, kumpul tanah buat komandannya di KOREM." Reaksi berbeda yang muncul dari Ketua Dewan Gereja dikarenakan informasi yang ia dapat melalui jaringan sosialnya dengan mantan bupati John Gluba Gebze (JGG) menyebutkan bahwa, gerak-gerik sang mayor ini tidak benar dan sudah berada dalam pantauan intel. Sang mayor memang tidak pernah datang lagi ke Wapeko, tapi hadir secara intensif di Salor Kampung (Ivimahad).

Di Salor, dengan memanfaatkan relasi kekerabatan dengan isteri salah satu anggota marga Kaize, Mayor Hutapea berhasil meyakinkan marga Kaize, bahwa ia sudah berhasil mengembalikan tanah adat mereka seluas 60 hektar yang sudah dijual dan disertifikatkan hak milik oleh pembelinya. Menurut keterangan marga Kaize, proses pengembalian tanah tersebut sudah melalui sidang pengadilan. Sang Mayor pernah menelpon marga Kaize dan mengatakan bahwa "saya sedang ikut sidang. Tanah sudah kembali." Bahkan, menurut marga Kaize, sang mayor ini meminta pengacara Jakarta yang terkenal, Hotman Paris Hutapea,

---

[27] Obrolan dengan staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang sedang melakukan monitoring Oplah di Salor 2

[28] Mayor CBA Philips J. Hutapea (Wakil Komandan Denbekang XVII-44-04 Merauke) didapuk sebagai Pemateri dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh Universitas Musamus di Kampung Yanggandur. Beliau memberikan materi tentang Pancasila dan nasionalisme agar tidak mudah disusupi paham-paham lain yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan negara Indonesia. (https://www.rmolpapua.id/pendampingan-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara-dalam-meningkatkan-jiwa-nasionalisme-masyarakat-kampung-yanggandur-merauke).

untuk 'mewakili.' Tambahan lagi, sang mayor rela pasang badan untuk bertengkar dengan polisi yang membela pihak pemegang sertifikat hak milik. Sayangnya, marga Kaize sama sekali tidak memegang selembar kertas pun yang dapat membuktikan klaim pengembalian tanah itu. Menurut mereka semua surat-surat itu ada di tangan sang mayor. Di antara surat itu, sang mayor mengatakan ada akta notaris yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik marga Kaize. Klaim kosong ini sesungguhnya sulit untuk diterima sebagai fakta bahwa 'pengembalian tanah adat' telah betul-betul terjadi.

Sementara sebagian besar warga sepertinya percaya pada sang mayor, sampai-sampai Ketua Adat Salor melakukan upacara untuk mengangkat Hutapea sebagai anak adat, ternyata ada juga yang tidak mau percaya. Seorang anggota marga Mahuze dijanjikan oleh Hutapea untuk mendapatkan kembali tanah marganya yang telah dijual oleh salah satu anggota marga tanpa sepengetahuan yang lain. 'Mas Jawa' yang membeli tanah Mahuze, dan sudah memegang sertifikat hak milik, lalu diambil sertifikatnya oleh Hutapea. Ketika ia meminta uang pembelian tanahnya dikembalikan, Hutapea menyuruhnya untuk meminta kembali uang itu dari si penjual. Hubungan marga Mahuze dan Mas Jawa ini menjadi buruk sesudah itu. Akan tetapi, bukti bahwa tanah itu sudah kembali ke tangan marga Mahuze pun sampai hari ini tidak ada, kecuali sepotong kabar dari Hutapea bahwa tanah sudah menjadi milik Mahuze kembali. Menurut marga Mahuze, keberhasilan memperoleh kembali tanah itu dibayar dengan kesepakatan bahwa "tanah yang sudah kembali itu akan dipakai dulu 5-6 tahun oleh KOREM, untuk padi, tebu atau sawit, tergantung kecocokan atau kesuburan tanahnya, baru setelah itu dikembalikan." Di sinilah marga Mahuze merasa bahwa ada yang tidak beres dengan janji-janji tersebut.

Kemunculan aktor militer yang berperan sebagai 'pengumpul tanah untuk Korem,' juga ada di Kampung Waninggap Kai. Rizky Mahuze, ketua kelompok tani orang Papua bermarga (kelompok tani 'Ze Anim') di kampung ini, bertutur "*waktu perbaikan saluran dengan alat berat memang ada tentara sebagai pengawas. Tentara ini mendatangi warga dan tanya-tanya apa tanah mereka mau dikerjasamakan dengan bagi hasil 70:30*." Akan tetapi, Rizky sendiri menolak, karena ia memilih untuk menggarap sendiri sawahnya. Selain itu, menurutnya program ini tidak masuk akal karena menyasar sawah-sawah yang sudah digarap, bukan membuat sawah baru.

Dari berbagai kesaksian itu, terlihat ada kemunculan peran tentara - yang bukan hanya Babinsa-, untuk memastikan ketersediaan tanah bagi program pangan. Peran ini tidak ditemukan pada era Lumbung Pangan Nasional. Cetak sawah pada masa itu memicu proses perubahan dari tanah komunal yang tidak bisa dialienasi menjadi tanah privat yang siap dilepaskan melalui mekanisme pasar, tanpa keterlibatan langsung militer. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan *food estate* sebagai Proyek Strategis Nasional di era Jokowi yang diestafetkan ke Prabowo, peran militer berubah menjadi agen-agen konsolidasi tanah. Peran teknis yang bergeser ke peran sosial politis ini dinilai banyak pengamat militer sebagai menabrak UU TNI, tapi berlindung di balik kepentingan negara untuk menarik militer melakukan apa yang disebut sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pergeseran peran militer ini bisa diidentifikasi melalui peristiwa-peristiwa seremonial panen raya bersama petinggi negara. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi peristiwa diagnostik (Moore 1987) yang mengurai bagaimana proses pengambilalihan kontrol atas tanah dan mesin pertanian dari tangan petani oleh militer terjadi atas nama kebijakan swasembada pangan. Beberapa peristiwa diagnostik tersebut adalah:

a) Panen Raya dan Tanam Padi Bersama KASAD TNI, 2 Mei 2024, di Ivimahad

Dalam merealisasikan keterlibatan TNI dalam program pangan, Korem 755 melakukan panen raya bersama KASAD, Jendral Maruli Simanjuntak.[29] Laman TNI AD mengutip pernyataan KASAD sbb: "Kita (TNI AD) dan pemerintah daerah sudah mulai mencoba menanam padi. Sebab selama ini padi hasilnya kurang baik di Merauke. Kita coba hitung berapa hasilnya per hektar, hitungannya kita dapat 5,5 ton/hektar, dan itu sangat luar biasa untuk di Merauke. Mudah-mudahan pada panen kedua dan ketiga, maupun selanjutnya, kita dapat target yang diharapkan," ujar Kasad optimis seraya menyebut bahwa 150 unit traktor maupun Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) akan diberikan untuk membantu masyarakat Papua membuka lahan dan bercocok tanam.

Gambar 8. Panen raya bersama KASAD TNI di Ivimahad (foto: TNI AD)

[29] https://tniad.mil.id/dari-kampung-ivi-hamad-merauke-tni-ad-dukung-ketahanan-pangan/

Pengerjaan sawah di lahan seluas 34 hektar, dengan luas panen 17 hektar ini, yang diklaim dikerjakan bersama-sama dengan orang Kampung Ivimahad, menyimpan cerita kekecewaan.[30] Diskusi dengan beberapa anggota marga Kaize dan Mahuze di Ivimahad menghasilkan cerita yang berbeda dengan berita-berita panen raya di media. Wakil marga Kaize menyampaikan bahwa mereka didatangi oleh Kompi dan diminta untuk bersedia meminjamkan tanah seluas 9 hektar untuk ditanami padi. Mereka tidak menolak, dengan bayangan bahwa tanah itu akan disewa atau bagi hasil. Ketika datang waktu bertanam, Kompi mengerahkan perempuan-perempuan, mama-mama janda, untuk bertanam padi dan hanya dibayar dengan sembako. Namun, sampai panen raya tiba, tak sebutir beras dan serupiah pun yang diterima oleh pemilik dusun dan mama-mama yang bekerja tanam padi. Bahwa tanah terluas yang digunakan oleh KOREM ini adalah tanah Kaize, bukan tidak mungkin hal itu berkaitan dengan klaim keberhasilan Hutapea untuk merebut kepercayaan dari marga ini.

Seorang mama yang menikah dengan marga Mahuze dengan miris mengungkapkan kekhawatirannya: "*Loreng dong masuk, dong kase hancur Masyarakat. Masyarakat mati*." Kata mati dalam konteks percakapan ini ditujukan untuk menggambarkan kondisi tanah sawahnya yang setelah dipanen tentara, kini terbengkalai, tapi tak bisa mereka ambil kembali. Mau menanyakan kepada militer bagaimana status sawah mereka, supaya bisa dikerjakan sendiri atau disewakan pun mereka takut. Mama yang lain menyambung: *"Kita mau tegur juga kita takut. Bukan takut apa…Takut laras juga…."* Tanah seluas 9 hektar yang diambil alih TNI tersebut tidak berani mereka sentuh lagi.

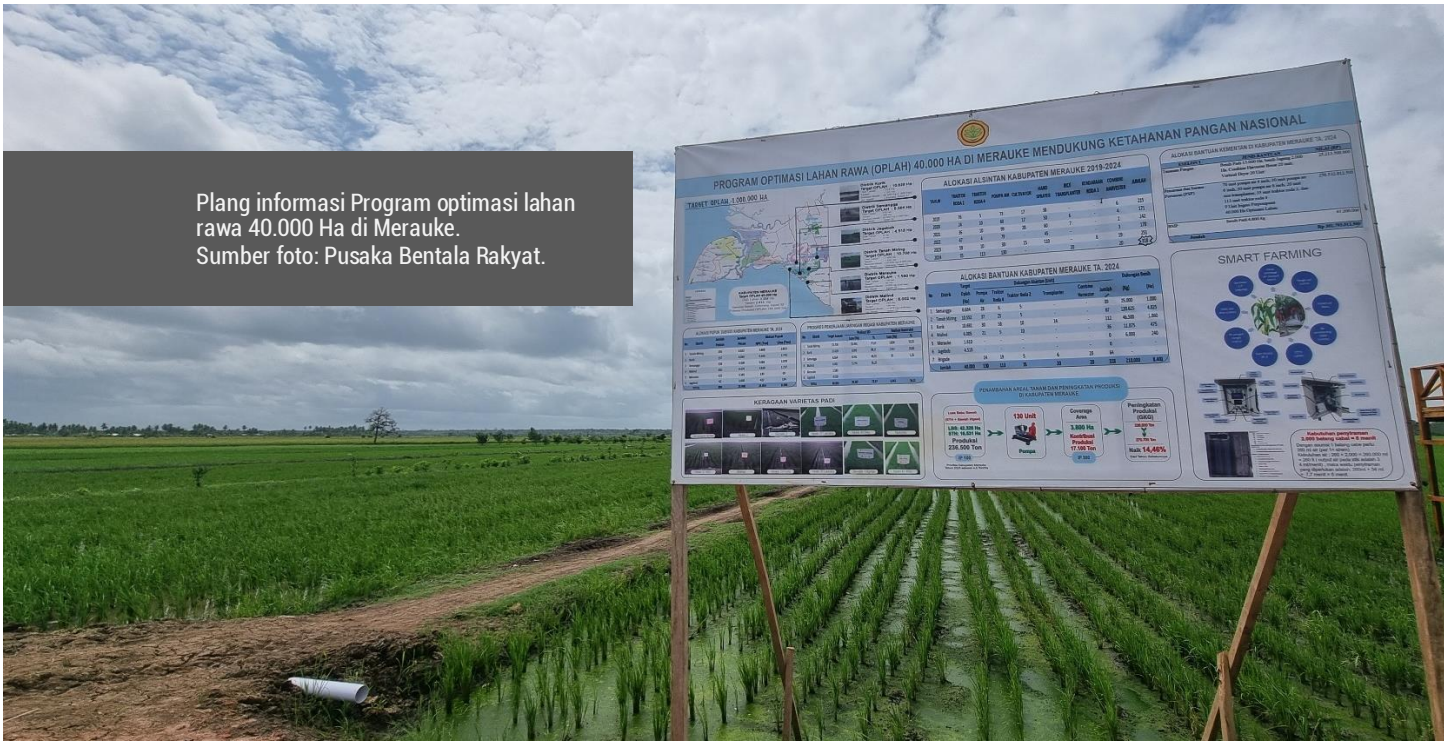

Plang informasi Program optimasi lahan rawa 40.000 Ha di Merauke.
Sumber foto: Pusaka Bentala Rakyat.

30 https://nasional.kompas.com/read/2024/05/03/18180061/tni-ad-mulai-tanam-padi-di-merauke-ksad-selama-ini-hasilnya-kurang-baik

b) Simulasi *Smart Farming* Dihadiri Presiden Jokowi di Lahan Sawah Telagasari, 23 Juli 2024

Peristiwa berikutnya adalah simulasi penggunaan *drone* untuk penebaran pupuk di demplot lahan sawah pertanian modern (*smart farming*) di Kampung Telagasari yang dihadiri oleh Presiden Jokowi.

Gambar 9. Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman memeriksa demplot pertanian modern (foto: BSIP Kementan)

Jauh hari sebelum presiden berkunjung, pada 16-17 April 2024, Menteri Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertahanan Herindra berkunjung ke Merauke. Secara khusus, Menteri Amran menyampaikan bahwa kini pemerintah akan mengembangkan 500.000 hektar sawah. Rencana tersebut merupakan suksesi dari *food estate* yang pada 2017 berhasil mengembangkan 10.000 hektar.[31] Mereka berdua menyemarakkan panen raya dengan masing-masing mengoperasikan langsung mesin pemanen (*combine harvester*) di Kuper, Distrik Semangga, di tengah hujan deras.[32] Di saat yang sama, musibah banjir sedang melanda empat kampung di distrik persawahan Kurik. Ribuan orang mengungsi dan 950 hektar sawah gagal panen.[33] Dua distrik yang terpisah hanya sekitar 1-2 jam perjalanan ini, di mana yang satu merayakan panen sedangkan yang lain mengalami musibah banjir dan panen hancur, seakan sama sekali tak terhubung sebagai tugas dan tanggung jawab kedua pejabat tinggi negara tersebut.

---

31 https://seputarpapua.com/view/kunjungi-merauke-mentan-janji-cetak-500-000-hektare-sawah.html

32 Channel Kemhan RI @kemhan: "Panen Raya Padi di lahan Distrik Semangga (17,630.67 Ha), di Kabupaten Merauke, Papua Selatan." https://www.youtube.com/watch?v=AXtFbx7kZLQ

33 https://jubi.id/Animha/2024/ribuan-warga-salor-merauke-mengungsi-akibat-banjir-ratusan-rumah-dan-sawah-terendam-air/

Kemudian pada Mei 2024, Ketua SATGAS Pangan, Jendral A.R. Ramdhani, datang ke Telagasari. Ia berkunjung hanya selang dua hari setelah musibah banjir lewat dan kepulangan pengungsi selesai diurus, demikian cerita pak Sekdes Telagasari. Kunjungan itu bukan dalam rangka memastikan keselamatan pengungsi yang baru kembali. Alih-alih bertanya tentang musibah tersebut, sang jendral meminta lokasi untuk sawah yang akan dikerjakan TNI sebagai demplot pertanian modern. Menurut beliau, setelah survei ke beberapa kampung, Telagasari dinilai memiliki lokasi yang paling cocok, terutama dari sisi keamanan dan kepentingan seremonial yang akan melibatkan para pejabat tinggi negara.

Ketika tiba hari simulasi *smart farming* yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, banyak warga yang rupanya dikecewakan oleh peristiwa tersebut. Bukan saja karena pengawalan yang ketat sehingga bahkan kepala-kepala kampung dan kepala distrik tidak boleh masuk ke lokasi upacara, tapi juga karena semua proses pengerjaan sawah 'percobaan' yang dipanen tersebut dikerjakan melulu oleh tentara. Pemilik sawah sempat protes, karena sawahnya yang sudah ditanami padi dan menuju panen, digasak oleh traktor tentara. Ia meminta ganti rugi 190 juta, tapi lama kemudian setelah acara panen raya berlalu dan hampir dilupakan, pemilik sawah dikabarkan baru dibayar entah berapa. Para petani di sekitar lokasi sawah tersebut menceritakan bahwa tentara-tentara yang datang dengan alat traktor itu seperti belum pernah pegang alat dan baru belajar. Tanah dibajak tanpa aturan, sehingga tanahnya menjadi kubangan lumpur yang sangat dalam. Mereka sampai meragukan apakah nanti padinya bisa dipanen karena kondisi tanah lumpur yang dalam tersebut.

Salah satu Exavator milik Jhonlin tenggelam di kubangan lumpur saat membuka lahan rawa di area Oplah, Merauke.
Sumber foto: Istimewa.

c) Panen Raya dan Tanam Padi Ditinjau Presiden Prabowo, 3 November 2024, di Telagasari

Seremoni panen raya bersama Prabowo untuk merayakan 'keberhasilan' optimasi lahan pada 3 November 2024, hanya merupakan ekspresi akhir dari semua proses dan bentuk keterlibatan militer yang telah bekerja sebagai instrumen pengadaan tanah secara koersif, sehingga tanah tersedia sesuai tujuan. Setidaknya ada sekitar 10 hektar lahan sawah di Telagasari yang diambil alih penguasaan dan pengerjaannya oleh militer sebagai demplot pertanian modern. Berdasarkan Petunjuk Teknis Optimasi Lahan 2024, semua lahan yang terkena program tidak mendapatkan ganti rugi jika terkena pekerjaan demplot seperti ini atau pun rekonstruksi irigasi. Namun, modal yang sudah dicurahkan untuk lahan-lahan padi yang sudah siap panen tentu saja bagi petani tidak sedikit, sehingga ketika padi siap panen digasak traktor untuk diganti dengan 'sistem pertanian modern,' maka ketidakjelasan soal keuntungan atau manfaat dari proyek ini merupakan kerugian yang tak tertunda bagi petani. Bagi petani rasional yang telah ditempa perhitungan ekonomi usaha tani dua generasi, tentu tidak masuk akal jika optimasi lahan berupa 'bongkar-pasang' padi dilakukan di sawah mereka yang sedang berproduksi, bukan di lahan-lahan tidur, demikian penilaian mereka.[34]

Gambar 10. Presiden Prabowo panen padi di Telagasari (foto: ANTARA/Galih Pradipta)

Ketiga peristiwa kunjungan kerja pejabat tinggi negara ini mengungkap berbagai proses yang ada dibaliknya. Dengan mengurai proses dibalik layar dari peristiwa-peristiwa tersebut, dapat diidentifikasi cara-cara koersif pengambilalihan tanah, baik secara halus maupun kasar, dan kontrol atas alat dan mesin pertanian oleh militer dari tangan petani.

[34] Wawancara beberapa petani OPA, Agustus-September 2024

REZIM TENAGA KERJA PADI

Produksi padi di Merauke sejak dilaksanakannya program sawah sejuta hektar alias Lumbung Pangan Nasional, menurut pencatatan statistik oleh BPS (2023) terlihat meningkat, meskipun dari sisi luas panen tidak terdapat penambahan luas panen yang cukup signifikan. Terdapat anomali, yaitu lonjakan luas panen sekitar 10.000 hektar pada 2021 (**Diagram 3.**) yang belum diketahui penyebabnya.

Diagram 3. Produksi padi dan luas panen 2018-2023 di Kabupaten Merauke

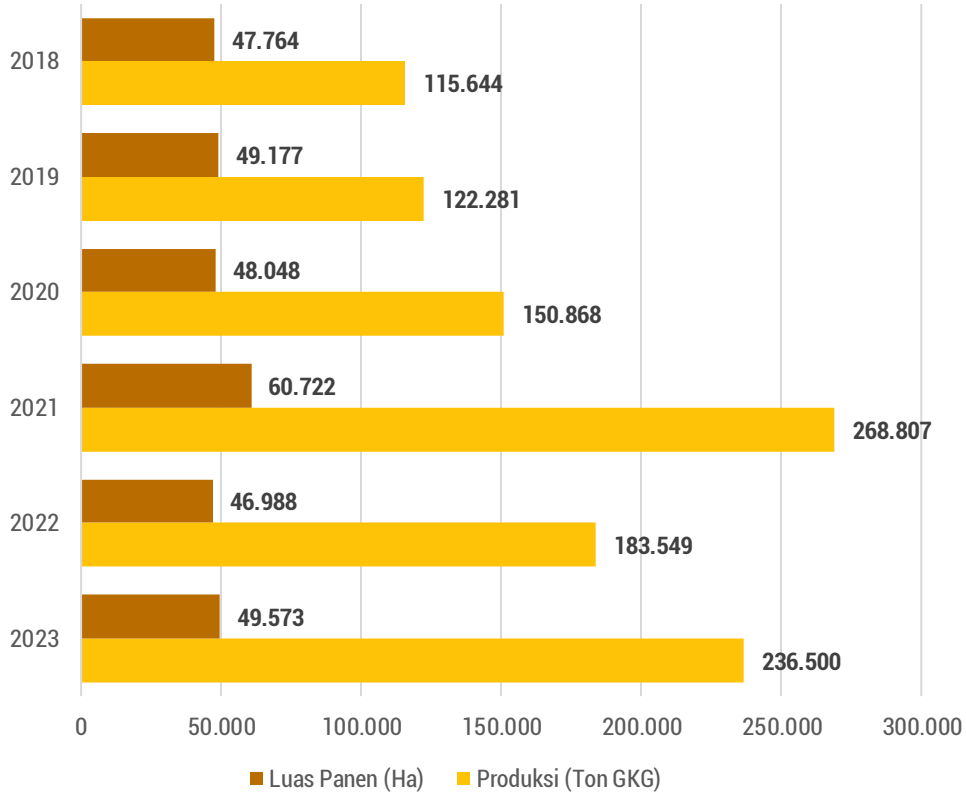

Apabila kedua data ini diperbandingkan, maka dapat dikatakan bahwa peluasan pencetakan sawah tidak serta-merta berdampak pada peningkatan produksi. Kajian Ikwanto & Halkis (2019) yang mengevaluasi program cetak sawah oleh KOREM 174/ATW menemukan bahwa program cetak sawah ini tidak efektif karena tidak diiringi oleh ketersediaan bibit yang mencukupi, pasokan pupuk dan saprodi lainnya yang kerap terlambat, jumlah alsintan yang terbatas, serta sistem irigasi yang belum memadai. Temuan tersebut juga diperkuat oleh kajian Widiastuti et.al (2023) yang menyebutkan bahwa salah satu penentu keberhasilan panen padi di sentra-sentra produksi di Merauke adalah penambahan input produksi, terutama pupuk. Pupuk menjadi faktor penentu yang penting karena kelas kesesuaian lahan di Merauke hanya berkategori S2 dan S3, yaitu memiliki faktor pembatas yang memerlukan penambahan modal.[35]

Maka merujuk pada beberapa kajian tersebut (Ikwanto et.al 2019, Widiastuti et.al 2023), sesungguhnya ekstensifikasi atau pertanian padi skala luas di Merauke sangat tidak efektif dan tidak efisien. Setumpuk permasalahan teknis menjadi kendala, seperti: kesesuaian lahan yang banyak pembatasnya, mahalnya input, ketersediaan bibit yang terbatas dan lemah kontrol kualitasnya, serta pasokan air irigasi dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Faktor air ini menyebabkan tingkat salinitas yang tinggi dan korosif terhadap alat dan mesin pertanian. Kondisi tersebut, ditambah dengan karakter fisik tanah yang keras ketika musim kering dan berlumpur di musim hujan, menyebabkan usia pakai alsintan tidak lebih dari lima tahun. Padahal, luasan petak-petak sawah di Merauke hampir tidak mungkin mendatangkan keuntungan bagi petani jika dikerjakan tanpa tambahan teknologi (Malik & Jamil 2008, Sukayat et.al 2023, Widiastuti et.al 2023). Dengan demikian, dari sisi kondisi produksi secara teknis, peluasan pencetakan sawah sangat bermasalah.

Dari kondisi sosial produksi, terjadi segregasi secara rasial. Hampir keseluruhan produksi padi sawah di Merauke terkonsentrasi di lokasi-lokasi pemukiman eks transmigrasi yang tersebar di Distrik Kurik, Tanah Miring, Semangga, dan Malind. Luas tanam padi sawah dan produksi beras atau gabah kering giling sampai dengan 2023 juga terbanyak berada di keempat distrik ini (No. 1-4 dalam **Diagram 4**). Di keempat distrik ini sebagian besar kampungnya yang merupakan eks pemukiman transmigrasi dengan beberapa kampung lokal menyelip di antaranya. Memang tidak semua pemukim eks trans menjadi petani padi. Namun, hampir keseluruhan produksi beras masih dihasilkan oleh para petani pemukim non-Papua yang mewarisi pengetahuan dari orang tua petani di Jawa dan pengalaman beradaptasi dengan alam Merauke (**Tabel 1**).

[35] Kelas S3 (sesuai marginal) adalah lahan yang mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu danya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta. Sedangkan S2 (cukup sesuai) adalah lahan yang mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri (Yasar et.al 2022).

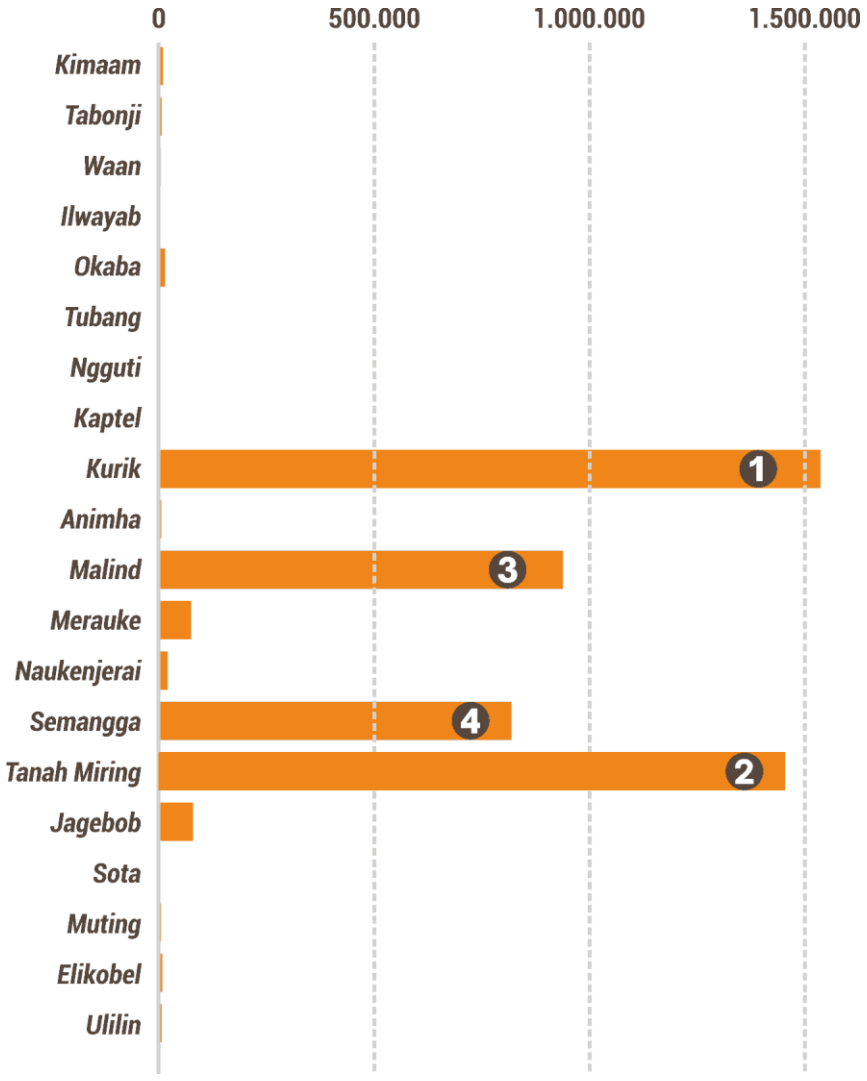

Diagram 4. Produksi beras di distrik-distrik eks pemukiman transmigrasi dan kampung lokal 2023

Pemisahan antara kampung yang dihuni pemukim non-Papua dan kampung orang asli Papua menjadikan program transmigrasi dan satuan pemukimannya (SP) sebagai kompartemen-kompartemen rasial yang memiliki batas dan hirarki 'kemajuan peradaban' terhadap ruang yang disebut sebagai 'kampung lokal.' Kampung lokal, dihuni oleh 'putra derah,' sebuah istilah yang kerap muncul pasca desentralisasi untuk memberi afirmasi hak pada orang asli dalam memperoleh posisi dalam birokrasi negara, politik, maupun klaim atas aset. Sebagai contoh di Distrik Kurik, luas sawah dan panen di kampung-kampung lokal ini paling minim (**Diagram 4**).

Tabel 1. Jumlah produksi padi di kampung-kampung Distrik Kurik pada 2022

Kampung	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Harapan Makmur	1.300	1.300	14.040	10,80
Kurik	500	500	6.156	12,31
Wonorejo	370	370	3.996	10,80
Candra Jaya	450	450	4.860	10,80
Telaga Sari	945	945	10.260	10,85
Sumber Rejeki	400	400	4.500	11,25
Jaya Makmur	1.520	1.350	13.705	10,15
Anumbob	1.280	1.280	12.800	10,00
Sumber Mulya	992	992	9.935	10,01
Kaliki	**150**	**150**	**1.050**	**7,00**
Salor Indah	650	650	8.460	13,01
Ivimahad	**200**	**200**	**2.494**	**12,47**
Wapeko/Apar	**400**	**400**	**5.400**	**13,50**

Sumber: Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Distrik Kurik, 2022

Di tengah kondisi teknis yang sarat kendala dan kondisi sosial yang rasialis, gagasan bahwa makan nasi dan bertani padi adalah simbol modernitas, bagi sebagian orang Malind sudah mendarah daging. Inilah buah dari Indonesianisasi (Gietzelt 1989). Seorang mantan kepala kampung Salor menuturkan bahwa, "*Sa pu cucu tidak mau makan sagu, jadi kita harus bisa tanam padi.*"[36] Dalam kondisi seperti ini, maka rencana program transmigrasi terbaru untuk menambah jumlah pemukim di kampung-kampung sentra produksi padi hanya akan semakin mempertegas segregasi rasial yang sudah mengeras di Merauke.

Tiga dimensi rezim tenaga kerja dalam produksi padi, yaitu: 1) dimensi produksi: akses terhadap tanah, proses kerja (termasuk mekanisasi) dan relasi upah; 2) dimensi reproduksi: dengan fokus pada kerja perawatan; dan, 3) dimensi distribusi: rantai dan relasi komoditi, dalam pengalaman orang Malind sebagai petani dan pemilik tanah, serta pemukim non-Papua yang menjadi petani padi, akan dibahas pada bagian selanjutnya. Semua dimensi ini juga menjadi arena bagaimana pertanian padi dirasialisasi.

[36] Wawancara eks kepala kampung Salor 12/8/2017

Akses terhadap tanah

Dalam pengalaman beberapa orang petani padi generasi kedua dari pemukim eks-trans, faktor utama yang menjadi ganjalan untuk meningkatkan kesejahteraan hanya dengan menjadi petani padi di Merauke, adalah tanah. Dari cerita mas Sofa di Telagasari,[37] seorang petani muda keturunan Jawa, lahir di Merauke dan bungsu dari enam bersaudara ini, mengharapkan tanah warisan bagi pemuda di generasinya sudah tak mungkin. Memang tidak semua anak dari petani transmigran Jawa di Merauke mau meneruskan kerja bertani. Akan tetapi, bagi mereka yang memilih atau terpaksa bertani karena tidak ada kesempatan kerja lainnya, berbagi tanah dengan saudara lainnya sudah tidak ekonomis, mengingat bahwa luas tanah jatah transmigran hanya 2 hektar. Apalagi bagi mereka yang tinggal di Salor 2 (Salor Indah), di mana lahan-2 jatah transmigrasi sudah dikembalikan kepada marga-marga Malind Anim. Oleh sebab itu, sejak meluasnya pencetakan tanah sawah, meluas pula sistem sewa tanah sawah per hektar per musim yang sejak 2017 sampai 2024 harganya tetap berkisar antara 1,5 juta – 2 juta rupiah.

Marga Mahuze di Salor, misalnya, memiliki sekitar 500-810 hektar lahan sawah yang disewakan kepada para petani di Salor 2 (Salor Indah) dan Salor 1 (Telagasari). Demikian pula marga Kaize, salah satu bidang tanah yang dimilikinya, berupa sawah seluas 15 hektar, juga digarap dengan cara sewa oleh petani eks-trans di Salor 1 dan 2. Seiring dengan terbentuknya hubungan persewaan ini, sejak 2017 secara masif juga terjadi peralihan kepemilikan tanah sawah dari marga-marga Malind Anim ke pemukim non-Papua. Pada 2017, ada seorang aparat kampung di Distrik Tanah Miring bertugas menjadi pengurus pendaftaran tanah untuk disertifikatkan. Beliau menceritakan bahwa sampai pada hari kami bertemu itu, setidaknya ia sudah memegang sekitar 400 berkas pendaftaran untuk sertifikasi hak milik yang semuanya sudah melalui upacara pelepasan tanah. Gelombang pelepasan tanah pada periode itu disebut warga Salor Kampung sebagai 'baku lomba pelepasan.' Sebentar upacara di sana, sebentar upacara di sini, sampai menurut mereka 'sudah tidak ada tanah lagi.' Salah satu yang menikmati gelombang pelepasan tanah ini adalah seorang aparat kampung di Telagasari. Sebelum menjadi aparat kampung, ia adalah pengusaha beras. Hasil usahanya diinvestasikan ke tanah. Sekarang ia menguasai sekitar 20 hektar tanah sawah di SP-9, Distrik Tanah Miring.

Gejala yang sama juga terjadi di Wapeko, menurut Ketua Dewan Gereja,[38] semua tanah sudah dijual sampai ke rawa-rawa pun sudah tidak ada, "*hilang jejak hilang arah, sudah di ujung kehidupan*." Pemilik tanah di Wapeko terluas saat ini, sampai 70 hektar adalah seorang warga Salor 1 (kampung Telagasari). Tanah itu dilepaskan oleh marga Basik-Basik dan Mahuze lewat upacara pelepasan tanah dan sudah disertifikatkan. Terhitung dari jalan kampung, mulai 6 km sampai 21 km ke dalam sudah dikuasai oleh Pak Maryoto, Tentara dan ada orang Boven. Jadi, sekarang orang Wapeko hanya hidup dari strom ikan, jual kayu dan berburu satu dua ekor. Ada Pak Guru SD yang menjadi penampung ikan, termasuk sebuah kios terbesar di

[37] Wawancara di Telagasari Agustus 2024

[38] Wawancara Agustus 2024

tepi jalan muka kampung yang menjadi supermarket bagi warga. Ketika penulis berkunjung ke sana mau membeli ikan, beberapa pemuda terlihat masuk ke kios sekedar untuk membeli minuman dingin berpemanis dalam kemasan, lalu keluar lagi.

Apabila penjualan tanah telah betul-betul memutus relasi Malind Anim dengan tanah, maka bentuk hubungan persewaan antara pemilik tanah Malind dan penyewa non-Papua menjadi bentuk relasi 'baru' antara Malind Anim dengan tanahnya dan 'orang luar.' Relasi persewaan ini tidak sepenuhnya formal-kontraktual, sebagaimana watak relasi kapitalistik dalam teori. Relasi ini merupakan kombinasi antara relasi kontrak dengan relasi pertukaran sosial resiprokal. Sebagai contoh, Pak Komar dan Mas Sofa, masing-masing tinggal di Salor 2 (Salor Indah) dan Salor 1, adalah penyewa tanah sawah milik marga Mahuze yang tinggal di Salor. Bagi Pak Komar, meskipun biaya sewa sudah dibayar, ia tidak menolak kedatangan anak dari marga Mahuze yang sesekali minta diberikan beras atau uang pulsa listrik. Tetangga kiri-kanan menegurnya karena menilai itu bukan tanggung jawab Komar sebab biaya sewa sudah lunas. Terlebih lagi, masih mengendap pandangan bahwa tanah-tanah yang disewakan itu sebenarnya bekas milik para pemukim transmigran yang 'diambil'. Namun, Komar lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Mahuze. Bahkan, ketika kepala keluarga anggota marga pemilik sawah yang disewanya itu meninggal, Komar dititipi untuk membiayai sekolah anak bungsunya di SMA, meskipun hal ini belum dipenuhi. Mahuze almarhum tidak pernah menagih-nagih uang sewa kepada petani penggarap sawahnya. Jika belum ada uang, ia pun menerima jika dibayar dengan beras. Inilah salah satu alasan yang membuat Komar dan Sofa merawat resipokalitas hubungan dengan keluarga Mahuze, yaitu luwesnya kontrak persewaan dan hubungan sosial.

Namun demikian, menjaga hubungan sosial bukan satu-satunya motif. Kedekatan hubungan antara keluarga mas Sofa dengan marga Mahuze sudah berjalan cukup panjang. Berawal ketika mama (isteri dari almarhum Mahuze, pemilik sawah) adalah teman sekolah kakak perempuan mas Sofa di SMP Perintis. Mama dulu sering tidur di rumah keluarga Mas Sofa di Telagasari, karena SMP ini jauh dari Salor Kampung. Itu sebabnya, ketika suaminya meninggal, mas Sofa mengumpulkan beras dari semua petani penyewa untuk disumbangkan kepada keluarga Mahuze. Sampai-sampai mereka juga mengumpulkan uang untuk membeli peti dan membiayai penguburan, serta upacara yang mengiringi kepergian almarhum. Sofa mengakui bahwa selain karena merawat hubungan yang sudah seperti keluarga, ia juga butuh jaminan kepastian untuk bisa terus menggarap sawah yang disewanya itu. Kelangkaan akses terhadap tanah sawah menjadi motif yang mendorong sumbangan dipandang sebagai investasi sosial.

Ketika program Oplah masuk ke Telagasari, selain intensifikasi melalui mekanisasi, pompanisasi dan perbaikan saluran irigasi, ada juga pencetakan sawah baru. Untuk hal terakhir ini, Mas Sofa mendapat kabar dari Ketua Gapoktan, bahwa ada tanah hutan seluas 100 hektar yang akan dibuka untuk digarap menjadi sawah. Ia menyebutnya sebagai *tanah opstal*, yaitu tanah yang bisa digarap tapi tidak bisa dimiliki. Bersama 15 orang petani lainnya, tanah ini akan dibagi masing-masing menjadi petakan 800 meter x 800 meter atau 1,6 hektar per orang. Tanah ini, menurut Mas Sofa, adalah milik marga Basik-Basik di Salor Kampung yang sudah dilepaskan melalui upacara adat. Tidak diketahui siapa yang membeli, karena

masyarakat tidak membayar sepeser pun, malah diminta untuk menggarap. Dari beberapa informasi, di rumah keluarga Basik-Basik ini, mondok seorang anggota TNI yang kehadirannya dalam pandangan masyarakat merupakan pengganti dari Mayor Hutapea yang telah ditarik ke Jayapura. Kemungkinan besar, kehadiran pengganti sang Mayor di rumah keluarga ini sangat berkaitan dengan pelepasan tanah oleh si pemilik rumah. Sayangnya, keterkaitan itu belum bisa ditelusuri dalam proses kajian ini.

Hubungan timbal balik semi-kontraktual yang kesetaraannya selalu dalam ukuran subyektif kedua pihak untuk saling mengimbangi, adalah ikatan sosial yang sebenarnya rentan putus. Salah satu dimensi yang membuatnya rapuh ialah rasialisasi terhadap orang Malind yang membuat pertanian padi sebagai norma dari modernisasi. Dalam pandangan petani eks-trans: "*ada juga pribumi yang mau ikut [bertani padi] dengan eks trans..bagus..sebenarnya kalau mau bertani untuk makan sudah cukup, lahan gak sewa, punya sendiri, memang ada yang malas..[tapi] ada yang terus-menerus garap..hampir sama dengan orang Jawa, baru bahasa Jawa nya bagus.*" Pertanian padi menjadi ukuran kebaikan kualitas manusia (bagus, rajin *versus* malas) yang nilai terbaiknya ada di orang Jawa. Superioritas pertanian padi terhadap cara hidup orang Malind ini juga diafirmasi oleh pandangan seorang perangkat desa di Kampung Telagasari, menurutnya, orang Papua yang berhasil bertani padi itu karena: *"pemikiran [mereka] sudah seperti orang Jawa."*

Seorang Petani Transmigran sedang menyemprot pestisida untuk sawahnya, di lahan cetak sawah, Merauke.
Sumber foto: Pusaka Bentala Rakyat.

Tenaga kerja, mekanisasi dan relasi upah

Kerja budidaya padi, tentunya diawali dengan pembukaan lahan, pembuatan petakan sawah, penggemburan tanah dan pengairan. Semua pekerjaan awal yang memakan tenaga ini, menurut cerita para petani eks-trans ketika baru datang di tahun 1980-an, tidak ada cara lain kecuali dikerjakan dengan mencangkul dan membajak. Tidak ada program pemerintah cetak sawah, seperti sekarang, demikian tutur mereka. Para transmigran menerima rumah dan kavling lahan saja. Selebihnya, untuk menyiapkan kebun dan sawah sangat tergantung tenaga kerja petani sendiri. Oleh sebab itu, baru sekitar 1-1,5 tahun kemudian mereka menuai panen padi pertama. Kemudian, lahan 2 baru tergarap 5-6 tahun setelahnya.

Para petani Malind memiliki cerita yang berbeda-beda tentang awal mula mereka diperkenalkan dengan pertanian padi. Di Salor Kampung, seorang anggota marga Kaize yang menjadi ketua kelompok tani menceritakan bahwa ia sudah mulai belajar bertani padi sejak 1996 membantu orang tuanya. Orang tuanya melihat bagaimana petani transmigran membuka sawah, lalu tertarik untuk mengikuti. Semua dikerjakan secara manual mulai dari tanam sampai panen. Baru pada tahun 2007 berbagai bantuan dari pemerintah masuk, karena ada pencetakan sawah seluas 100 hektar. Namun sampai dengan hari ini, kelompok tani orang Malind di Salor Kampung mengeluh karena merasa tidak pernah menerima bantuan traktor dan *combine harvester*, seperti yang didapatkan oleh kampung-kampung eks trans.

Di Wapeko, pertanian padi lebih lambat lagi diperkenalkan oleh pemerintah. Juga karena kampung ini terletak agak jauh dari kampung-kampung eks-trans, maka tidak terjadi persentuhan pengalaman dan pengamatan langsung mereka dengan para petani non-Papua. Sampai kemudian bupati Merauke John Gluba Gebze pada periode pemerintahannya yang ke-2 mendatangkan petani dari Gorontalo untuk melatih orang Wapeko menjadi petani padi. Petani dari Gorontalo ini tinggal sampai satu tahun di Wapeko mengajari mereka mengoperasikan alsintan, cara pupuk dan semprot pestisida dengan alat semprot tangan, sampai semua masyarakat bisa, demikian tutur Stefanus Ndiken, yang pernah dinobatkan sebagai petani teladan pada 2012. Sawahnya menghasilkan 8 ton gabah per hektar dan satu malai padinya bisa berjumlah 200 butir. Keistimewaan Wapeko ini tidak lain karena lokasi kampung Wapeko direncanakan menjadi pusat Agropolitan berdasarkan Grand Design MIFEE pada 2010. Di wilayah ini pula, tanah-tanah orang Wapeko dilepaskan kepada Medco dan Korindo grup dengan sistem kontrak sewa dan bagi hasil tanpa akses pada kerja produksi yang setara dengan petani non-Papua, yang disebut perusahaan sebagai petani mitra (Savitri 2018).

Kerja dan relasi produksi

Dengan petakan sawah sekitar 1 hektar dan jumlah tenaga kerja keluarga terbatas, para petani eks-trans pemilik tanah menyiasati kebutuhan tenaga dengan bekerja berkelompok dan bergiliran. Untuk tanam dan panen padi, misalnya, mulai dari menyemai, mencabuti hasil semaian untuk dipindahtanamkan ke lahan sawah atau disebut sebagai *tanam basah*, para perempuan petani secara berkelompok (5 orang) dan bergiliran menanam dari satu petak ke petak lainnya yang mereka miliki atau garap. Sekitar tahun '80-'90an pekerjaan ini adalah pekerjaan tanpa upah, tapi berupa pertukaran tenaga dan hasil panen. Kelompok tanam basah sebagai pekerja panen akan mendapatkan bagi hasil (*bawon 10:1,* tiap 10 bagian gabah, 1 bagian dibagi kepada penanam).

Namun, dalam sepuluh tahun terakhir ini, sejak ada alat dan mesin pertanian, cara tanam berubah menjadi tebar benih dan cara panen berganti dari *ngarit* menjadi kerja mesin *combine harvester*. Jadi, benih tidak disemai lebih dulu atau ditanam satu-satu dengan alur yang diatur, tapi disebar seperti menebar pupuk, karena mesin panen tidak memerlukan alur yang memberi ruang bagi kerja panen. Akan tetapi, kalau petani ingin tanam basah, maka mulai dari pindah semaian sampai tanam di sawah ada kerja borongan yang diupah per hektar Rp 1,6 juta. Kerja borongan tanam basah ini biasanya dilakukan oleh 10-13 orang perempuan buruh tani. Proses kerja pun bisa dipilah-pilah dalam bentuk upah buruh harian, yaitu: upah untuk kerja *ndaud* (mencabut bibit padi di persemaian dan memindahkannya ke sawah) adalah Rp 100 ribu per orang per hari, dan upah tanam adalah Rp 50 ribu per orang per hari.

Perubahan menjadi kerja buruh upahan ini memang tidak menggeser domain kerja tanam sebagai 'kerja perempuan,' bahkan dipandang sebagai kesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan bagi perempuan petani. Mereka rata-rata adalah juga perempuan dari rumah tangga yang memiliki tanah. Ibu Sawitri, berusia antara 35-40 tahun, menuturkan: "*dulu waktu kecil sering ikut tanam dengan mamak. Kalo dulu itu kan tanam gantian...kerja pindah-pindah, mulai dari ndaud sampai tanam...dulu kerja buruh tanam, dan bawonnya itu lumayan. Perempuan jadi pegang uang.*" Pekerjaan tanam ini bukan pekerjaan ringan. Menurut ibu Sawitri, punggung ibunya sampai gosong karena terus-menerus kerja tanam sepanjang masa mudanya. Saat ini ibunya, berusia sekitar 70 tahun, menghabiskan hari di kamar dan harus dimasakkan khusus oleh bu Sawitri, karena kondisi kesehatannya.

Ketika kerja perempuan digantikan oleh mesin, perempuan kehilangan kekuatan ekonominya. Bu Sawitri menuturkan: "*Mulai ada alat sudah tidak ada kerja tanam dan bawon lagi. Perempuan ndak pegang uang. Ada uang kalo panen...tapi memang yang kerja begitu yang seumuran saya, yang muda-muda gak bisa.*" Kalau pun ada modal untuk usaha, hanya mereka yang memiliki rumah cukup strategis yang bisa berjualan buka warung, "*kalau seperti Telagasari ini ndak untung...yang beli hanya tetangga-tetangga saja, karena jalurnya tidak dilewati jalan besar,*" begitu keluh ibu Sawitri. Kehilangan akses pada kerja produksi dan penghasilan membuat gerak perempuan terbatas di ruang-ruang reproduksi.

Selain kerja panen, proses budidaya padi bukan lagi ruang yang dikuasai oleh perempuan ketika padi sudah ditanam. Kerja perawatan, seperti: mengatur air, menyemprot insektisida dan herbisida menjadi pekerjaan laki-laki dan biasanya dikerjakan sendiri oleh petani pemilik/penggarap, terutama yang menguasai petak sawah 5 hektar ke bawah. Ruang lain yang tersisa bagi perempuan adalah pematang sawah. Pematang sawah pada petakan-petakan seluas 0,75-1 hektar ini cukup lebar, sehingga sering dimanfaatkan oleh petani untuk tanam kacang-kacangan, cabai, kangkung, dan singkong untuk diambil daunnya. Kebanyakan tanaman ini dimanfaatkan untuk makan sehari-hari, bukan untuk dijual.

Setelah panen, petani memilah hasil beras yang akan dikonsumsi sendiri, membayar penggilingan, dan yang akan dijadikan benih. Para petani jarang sekali membeli benih. Mereka mendapatkan benih melalui pertukaran di antara petani dan bisa dikembalikan sesudah panen. Di Telagasari kebiasaan bertukar ini bahkan jarang berdasarkan kalkulasi akurat jumlah yang harus dipertukarkan. Kadang diberikan begitu saja. Keahlian menangkar juga hadir sebagai implikasi dari pemenuhan kebutuhan benih. Dalam pengalaman Pak Komar, misalnya, beliau menemukan varietas padi baru di pematangnya yang berbeda dengan INPARI 32, varietas yang biasa ia tanam. Padi baru ini lalu ia tangkarkan. Sejak itu, Pak Komar tidak pernah menggunakan benih yang lain, karena menurutnya padi itu tahan hama, pendek dan cepat panen (90 hari).

Pada saat covid dan pasca pandemi, petani merasakan banyak sekali hama dan penyakit padi yang baru muncul. Akibatnya, sejak 2021 hasil panen padi cenderung terus menurun. Jika sebelumnya bisa menghasilkan lebih dari 100 ikat karung per hektar, sekarang 70-80 ikat per hektar saja sudah terhitung bagus. Sementara itu, benih lokal hasil penangkaran Pak Komar bisa menghasilkan 132 ikat karung gabah. Jika dikonversi ke beras, satu karung menjadi sekitar 70 kg beras. Akan tetapi, setelah dipotong biaya panen, angkut, oven dan giling, Pak Komar mendapat 35 kg/karung atau 4,6 ton beras/hektar. Sebuah jumlah di atas rata-rata. Kebanyakan petani hanya bisa meraih panen sampai 50 ikat karung/ha atau setara dengan 2,3 ton beras/ ha, sudah dipotong biaya panen. Dengan hasil seperti itu, Bu Sawitri mengeluh "*sekarang apa-apa mahal. Dulu pegang uang 100 ribu sudah banyak, sekarang 100 ribu paling dapat minyak goreng, kopi dan belanja sayur. Mau tanam sendiri, air susah*."

Sawah Ujicoba Benih Biosalin 2 yang diperkenalkan Kementan untuk Proyek Oplah di Merauke.
Sumber foto: Pusaka Bentala Rakyat.

Mekanisasi

Mekanisasi telah mengubah banyak proses kerja dan relasi produksi padi sawah di Merauke. Pekerjaan yang sudah digantikan oleh alat dan mesin adalah kerja pengolahan tanah yang digantikan traktor roda empat dan traktor tangan, disebut 'jonder', dan kerja panen yang digantikan oleh *combine harvester*. Tidak semua petani mampu memiliki alat dan mesin itu, bahkan pun alat termurah seperti traktor tangan. Meskipun hampir semua petani pernah menerima bantuan traktor tangan, tapi persoalan perbaikan dan perawatan alat sering menjadi masalah. Akibatnya, banyak bantuan alat dan mesin yang rusak menjadi terbengkalai, pun ketika dimiliki oleh perorangan. Minimnya bengkel dan ketersediaan suku cadang (*spare-part*) menjadi persoalan besar, menyebabkan ongkos perbaikan menjadi mahal. Ditambah pula, karakter tanah sawah di Merauke yang keras ketika musim kering dan berlumpur ketika hujan, termasuk risiko korosi, membuat umur alat dan mesin maksimal hanya lima tahun.

Kondisi alam dan mahalnya perawatan mengakibatkan hanya mereka yang bermodal saja yang mampu berinvestasi pada alat dan mesin, seperti para pemilik penggilingan beras skala besar di Distrik Kurik dan Semangga. Mereka juga biasanya adalah pemilik alat dan mesin yang disewakan (*jonder, combine, oven*), termasuk alat transportasi yang mengangkut gabah dari sawah ke penggilingan (**Gambar 11**). Pak Sakiman di Semangga, misalnya, adalah pengusaha penggilingan beras yang memiliki lima buah *combine harvester*. Ia juga berdagang alat dan mesin. Sakiman menjadi tempat belanja bagi petani yang ingin membeli alsintan.

Gambar 11. *Combine harvester* (kiri) & Traktor roda 4 (kanan)

Untuk pekerjaan olah tanah, petani harus menyewa *jonder* (traktor roda 4) dengan biaya Rp 1,6 juta per hektar. Sedangkan untuk panen, biaya sewa *combine* adalah Rp 1,7-2 juta per hektar, tergantung dari jauh-dekatnya lokasi sawah terhadap jalan. Jika pemilik *combine* adalah juga pemilik penggilingan, maka sewa *combine* bisa dikonversi ke beras, yaitu setiap 7 kg beras, diambil 1 kg (7:1). Biaya terakhir ini sudah naik dibandingkan beberapa tahun lalu yang masih membolehkan setiap 10 kg beras diambil 1 kg (10:1). Apabila termasuk pengangkutan dari sawah ke penggilingan, ditambah juga pengeringan dengan oven, maka dari setiap satu karung gabah yang dikonversi ke beras menjadi 70 kg, petani hanya menerima setengahnya: 35 kg. Di satu sisi, petani merasa kerja mereka semakin ringan, tapi di sisi lain mekanisasi telah menyebabkan keuntungan mereka semakin diperas oleh para pemilik penggilingan, alat dan mesin.

Para pemilik alat bermodal besar, biasanya mempekerjakan operator. Petani-petani muda, terutama yang tidak memiliki sawah sendiri, umumnya menambah penghasilan dengan bekerja sebagai operator traktor dan *combine harvester*. Operator *combine harvester* tidak mungkin bekerja sendirian, karena harus dibantu untuk memasang karung, mengeluarkan karung yang sudah penuh dari mesin, dll. Paling tidak ada 1-2 orang yang bertugas sebagai *helper*, demikian sebutan para asisten operator. Bekerja sebagai tim, mereka menerima 25% dari ongkos sewa alat yang sudah dipotong biaya BBM (solar). Oleh karenanya, jauh dekat lokasi sawah akan mempengaruhi pendapatan operator dan timnya. Pada musim panen raya, tim operator *combine harvester* ini bisa bekerja dari pagi hingga tengah malam setiap hari, atau maksimal 4 hari dalam satu minggu ketika belum mencapai puncak masa panen. Keahlian sebagai operator mayoritas dikuasai oleh petani non-Papua atau oleh petani Papua peranakan yang kesehariannya dihabiskan di kampung-kampung eks-trans. Jarang sekali ada petani Papua yang bekerja sebagai operator upahan. Jika memiliki akses pada alsintan, petani Papua lebih suka mengoperasikan alat untuk sawahnya sendiri.

Selain itu, karena minimnya jalan produksi yang bisa dilalui kendaraan pengangkut, maka satu-satunya alat angkut yang cocok dengan medan dan banyak dipakai di Distrik Kurik, khususnya Kampung Salor 2, adalah *gerandong,* semacam truk hasil rakitan lokal bermesin disel. Gerandong ini dibanggakan sebagai hasil kreativitas petani Salor 2 dan tidak ada di tempat lain. Ongkos angkut padi dengan memakai gerandong 20 ribu rupiah per karung. Penggilingan di Salor 2 juga menyediakan jasa angkut dengan grandong ini. Sementara itu, di Semangga, hasil panen diangkut dengan menggunakan traktor yang dipasangkan gerobak angkut (**Gambar 12**). Karena kepemilikan traktor tangan ini relatif merata, maka jasa angkut tidak didominasi oleh pemilik modal tertentu.

Gambar 12. Grandong di Salor Indah, Distrik Kurik (Atas)
& Traktor angkut di Waninggap Kai, Distrik Semangga (Bawah)

Perubahan lain pada mekanisasi terjadi karena pengambilalihan kontrol mesin dan alat pertanian ini dari tangan petani dan pengusaha pertanian ke tangan militer. Semenjak program Oplah berlangsung, petani Malind menceritakan bahwa Babinsa mendatangi petani dan kelompok tani untuk meminta KTP mereka dan Rencana Detil Kegiatan Kelompok Tani (RDKK) untuk memperoleh pupuk subsidi dan alokasi alsintan. Terbukti di Salor Kampung, distribusi alsintan diberikan ke Kompi, bukan kepada kelompok tani. Meskipun kelompok-kelompok tani petani Papua sudah berulang kali mengajukan permohonan alat, mereka hanya bisa mengakses alsintan yang disimpan di Kompi dengan syarat membiayai sendiri mobilisasi alat ke lahan-lahan mereka.

Sementara itu, di Telagasari, pengoperasian bantuan alsintan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura diserahkan kepada UPJA (Unit Peralatan dan Jasa Alsintan) yang berada di bawah struktur pemerintahan desa. UPJA ini memperoleh 2 traktor roda 4, 1 traktor tangan dan 1 *combine harvester*. Namun, ketika kajian ini dilaksanakan, kegiatan UPJA belum berjalan. Jadi, berbeda dengan perlakuan di Salor Kampung, militer sama sekali tidak terlibat dalam penguasaan alsintan di kampung eks-trans. Akan tetapi, skema UPJA ini belum tentu menjadi skema yang mapan, karena adanya perubahan terbaru, yaitu dibentuknya Brigade Pangan (disingkat BP).

Menurut penjelasan Kementerian Pertanian, Brigade Pangan akan terdiri dari 15 orang, termasuk aparat TNI dan Polri. Brigade pangan ini akan membuka kesempatan kerja bagi petani muda. Setiap brigade pangan diperhitungkan bisa mengolah lahan seluas 200 ha. Penghasilan didapatkan dari bagi hasil dengan pemilik lahan, yaitu 70% pemilik dan 30% unit brigade pangan. Pemerintah nasional menghibahkan alsintan senilai 3 miliar rupiah untuk dipakai selama 5 tahun oleh 1.800 Brigade Pangan yang akan dibentuk di 12 provinsi.[39] Brigade Pangan ini merupakan bagian dari kelembagaan petani di bawah pemerintah desa. Kementerian Pertanian menjanjikan bahwa setiap anggota Brigade Pangan ini akan memperoleh 'gaji' sampai 10 juta rupiah per bulan.

Di Merauke, seiring dengan apel militer di lapangan markas KODIM 1707 yang dihadiri Menteri Pertanian, 214 orang telah dikukuhkan sebagai anggota BP.[40] Setiap kesatuan BP akan mendapat 1 unit traktor roda empat, 2 unit traktor roda dua, 1 unit *rice transplanter* dan 1 unit *combine harvester*.[41] Sebanyak 65 traktor roda dua, 113 traktor roda empat, 76 *rice transplanter*, 638 pompa air, *20 combine harvester*, dan 90 *handsprayer* telah dialokasikan untuk dikelola Brigade Pangan dan dalam pengawasan Kodim 1707 Merauke. Brigade Pangan akan bekerja di lahan-lahan optimasi dan sawah baru. Di Wanam, BP sudah dibentuk untuk bekerja di demplot padi seluas 20 hektar. Sementara itu, di Kampung Urumb, Distrik Semangga, 7 unit BP sudah bekerja, mulai dari pengolahan tanah, penyemaian benih sampai penanaman.[42]

39 https://ekonomi.republika.co.id/berita/sngk9c502/dibuka-lowongan-kerja-jadi-brigade-pangan-gaji-rp-10-juta-per-bulan

40 https://www.rri.co.id/daerah/1089659/sukseskan-ketahanan-pangan-brigade-pangan-kabupaten-merauke-dikukuhkan

41 https://www.antaranews.com/berita/4491949/mentan-brigade-pangan-di-merauke-libatkan-warga-lokal-dan-tni-polri

42 https://papua.bsip.pertanian.go.id/berita/bsip-papua-dampingi-brigade-pangan-di-kampung-urumb

Kerja perawatan

Pada generasi yang lebih muda, kebanyakan perempuan petani eks-trans yang berusia 20-an tidak lagi bekerja di sawah. Hampir seluruh waktu dicurahkan untuk kerja perawatan di rumah, baik untuk yang sudah berumah tangga atau pun belum. Kerja perawatan anak, dan orang tua yang sudah memerlukan bantuan dalam keseharian, termasuk seluruh kegiatan merawat rumah menjadi pemenuh hari-hari para perempuan eks-trans generasi ke-2 atau ke-3. Mereka tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan bertanam dan panen sebagaimana orang tua atau kakak-kakak perempuannya. Mekanisasi yang telah menggusur ruang perempuan di lahan sawah, juga menghabisi pengetahuan perempuan dan relasinya dengan tanah, padi dan sawahnya. Ruang perempuan muda petani eks-trans menyempit di seputar rumah, pematang sawah dan pekarangan, serta ruang-ruang sosial di kampung. Sawah dan gabah semakin menjadi sesuatu yang menjauh bagi mereka.

Perempuan Malind, tidak memegang hak milik atas tanah dan tidak bisa memberikan keputusan atas tanah. Namun, mereka memiliki kuasa untuk berbicara dan bertindak mengenai tanah atas nama perlindungan hak dan keselamatan saudara-saudara laki-lakinya. Jika sudah memiliki anak, posisi perempuan menjadi lebih kuat dan berhak berbicara sebagai pelindung hak waris anak-anaknya, terutama anak laki-laki (Pakage 2018). Sebagai timbal balik, perempuan memperoleh hak untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh saudara-saudara laki-lakinya. Sebagai contoh, Simon Mahuze di Salor, selain mengolah sawah miliknya sendiri, ia juga mengerjakan petak-petak sawah yang dikuasai oleh mamanya. Sementara itu, mamanya yang sudah banyak memiliki anak cucu ini sudah jarang turun langsung mengerjakan pekerjaan perawatan. Pekerjaan tersebut telah diambil alih oleh perempuan-perempuan yang lebih muda, baik dari posisi kekerabatan, maupun dari usia.

Masih di Salor, Lusia Mahuze yang baru kehilangan bapaknya, meninggal karena sakit yang tidak jelas, gigih membantu adik bungsunya, Petrus, untuk melacak sawah-sawah yang disewakan bapaknya kepada petani lain. Lusia, tentu saja tidak tahu siapa dan sawah mana yang disewakan itu, karena bapaknya hanya mewariskan informasi itu kepada Petrus. Namun, Lusia merasa berkewajiban untuk memastikan bahwa Petrus mampu menggantikan posisi bapaknya dan merawat hubungan dengan para penyewa sawah mereka. Itulah satu-satunya penghasilan terbesar bagi keluarga Mahuze. Untuk menutupi biaya sehari-hari, Lusia kadang bekerja cuci piring di tetangga, juga ikut membantu suaminya berburu.

Perempuan Malind juga sempat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bertanam padi, tapi tak lama. Pasca program bantuan afirmasi bagi petani Papua dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selesai pada 2017, selesai pula kerja mereka di sawah. Meskipun pengalaman ini kemudian membuka peluang kerja bagi mereka di sawah yang dikuasai Kompi (TNI), tapi tidak mendatangkan keuntungan berarti. Terutama mama-mama janda, lebih memilih menanam pekarangan dengan jeruk nipis, pisang, atau mencari ikan di saluran-saluran irigasi, karena kerja itu mendatangkan uang. Pedagang dari kota memberi harga jeruk nipis antara 4-15 ribu tergantung banyak sedikitnya hasil petik, pisang per tandan 20-35 ribu dan ikan 20-50 ribu per ikat tergantung besar kecil ikan.

Rantai sirkulasi dan relasi komoditi

Bagi petani Malind Anim pemilik sawah, kesulitan utama bertani padi adalah tidak adanya jalan produksi yang masuk sampai ke lahan-lahan mereka yang jauh dari jalan utama. Kondisi ini menyebabkan lahan-lahan sawah tersebut tidak diminati penyewa, karena ongkos angkut yang mahal dan sulitnya akses untuk mesin panen masuk ke lokasi. Tanah marga Mahuze di Salor misalnya, dari 500-800 hektar yang sudah menjadi sawah, hanya sawah-sawah yang berlokasi di tepi jalan, mudah terjangkau dan tidak banjir ketika hujan, yang laku disewa dan bisa ditanami dua kali. Sisanya menganggur, atau jika laku disewakan, hanya bisa satu kali tanam saja, karena di musim hujan terendam air.

Selain sarana pendukung sirkulasi yang minim, penjualan pun terbatas, karena rantai sirkulasi cenderung dikuasai oleh para pemilik penggilingan. Para pemilik penggilingan terbesar di sentra-sentra produksi padi di Kurik dan Semangga, karena menguasai kepemilikan alat dan mesin, juga menguasai penentuan harga beli beras. Harga yang ditentukan oleh penggilingan besar bisa berbeda-beda. Pada Agustus 2024, harga beras di penggilingan Salor 2, milik Pak Dirman, adalah Rp 7.000-8.000, paling rendah dibandingkan dengan Semangga dan Tanah Miring yang mau membeli beras petani sampai Rp 10.000. Selain karena dinamika pasokan dan permintaan, perbedaan harga dalam satu waktu pembelian terjadi karena perbedaan rantai sirkulasi beras di Merauke (Widyantari et.al 2023). Harga yang rendah di petani kemungkinan besar karena penggilingan menjual berasnya ke BULOG dan harga beli BULOG hanya sekitar Rp 8000. Sementara itu, harga tinggi bisa diberikan penggilingan karena dijual kepada pengecer langsung. Menurut kajian Widyantari et.al (2023) ada empat jalur sirkulasi atau pemasaran beras setelah beras dari petani dibeli oleh penggilingan di Merauke, yaitu: 1) dari penggilingan ke BULOG; 2) dari penggilingan ke mitra BULOG, 3) dari penggilingan ke pedagang antar daerah, 4) dari penggilingan ke pengecer.

Yan Mahuze di Salor 2 menuturkan bahwa dulu petani sama sekali tidak kesulitan untuk menjual beras, karena Dolog (BULOG) siap membeli, berapa pun banyaknya. Namun, sejak 2020 Dolog tidak bisa diharapkan. Meskipun penggilingan tetap beli dari petani, tapi harga pembelian Dolog hancur sampai Rp 5000 saja per kilo. Kehancuran harga ini, menurut Yan, karena Dolog serap beras yang datang dari Surabaya. Keadaan ini menyebabkan petani marah dan mereka menghamburkan beras di depan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sejak itu, ada petani-petani yang berinisiatif untuk membawa sendiri panen mereka dengan truk ke Boven Digul, karena harga beras di sana sampai 18-20 ribu rupiah/kg. Ketika pulang, truk pun tidak kosong, karena sebagian keuntungan beras dibelikan durian untuk dijual di Merauke.

Sepertinya titik akhir penjualan beras yang dikuasai BULOG ini menjadi persoalan besar, karena harga beli yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, titik keleluasaan pasar terbesar sesungguhnya ada di tangan penggilingan, karena memiliki dua alternatif jalur pemasaran lain, selain ke BULOG. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sirkulasi modal penggilingan bisa berekspansi ke penyewaan alsintan. Peluang investasi bagi penggilingan juga ditambah dengan pilihan menjadi Agen BRI. BRI menyalurkan kredit melalui penggilingan merupakan

modus yang biasa dijalankan di Merauke, karena dengan diperantarai pemilik penggilingan yang *bankable*, bank tidak lagi dibebani tugas untuk memverifikasi kelayakan debitur yang menurut bank cukup berisiko jika penghutang adalah orang asli Papua (Savitri 2018).

Persoalan akses terhadap modal untuk bisa bertani padi lagi setelah bermacam bantuan afirmasi bagi petani Papua dihentikan, adalah masalah yang seringkali muncul dalam pembicaraan. Mereka bilang, "*kita tidak tanam [padi lagi] bukan apa..kami ini tangan pendek...*" Istilah *tangan pendek* adalah metafora bagi kemampuan untuk menjangkau lebih banyak atau lebih luas karena tidak ada modal. Bantuan berhenti, bertani padi pun berhenti. Stigma dan diskriminasi mewarnai keputusan bank untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR).[43] Di satu sisi, pengalihan resiko bank ke penggilingan ini memungkinkan petani Malind mengakses kredit, tapi di sisi lain, ketika petani Malind tidak bisa mengembalikan kreditnya, mereka menyerahkan tanah ke penggilingan. Inilah cerita pengalaman keluarga Mahuze dan banyak marga lain di Salor dan Wapeko yang terlilit hutang ke penggilingan dan menebusnya dengan tanah.

Menurut kabar burung, pemilik tanah terluas di Merauke adalah elit pengurus dari persatuan pengusaha penggilingan padi (PERPPADI) di Semangga. Menariknya, salah satu elit pengurus PERPPADI di Merauke ini adalah seorang tentara dari KOREM 174/ATW, Serka Adrian Manullang.[44] Terpilih sebagai ketua PERPPADI pada 2021, setahun kemudian sang sersan kepala menciptakan alat pengering padi yang memperbaiki kualitas beras di kala musim hujan. Lalu, alat pengering ini digunakan oleh sebuah perusahaan penggilingan milik anggota kelompok petani milenial di mana Serka Manullang menjadi pembinanya.[45] Di Distrik Tanah Miring, Serka Manullang juga memiliki penggilingan padi "ANAK MEDAN." Masih menjadi pertanyaan apakah sirkulasi beras akan menjadi arena militerisasi juga. Secara spekulatif, kemungkinan itu ada. Pertama, karena PERPPADI diketuai oleh seorang prajurit; kedua, ada pesan Pangdam Cenderawasih untuk tetap koordinasi ke BULOG untuk pembelian padi dari petani;[46] dan terakhir, ada preseden pada program Upsus Pajale 2015-2019 yang menunjukkan bahwa militer mengontrol sirkulasi gabah dengan mengamankan jalur pasokan ke BULOG.

43 Wawancara dengan staf kredit BRI di Kurik pada 2017.

44 https://www.rmolpapua.id/terpilih-secara-aklamasi-adrian-simanulang-pimpin-perpadi-merauke-untuk-periode-2021-2026

45 https://papuaselatanpos.com/2024/07/04/resmikan-pabrik-rice-to-rice-pj-gubernur-tidak-hanya-kuantitas-saja-yang-bisa-kita-tingkatkan-tapi-juga-kualitas-beras/

46 https://tniad.mil.id/pangdam-xviicenderawasih-tinjau-lokasi-program-ketahanan-pangan/

Sawah Garapan Transmigram di Lahan Proyek Oplah di Merauke. Sumber foto: Pusaka Bentala Rakyat.

Rasialiasi Rezim Tenaga Kerja Padi

Dari berbagai gambaran mengenai rezim tenaga kerja padi pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa budidaya padi sawah adalah mekanisme penciptaan batas (*threshold*) modernitas yang berhirarki secara rasial di antara penduduk Papua dan non-Papua. Seturut proses modernitas yang dipaksakan oleh kolonialisme tersebut, mulai dari Proyek Kumbe sampai MIFEE dan swasembada pangan, program-program produksi padi sawah telah membentuk dan mengubah rezim tenaga kerja. Penguasaan tanah dan mekanisasi menjadi elemen penting dalam bentuk terkini rezim tenaga kerja di sentra-sentra produksi padi di Merauke. Tentu saja, gambaran ini masih perlu diperkuat dengan kajian yang lebih teliti, misalnya: kajian yang menerapkan metode survei rumah tangga untuk menjustifikasi struktur kepemilikan dan penguasaan tanah sawah, alsintan dan ekstraksi surplus dari hulu ke hilir. Namun, pada titik ini temuan pada rezim tenaga kerja memperlihatkan peran sentral tanah dan mekanisasi pada akumulasi kapital, rasialisasi dan militerisasi.

Pada paparan mengenai persoalan penguasaan tanah, program cetak sawah telah mengungkap hirarki, sekaligus sentimen rasial antara petani eks-trans dan pemilik tanah Malind, yang mengendap dan menebal sejalan waktu dalam ribuan peristiwa harian. Letusan 'rame-rame di Merauke' pada tahun 2001 dan pengembalian tanah adat selalu menjadi lapisan ingatan yang berpotensi memicu konflik. Segregasi pemukiman, rasialisasi pertanian padi berdasarkan pandangan hirarki peradaban yang meletakkan budidaya padi sawah lebih maju atau modern daripada berburu dan meramu, serta diperkuat oleh keberpihakan militer dan kebijakan negara, telah membutakan sistem nilai paling mendasar tentang tanah.

Dalam sistem nilai Malind Anim, tanah bukanlah komoditas. Akan tetapi, proses komodifikasi tanah yang meliputi proses kerja pengubahan hutan (sebagai piring makan Malind Anim) menjadi lahan sawah (sebuah piring makan modern), telah meletakkan Malind Anim secara paksa pada posisi untuk menerima superioritas peradaban padi. Maka, demi menghindari stigma dan diskriminasi Malind Anim berusaha untuk 'ikut arus.' Relasi sewa dan bagi hasil yang kemudian muncul seiring dengan cepatnya baku lomba jual akibat hutan berubah menjadi lahan sawah secara masif, adalah tampilan dari bagaimana Malind Anim berselancar di sela-sela arus. Ketika tak mampu menahan kuatnya tarikan arus kebutuhan dan keinginan

untuk menjadi modern, yang terus menguras uang, sang *Anim-Ha* harus merelakan tanahnya, dirinya, sebagian hilang dijual.

Dengan kata lain, pencetakan 10.000 hektar sawah baru pada 2017-2018 dan seluruh kebijakan swasembada pangan yang mendarat di Merauke kini, terus memperkuat rasialisasi. Meskipun ada program afirmasi terhadap petani orang asli Papua, tetap saja akses terhadap tanah sawah paling menguntungkan kelompok sosial yang sudah menguasai kondisi teknis dan kondisi sosial produksi padi. Mereka ini adalah para petani padi eks-trans generasi kedua yang sudah mulai merasakan kebutuhan untuk mengakses tanah. Bagi sebagian generasi ke-2 eks-trans yang mampu melakukan akumulasi, komodifikasi tanah adat lewat cetak sawah adalah kesempatan untuk memperbesar akumulasi. Sementara itu, bagi sebagian lagi yang tak bertanah, tapi memiliki akses melalui relasi sewa dan bagi hasil, komodifikasi tanah adalah kesempatan untuk memperluas penguasaan lahan sawah, memilikinya dan melakukan akumulasi.

Mengenai mekanisasi, pengalaman relasi petani dengan pemilikan alsintan memperlihatkan bagaimana pembentukan akumulasi terkonsentrasi pada kepemilikan teknologi dan prosesnya terjadi secara rasial. Akses petani pemilik tanah dan penggarap pada kepemilikan atau penguasaan alsintan memang hampir merata, karena didistribusikan oleh negara. Catatannya adalah: kemerataan ini pun hanya dirasakan di kampung-kampung eks-trans. Namun demikian, tanpa distribusi akses alsintan itu, hanya kemampuan mengakumulasi kapital lah yang memberi jalan pada kendali alsintan. Buktinya, kepemilikan alsintan lengkap, mulai dari traktor sampai mesin panen, hanya ada di tangan para pemilik penggilingan. Dengan memiliki mesin giling padi, pengusaha penggilingan besar dapat menguasai harga, menguasai jalur pemasaran, dan memperluas usaha ke penyewaan alsintan. Perluasan kapital pun masuk ke arena finansial, ketika kredit perbankan juga disalurkan kepada petani via pengusaha penggilingan. Jalur mapan sirkulasi beras, ditambah dengan kuasa finansial yang didelegasikan oleh bank untuk menyalurkan kredit ke petani, telah membuat sirkuit kapital penggilingan terus bergulir dan membesar. Mekanisasi, pada akhirnya, menjadi ladang ekspansi bisnis bagi para pemilik penggilingan besar.

Akumulasi kapital ini menjadi rasial bukan serta-merta karena kebanyakan pemilik alsintan adalah non-Papua, namun dengan cara mendiskriminasi akses orang asli Papua pada kapital (alsintan, kredit). Semua petani Papua yang diwawancarai memiliki hutang ke bank melalui penggilingan dan terpaksa menebus utang mereka dengan tanah. Tertutupnya akses ke bank adalah karena stigma dan diskriminasi, atau tepatnya rasialisasi, yang membuat mereka, meskipun memiliki tanah, tetap tidak *bankable* karena warna kulit. Bahkan, kesempatan menjadi operator alsintan pun didiskriminasi, karena perbedaan rentang peluang dan kesempatan untuk memiliki ketrampilan, juga motivasi yang dibunuh oleh kerentanan struktural, telah menghalangi akses pekerja orang asli Papua sebagai operator. Kehadiran Brigade Pangan, mungkin saja membuka akses pada penguasaan alsintan, pengetahuan

tentang mekanisasi dan pasar tenaga kerja baru bagi orang asli Papua. Namun, tentu saja hal ini masih harus diselidiki dan sangat spekulatif.[47]

Terlebih lagi, ketimpangan gender semakin diperkuat oleh mekanisasi. Peralihan dari kerja tangan menjadi kerja mesin adalah proses yang menyingkirkan perempuan dari produksi padi dan mengurung mereka melulu pada kerja perawatan dan reproduksi sosial.[48] Sementara itu, bagi perempuan Malind, cepatnya laju kehilangan tanah sawah karena penjualan, semakin menguatkan posisi reproduksi sosial mereka dalam mempertahankan tanah. Penyempitan ruang otonom perempuan ini, terlepas dari hal etnisitas, telah menyebabkan mereka semakin menghilang dari seluruh diskursus tentang kebijakan swasembada pangan di Merauke yang maskulin.

Pada akhirnya, secara garis besar, analisa rezim tenaga kerja padi ini memperlihatkan bagaimana eksploitasi terjadi melalui rasialisasi dan diskriminasi gender. Selain itu, mekanisme eksploitasi justru semakin dipertajam dengan mekanisasi, karena mekanisasi telah memperluas kemampuan ekstraksi surplus dan memperbesar akumulasi modal para pemilik teknologi produksi padi. Lalu, bagaimana jika dua elemen penting eksploitasi, yaitu: tanah dan mesin, dikuasai oleh institusi militer atau dijalankan dengan cara militerisasi?

Perempuan Adat Suku Yei sedang memanen sagu.
Sumber foto: Pusaka Bentala Rakyat.

47 Komunikasi telpon dengan Rizki Mahuze (23/01/2025) ketika menanyakan tentang keanggotaan brigade pangan di kampung Waninggap Kai, sebuah kampung yang mayoritas ditinggali oleh petani eks-trans. Rizki mengakui bahwa ketua gapoktan menawarkan kepadanya, tapi ia menolak. Pasalnya, Rizki konsisten dengan tuntutan kepada pemerintah untuk memberi prioritas pada petani OAP. Sementara itu, tawaran ketua gapoktan datang semata karena butuh tambahan tenaga, bukan tawaran kesempatan pertama.

48 Seorang petani muda eks-trans berkata sambil lalu, "perempuan sekarang enak...cuma sibuk dandan, masak, urus anak, tidak usah capek-capek ke sawah" (catatan observasi di Telagasari, 25/8/2024)

Teror Militerisasi Produksi Padi

Merujuk pada Woodward (2014) tentang militerisasi atau bagaimana pendekatan militer digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi, sosial dan politik, maka dalam konteks kebijakan swasembada pangan di Indonesia, militerisasi terjadi pada dua aras, yaitu: 1) aras produksi, berupa: mobilisasi Babinsa dan pembentukan Brigade Pangan yang membaurkan peran sipil dan militer; 2) aras pengamanan, berupa: penerjunan pasukan dan pembentukan batalion infanteri baru. Ada lima Yonif baru yang ditempatkan di wilayah-wilayah *food estate* di seluruh Tanah Papua dan diberi nama Yonif Penyangga Daerah Rawan, yaitu: Yonif 804/Dharma Bakti Asasta Yudha di Kabupaten Merauke, Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha di Kabupaten Boven Digoel, Yonif 802/Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri di Kabupaten Kerom, dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Kabupaten Sorong.

Kelima Yonif baru ini memiliki kompi produksi (pertanian) dan konstruksi (infrastruktur). Panglima TNI, Agus Subiyanto, menyatakan bahwa "*Batalion ini memiliki tugas dan peran yang lebih spesifik, termasuk mendukung ketahanan pangan, menangani ancaman keamanan, dan mendorong pembangunan masyarakat*."[49] KASAD TNI menjelaskan bahwa "*Nanti mereka (kompi produksi) membantu di daerah, bisa dalam pertanian, peternakan, juga keseharian apa yang bisa dibantu."* Kemudian, *"Nanti ada (prajurit) dari Unhan (Universitas Pertahanan), itu ada bintara khusus yang sudah dalam pendidikan militernya sambil ada (pelajaran) pertanian*," ujarnya. Dan 2000 orang tentara sudah mendarat pada 10 November 2024 di lokasi-lokasi penempatannya di Papua Selatan.[50] Bahkan, sejalan dengan pemekaran menjadi provinsi Papua Selatan, KOREM 174/ATW akan ditingkatkan menjadi KODAM XXIII. Direncanakan pada Agustus 2025 sudah terbentuk KOREM dan KODIM baru di Wanam.[51]

Mobilisasi pasukan militer, dalam kehidupan Malind Anim, tentu saja bukan cerita baru. Sayangnya, durasi kajian ini tidak memungkinkan untuk mengikuti perkembangan terakhir pasca penerjunan batalion baru di Merauke, sehingga tidak bisa mencakup kondisi terbaru sepenuhnya. Akan tetapi, tutur sejarah menunjukkan bahwa hampir seluruh kehidupan orang Malind secara bergenerasi sudah merasakan pahitnya militerisme.[52] Meski dari waktu ke waktu bentuk-bentuk militerisasi tidak sama, tapi salah satu yang secara umum terjadi adalah adanya penguasaan teritori.

---

49 https://www.tempo.co/politik/pengamat-sebut-pembentukan-5-yonif-baru-di-papua-berpotensi-ciptakan-kekerasan-dan-praktik-pelanggaran-ham-3141

50 https://enamplus.liputan6.com/news/read/5780552/video-2-ribu-prajurit-tni-tiba-di-papua-selatan-untuk-dukung-sejuta-lahan

51 https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/16/01/2025/kodam-baru-akan-segera-dibentuk-di-papua-selatan/

52 Militerisme menurut KBBI adalah: paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan; pemerintahan yang dikuasai oleh golongan militer; pemerintah yang mengatur negara secara militer (keras, disiplin, dan sebagainya)

Komando teritorial adalah salah satu kunci dari kekuasaan militer masuk ke dalam politik sipil (Haripin 2019). Made Supriatma (2025) mengidentifikasi bahwa semenjak Prabowo menjadi presiden, ada peningkatan lima KOREM menjadi lima KODAM baru di lima wilayah di Indonesia (Sumatra, Kalimantan Tengah dan Selatan, Sulawesi Tengah dan Papua Selatan). Seiring dengan itu, akan dibentuk 100 batalyon pembangunan yang dilengkapi kompi dengan penugasan pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, untuk ditempatkan di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Supriatma menilai bahwa ekspansi militer ini sebagai gejala kemunculan ulang dwifungsi militer, karena dengan semakin banyak KODIM, maka semakin besar pengaruh militer terhadap politik lokal.[53] Analisis Supriatma sejalan dengan Haripin (2019) yang meyakini keterkaitan antara komando teritorial dengan cengkeraman koersif militer terhadap sipil.

Sebagai contoh bagaimana komando teritorial ini berfungsi koersif, pengalaman keterlibatan militer pada Upsus Pajale 2015-2019 memperlihatkan bahwa pengerahan militer yang ditugaskan untuk menjalankan misi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) telah mengakibatkan posisi hukum sipil tidak ada artinya. Pada 2018 di Maros, KODIM 1422 Maros menyita 140 ton gabah yang dibawa tengkulak keluar daerah.[54] Atas nama operasi militer berjudul SERGAP (Serapan Gabah Petani), tentara memaksa truk-truk gabah masuk ke gudang BULOG dan memosisikan aktivitas tengkulak tersebut sebagai tindakan ilegal. Padahal, tidak ada aturan yang mengharuskan petani menjual gabah hanya kepada BULOG atau aturan yang melarang tengkulak menjual dagangannya keluar daerah.

Contoh lain dari ekses militerisasi produksi padi di masa Upsus Pajale adalah munculnya surat edaran Gubernur Sumatra Barat pada 2017 yang mengancam pengambilalihan tanah petani oleh KORAMIL jika tidak menanam padi tiga kali sesuai perintah.[55] Pengalaman-pengalaman itu memperlihatkan bahwa, kesewenang-wenangan menjadi niscaya begitu kekuatan militer diperbolehkan mengatur praktik-praktik sipil, karena posisi superior inheren dalam pandangan dan perilaku militer terhadap sipil. Superioritas inilah yang dalam praktik menjadi bentuk-bentuk 'pendisiplinan' dan 'pengawasan' yang bersifat koersif.

Dalam konteks Merauke, kajian ini menemukan bahwa kontrol teritorial oleh militer di tanah Malind, berjalan seiring dengan pengambilalihan kuasa atas tanah dan alsintan dalam program cetak sawah di era Jokowi dan Prabowo. Di keseharian orang asli Papua, eksistensi militer bukan lagi hadir sekedar sebagai institusi represif, tapi sudah menjadi teror itu sendiri. Baju loreng adalah teror yang terus-menerus menambah tebal kerentanan yang traumatik. Trauma pada kekerasan militer membuat kebanyakan marga pemilik tanah memilih tunduk.

---

53 Supriatma, Made. 2025. *Expansion of the Indonesian Army: A Creeping Dual Function?* (sumber: https://fulcrum.sg/expansion-of-the-indonesian-army-a-creeping-dualfunction/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1D5R_fzIkKl1LlqLtC6todG0GO0vUCB3sjvwxuwTRlsd4qYETzVBhWFo_aem_cRHztHle17YKvb5w40-ukw)

54 https://news.detik.com/berita/d-3915448/tni-razia-padi-di-sulsel-140-ton-gabah-diamankan

55 https://kabar24.bisnis.com/read/20170308/78/635193/gubernur-sumbar-tak-berhak-paksa-petani-serahkan-pengelolaan-lahan

Kerentanan dan trauma melatari keberhasilan TNI mengambilalih kontrol atas tanah untuk dijadikan sawah, yaitu mencakup:

- 37 hektar lahan sawah dengan luas panen14 hektar di Ivimahad, yang dikuasai oleh militer langsung
- 100 hektar pembukaan sawah baru di tanah milik marga Basik-basik, Distrik Kurik, yang dibagikan kepada petani eks-trans
- 10 hektar demplot pertanian modern di Telagasari milik petani eks-trans, yang dikuasai dan diawasi oleh militer untuk menjadi demplot

Berbeda dengan keterlibatan militer dalam kejadian-kejadian penggusuran (Imparsial 2020, hlm.161) atau tindakan represif di masa Upsus Pajale, penguasaan tanah oleh militer di Merauke saat ini tidak dilakukan dengan cara kekerasan langsung, melainkan dengan cara-cara paksa yang *manipulatif* dan *legal*. Merujuk pada Giorgio (2023) delegitimasi, persuasi-manipulasi, diskursus legal-ilegal, serta koersi adalah cara-cara yang dilakukan untuk meruntuhkan dan mengambilalih kontrol atas tanah. Cara manipulasi ditunjukkan oleh pengambilalihan kontrol atas tanah dengan memberikan janji-janji manis bagi hasil dan janji pengembalian tanah adat yang sudah dibeli pihak lain. Semua janji disampaikan hanya secara lisan kepada para pemilik tanah adat, tak ada secarik pun dokumen yang mengikat kedua belah pihak. Pengangkatan aparat militer sebagai anak adat seolah cukup untuk menjadi landasan kepercayaan.

Tentu saja, kepercayaan itu dikhianati oleh si pemberi janji, karena tak ada satu pun yang terwujud. Janji pengembalian tanah adat, misalnya, tidak pernah menghasilkan bukti dokumen, meski selembar pun, atas kembalinya kepemilikan tersebut kepada marga pemilik asal. Demikian pula janji bagi hasil, tak sebutir beras pun yang diterima pemilik sawah. Dalam perkembangan terakhir, bahkan, komandan KODIM 1707 Merauke, Letkol Inf Johny Nofriady, telah diangkat menjadi anak adat dan diberi nama Yanai bermarga Mahuze. Nama ini diambil dari nama tokoh panglima perang bagi Marga Mahuze di Kampung Urumb Dusun Notif.[56] Sudah ada 7 Brigade Pangan beroperasi di Kampung Urumb seiring dengan puluhan alsintan yang mendarat di sana.[57]

Lebih jauh lagi, perolehan penguasaan tanah secara manipulatif ini pun dapat dikatakan legal di level teknis, karena berlindung pada Petunjuk Teknis Optimasi Lahan 2024 yang dikeluarkan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana, Kementrian Pertanian. Petunjuk ini menyatakan bahwa, petani/kelompok tani tidak bisa menuntut ganti rugi ketika lahannya dipakai untuk program. Kondisi yang disebut media sebagai bentuk *soft power* militer ini,[58] sebenarnya hanya merupakan puncak gunung es dari mobilisasi kekerasan untuk perampasan tanah.

---

56 https://www.rri.co.id/daerah/1241184/letkol-inf-johny-nofriady-diangkat-menjadi-anak-adat-suku-marind

57 https://papua.bsip.pertanian.go.id/berita/bsip-papua-dampingi-brigade-pangan-di-kampung-urumb

58 https://nasional.kompas.com/read/2024/11/26/21015751/bangun-soft-power-tni-bakal-bentuk-100-batalyon-pembangunan

Terlepas dari bentuk militerisasi produksi padi yang disebut berversi *soft power*,[59] pengalaman kehilangan akses dan kontrol atas tanah, khususnya bagi Malind Anim, sudah mewujud dalam beragam bentuk kekerasan secara menyejarah. Penyingkiran hak atas tanah Malind Anim dimulai ketika sawah-sawah dan lahan peternakan pertama dibangun di Merauke, serta pendirian kampung karena wabah dan pasifikasi oleh Belanda. Lalu, mobilisasi kekerasan semakin memperluas perampasan tanah dengan masuknya program-program transmigrasi Indonesia. Pengambilan paksa ini memperdalam kekacauan tenurial yang sudah lama terpendam, sehingga memperburuk relasi permusuhan antara orang Malind dengan pihak luar, maupun diantara orang Malind sendiri.

Proses lanjutannya, yaitu Program Lumbung Pangan Nasional (LPN) dalam bentuk cetak sawah sejuta hektar. Program ini mengerahkan tenaga militer untuk pencetakan sawah. Kerja cetak sawah memang tidak membuat institusi militer bisa melakukan penguasaan tanah secara langsung. Namun demikian, tekanan untuk mencetak seluas-luasnya berhasil mempercepat dan memperluas kehilangan tanah adat. Keterlibatan militer telah menghilangkan kendala-kendala pelepasan tanah dan kebutuhan tenaga kerja yang sebelumnya menjadi hambatan utama kecepatan pencetakan sawah dalam memenuhi target (dari 1 juta hektar, meleset menjadi tercetak 10 ribu hektar). Militerisasi oleh negara telah menggeser kerja regulasi-birokrasi menjadi gerak *komando militer*, yaitu instruksi yang harus dilaksanakan dalam rantai komando, tanpa syarat: "Swasembada pangan harga mati."[60]

Pergeseran secara nyata terjadi pada program LPN yang mengubah rezim tenaga kerja dari tenaga kerja bebas menjadi mobilisasi tenaga kerja militer yang murah untuk pembukaan lahan dan cetak sawah. Perubahan ini mengaktivasi tanah adat menjadi komoditi. Begitu diproduksi menjadi komoditi, tanah adat laku keras. Di beberapa kampung, 'baku lomba jual' dengan efektif menjadikan Malind Anim tak bertanah lagi, seturut dengan penyertifikatan hak milik atas tanah oleh pembelinya. Dengan demikian, sejarah perampasan tanah, mulai dari era kolonial Belanda sampai dengan momen historis LPN, terutama di sentra-sentra produksi beras di Merauke, merupakan proses kombinasi dari mekanisme koersif (non-ekonomi) dan mekanisme pasar (ekonomi).

Sementara itu, dalam proses perampasan tanah yang sedang berjalan melalui program swasembada pangan hari ini, terdapat perbedaan yang mendasar dengan era sebelumnya. Dimasukkannya program LPN menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sekedar memberikan

---

59 Joseph Nye (2017) mendefinisikan kekuasaan lunak (*soft power*) ini sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain demi mendapatkan hasil yang dimaksud, tapi bukan dengan cara paksaan (*coercion*) atau dengan membayar (*payment*), melainkan dengan menarik perhatian (*attraction*). Konsep ini diadopsi oleh Lemhanas pada 2021. Gubernur Lemhanas meluncurkan buku Menuju Indonesia 2045 dan menyatakan bahwa "Menjelang republik indonesia memasuki usia 100 tahun pada 2045 mendatang, kami merasa perlu mendalami pendekatan soft power. Kita mesti belajar dari beberapa negara yang mengalami kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir". (https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1257-lemhannas-gunakan-pendekatan-soft-power). Tentu saja penggunaan kekuasaan lunak ini bisa bersifat manipulatif.

60 https://www.cnbcindonesia.com/research/20241203124937-128-592971/swasembada-pangan-jadi-harga-mati-100000-hektar-sawah-bakal-dibuka

landasan lebih kuat pada mekanisme keterlibatan militer yang awalnya bersifat teknis-birokratis (kontraktor cetak sawah) menjadi politis (pengamanan proyek strategis). PP No.42/2021 tentang Kemudahan PSN membuka peluang bagi peran aparat kemanan dalam penanganan dampak sosial akibat pengadaan tanah. Namun, ketika swasembada pangan telah menaruh peningkatan produksi padi sebagai *komando militer*, maka produksi padi menjadi arena pertahanan (*defense*) yaitu: tugas pengawalan dan pendampingan ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional (Seskoad 2015).

Pelaksanaan komando militer ini berwujud menjadi cara-cara yang mengombinasikan koersi dan manipulasi untuk mengambilalih kontrol atas tenaga kerja, alat dan mesin. Pembentukan Brigade Pangan, penyerahan alat dan mesin langsung ke tangan kompi produksi, operasi alsintan oleh tentara, konsolidasi tanah dan penguasaannya, perusakan sawah siap panen oleh traktor tentara, serta mobilisasi tenaga kerja sipil tanpa upah, adalah contoh-contoh praktik yang memperlihatkan proses bagaimana institusi militer mengambilalih kendali produksi padi dari tangan petani dan pemilik tanah adat. Tentu saja, keberhasilan pengambilalihan kontrol produksi secara koersif-manipulatif ini tidak terlepas dari adanya lapisan trauma atas eksistensi militer sebagai *teror*. Ekspresi teror terbaca dari ketakutan pemilik tanah adat untuk menagih janji atas bagi hasil dari sawahnya yang diambil oleh militer, termasuk keengganan petani eks-trans untuk terlibat di sawah demplot. Bahkan, berbulan-bulan sesudah itu, ketika tanah sawahnya ditelantarkan dan tidak dipakai lagi oleh militer, pemilik tanah adat masih takut untuk menggunakan tanahnya dan memilih menganggap tanah itu 'sudah mati' atau tidak lagi bisa disewakan dan diolah untuk memberi hidup kepadanya.

Superioritas sosok militer karena bisa mendatangkan teror telah membuat peran konsolidasi tanah ini institusional, bukan semata peran 'oknum.' Buktinya, ketika kehadiran Mayor Hutapea digantikan prajurit lain yang tinggal di rumah penduduk, bukan di markas, pelepasan tanah untuk cetak sawah seluas 100 hektar milik marga pemilik rumah yang ditinggali sang tentara, terjadi dengan lancar. Bahkan, bagi seorang anggota marga Mahuze yang tidak mau percaya kata-kata manis tentara, ia memilih untuk mengorbankan hubungan baiknya dengan Mas Jawa, dari pada mencari kebenaran kepada sang Mayor apakah tanah miliknya yang dibeli Mas Jawa itu betul-betul sudah kembali. Meskipun kemudian, perempuan Mahuze dengan berani menyediakan diri untuk bersaksi atas penipuan ini, pasangannya melarang untuk berbicara lebih jauh kepada orang luar tentang 'masalah berbahaya' tersebut.

Singkatnya, teror telah membungkam Malind Anim yang tahu bahwa mereka sudah ditipu, tapi mereka memilih diam demi keselamatan hidupnya. Ditambah dengan kejadian kekerasan, seperti: pemukulan oleh Babinsa kepada warga tanpa ada yang berani memprotes, kekerasan terhadap para kepala kampung dalam peristiwa diklat, maka ini adalah persis seperti yang dinyatakan oleh Hernawan (2018), yaitu: cara pemerintahan dengan menjadikan kekerasan di depan publik yang disponsori oleh negara sebagai teror. Lebih jauh lagi, sebagai pertunjukan kedaulatan negara, teror memperlihatkan efektivitasnya sebagai senjata penundukan. Dalam konteks produksi padi, teror berhasil meruntuhkan kuasa petani dan pemilik tanah adat atas alat produksinya.

Apabila dirunut ke belakang, ke masa pemerintahan Orde Baru yang mengerahkan militer untuk 'membersihkan' Merauke seiring masuknya transmigrasi, maka militer telah menjadi instrumen bagi kekerasan kapital (Ince 2018). Institusi kekerasan ini menjalankan fungsi koersi non-ekonomi sehingga proses akumulasi kapital memunculkan kelas kapitalis. Kelas ini diisi oleh para pemilik tanah luas dan pengusaha alat dan mesin pengolahan padi. Kini, militer sebagai instrumen kekerasan kapital juga telah melicinkan proses akumulasi kapital melalui sirkulasi alsintan yang menguntungkan industri mesin pertanian global. Tentu saja klaim ini masih memerlukan banyak dukungan data dan kajian. Akan tetapi, sebagai sebuah indikasi berdasarkan pembacaan pola, klaim ini menawarkan alur penyelidikan lebih rinci.

Di Tanah Papua, teror adalah baju loreng yang memegang senjata

Seorang perempuan muda, yang tanahnya akan diambil untuk perkebunan tebu lewat program swasembada gula dan bioethanol, suatu malam bercerita: "*Sa ini mewarisi trauma dari bapa mama. Mereka benci sekali deng orang Jawa. Bapa pu adik laki-laki ini pendiam, dia sering jalan ke hutan dan akhirnya satu hari dia tidak pulang-pulang lagi ke rumah. Satu hari, bapa pu adik ini kena tangkap di satu kampung yang bersebelahan dengan kampung lokal yang bapa tugas waktu itu. Bapa ada pergi belanja di kampung itu dan di situ bapa di panggil oleh tentara, katanya.. ikut lihat ada OPM yang tertangkap. Orang-orang yang ditangkap ini disuruh berbaris, tangannya diikat. Bapa pu kaki langsung gemetar begitu dong lihat dia pu adik laki-laki nya yang hilang itu, ada diantara orang yang ditangkap. Tapi, bapa diam saja tidak berani bicara. Tentara suruh bapa pu adik ini gali lubang selutut, baru... tentara tembak mulai dari kaki sampai kepala. Tulang tidak tersisa.. semua seperti bubur.....*

Kalau sa pu Mama.. dia saksikan Tete disiksa dan dibunuh tentara. Juga karna disangka OPM. Padahal cuma karena Tete sering pergi berburu ke hutan. Tete ini keluarganya ada di PNG. Tete ditukar kampak dengan keluarga di sini, jadi dia sering pulang pergi PNG karna dia pu dusun juga ada di sana. Akhirnya, karna benci deng orang Jawa, Mama selalu larang saya main dengan anak orang Jawa. Tapi, sa masi anak kecil to..jadi sa main saja. Bapa, dia ini guru. Dia kejam sekali kalo kasi hukuman buat muridnya orang Jawa."

Perempuan muda ini besar dan bersekolah di pemukiman eks-trans, karena kedua orangtuanya guru di sana. Tapi, ia telah dirumahkan di ruang trauma bapa dan mama, hingga menyimpan kebencian dan kemarahan, sampai hari ini. Sebelumnya, hal itu tidak ia sadari, tapi proses belajar dengan banyak organisasi perempuan dan hak azasi manusia membuatnya mampu bertutur tentang itu dan menaruhnya dalam kesadaran kritis.

Krisis tanah dan *suanggi*

Teror lain yang tak kalah menakutkan bagi Malind Anim adalah *suanggi*. Apakah *suanggi* itu? Bagi masyarakat di Indonesia bagian Timur *suanggi* diasosiasikan dengan ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai pihak lain dan sangat ditakuti. Santet atau tenung adalah nama lain dari fenomena ini. Dari keterangan Van Baal (1966),[61] kehidupan Malind Anim tidak pernah terlepas dari kepercayaannya kepada kekuatan magis yang paling ditakuti, yaitu: *kambara*. Sebetulnya, *kambara* tidak sepenuhnya bisa diterjemahkan sebagai santet atau tenung, karena *kambara* bukan sekedar ilmu hitam, tapi terkait secara kompleks dengan kepercayaan Malind Anim terhadap *dema* atau figur mitis nenek moyang dan totem, serta terkait dengan mitologi yang sangat kaya atas setiap kelompok kekerabatan.

Sering sekali terdengar cerita bahwa ada dua hal yang banyak menyebabkan konflik internal dalam keseharian Malind Anim, yaitu: masalah perempuan dan masalah tanah. Horor dari konflik internal ini adalah digunakannya kekuatan magis untuk melemparkan *suanggi* atau *kambara* terhadap pihak yang dianggap bersalah, misal: pelaku perselingkuhan, penyerobot tanah. Eksistensi *kambara* sampai hari ini tidak pernah surut. Masih banyak Malind Anim yang memercayai bahwa kematian mendadak atau sakit yang tak bisa ditemukan penyebabnya adalah akibat *kambara* atau *suanggi*. Yang mengalami perubahan dari fenomena ini adalah penyebab-penyebab yang melatari kemunculan kambara. Persoalan tanah bukan lagi dipicu oleh sebab-sebab dari dalam, tapi disulut oleh masuknya berbagai proyek dan program negara, serta institusi militer, yang memakan tanah adat.

Secara normatif, program cetak sawah dan optimalisasi produksi padi didisain negara sebagai proyek peningkatan produktivitas lahan dan tenaga kerja bagi para pemilik tanah. Akan tetapi, kepemilikan Malind Anim atas tanah yang hanya diakui sebatas simbol budaya, bukan hak legal, menyebabkan tidak terjembataninya perbedaan sistem nilai antara Malind dan pihak luar, entah itu institusi negara ataupun para migran pendatang. Tradisi pemberian tali asih, kompensasi, upacara pelepasan tanah yang merebak sejak program MIFEE dilaksakan, termasuk pengangkatan anak adat terhadap pemilik korporasi dan elit militer, adalah sekedar mekanisme pertukaran yang menjustifikasi secara kultural bahwa ikatan antara orang Malind dan tanahnya sudah dilepaskan dan tanah bisa diserahkan kepada pihak luar. Tidak terjadi kesepahaman dan pertemuan antara sistem nilai Malind Anim dan pihak luar tentang apa itu tanah. Tanah bagi negara, pemodal dan militer adalah teritori dan komoditas, sedangkan tanah bagi Malind Anim adalah keseluruhan sistem nilai tentang kehidupan dan kematian. Alih-alih mencoba membangun jembatan yang memberikan asas keadilan kepada Malind Anim, pemosisian hak atas tanah sebagai hak atas kehidupan orang Malind hanya diakui sebagai simbol kultural. Pada akhirnya, pertukaran simbolik menjadi salah satu cara manipulatif untuk mendapat persetujuan atas perampasan tanah. Manipulasi

[61] Van Baal mempelajari masalah kambara dari tulisan dan diskusi-diskusinya dengan Pater Jan Verschueren, seorang misionaris Misi Hati Kudus yang mengabdi di Merauke pada 1931 sampai ia meninggal tahun 1970. Van Baal juga banyak mengutip dan membandingkan catatannya dengan Paul Wirz, seorang antropolog dari Swiss, juga menjadi saksi dari beberapa kejadian kambara dan menulis disertasi tentang Budaya Material Marind Anim yang dipublikasikan pada 1922 dan 1925.

juga dikombinasikan dengan intimidasi. Kadangkala, intimidasi cukup berupa kehadiran sosok aparat keamanan dalam peristiwa-peristiwa sosialiasi dan negosiasi pelepasan tanah pada masa MIFEE tersebut (Savitri 2013).

Manipulasi dan intimidasi ini seringkali menghasilkan pelepasan tanah adat yang sesungguhnya tidak disepakati penuh atau bahkan ditolak oleh anggota di dalam marga atau oleh marga-marga lain. Penerimaan yang mengandung penolakan inilah yang menjadi masalah besar, karena selalu menjadi sumber dari konflik diantara orang Malind sendiri. Apalagi, pelepasan tanah terjadi dalam kondisi kekacauan tenurial masa lalu. Pernyataan ini bukan untuk mengimplikasikan bahwa munculnya konflik dengan *pu Anim* atau orang luar karena ketidakpuasan atau kekecewaan, tidak penting. Akan tetapi, konflik dengan pihak luar karena masalah tanah hampir tidak pernah mengakibatkan kematian. Sebaliknya, konflik di antara orang Malind karena masalah tanah hampir pasti berujung pada kematian yang disebabkan oleh *suanggi* atau *kambara*. Meskipun ada cara untuk menghindari konflik, yaitu: *gelar tikar adat* di mana laki-laki dari semua marga dan golongan duduk bersama untuk saling menuturkan sejarah perjalanan dan kekerabatan dalam rangka menentukan kepemilikan tanah, tapi ketidaksepakatan dan penyimpangan selalu ada. Lebih jauh lagi, ketika semakin hari semakin banyak tawaran tali asih dan kompensasi berdatangan dari perusahaan, bahkan tikar adat pun sudah digulung, tak pernah digelar kembali.

Sebagaimana dituturkan oleh Van Baal (1966, hln.913) *kambara* adalah sanksi yang bersifat sosial, yaitu dikenakan kepada mereka yang mengkhianati kerahasiaan adat golongan *Imo*[62] atau yang melanggar norma adat secara umum. Oleh sebab itu, penggunaan *kambara* untuk kepentingan pribadi, entah karena iri, benci dan cemburu, adalah penyalahgunaan. Penggunaan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain atas alasan terakhir itu, disebut sebagai *kaiwa*. Jika *kaiwa* berhasil dijalankan sehingga pihak yang dituju sakit dan meninggal, maka kondisi orang yang dikenai *kaiwa* ini juga dinamai *kambara*. Jadi, *kambara* memiliki dua makna, yaitu: tindakan *menyuanggi* seseorang karena melanggar aturan dan kondisi yang dihasilkan oleh tindakan *suanggi* tersebut.

Penuturan tentang *kambara* adalah hal yang sangat peka, karena merupakan bagian dari kehidupan Malind Anim yang selalu ingin ditutup rapat. Meskipun penulis mendengar banyak tuturan pengalaman, serta tanpa sadar pernah berada di lokasi yang sama dengan lokasi berkumpulnya *kambara-Anim* (para eksekutor *kambara*) ketika merencanakan untuk menjatuhkan sanksi, namun tutur tentang bagaimana *kambara* ini dijalankan, siapa yang melaksanakan, siapa korban dan kondisinya, adalah bukan milik penulis dan pembaca dari tulisan ini. Temuan dari *kambara* yang bisa disampaikan di sini adalah hampir semua korban *kambara* yang penulis dengar adalah orang-orang yang menolak menyerahkan tanahnya kepada pihak luar, baik untuk dilepaskan penuh maupun untuk dibongkar dijadikan sawah. Hanya satu pengecualian, yaitu orang yang dikenai *kambara* sebagai sanksi adat, karena ia melakukan *suanggi* untuk kepentingan pribadi dan menghabisi puluhan nyawa orang, termasuk adik-adiknya yang tidak mau menyerahkan tanah.

[62] Sebuah aliran kepercayaan dalam religi Malind Anim yang aturannya memiliki sanksi paling keras

Implikasi sosial dari *kambara* ini sangat memprihatinkan. Dendam dan pembalasan mengakibatkan spiral kekerasan yang tak kunjung putus seiring dengan datangnya satu upacara kematian ke upacara kematian yang lain. Beberapa kampung, seperti Wapeko dan Makaling, bahkan pernah mengalami 'punahan,' yaitu hampir semua laki-laki, besar kecil, mati karena *suanggi*. Di Wapeko, peristiwa *suanggi* menyebabkan semua penduduk kampung yang tersisa, kebanyakan perempuan dan anak-anak, pindah ke Salor. Hanya ada satu bayi laki-laki Balagaise sebagai pemilik tanah yang berhasil selamat. Wapeko menjadi kampung mati. Semua penduduk kampung yang sudah dewasa pada hari ini, dilahirkan di Salor kampung. Baru pada tahun 2000 semua kembali lagi ke Wapeko. Beruntungnya, hak atas tanah tidak seketika hilang karena satu-satunya bayi laki-laki Balagaise selamat. Namun sayangnya, keberuntungan itu tidak terjadi di Makaling yang juga mengalami 'punahan.' Matinya seluruh penyandang nama marga mengakibatkan kekacauan klaim atas tanah. Karena banyak anggota marga yang tersisa hanya perempuan, anggota-anggota marga laki-laki dari kampung-kampung lain berdatangan mengklaim tanah di sana tanpa ada yang bisa memvalidasi klaim-klaim tersebut. Jelaslah bahwa kelindan antara *kambara* dan krisis tanah amat mematikan, sehingga menghasilkan kemelut (*chaos*) berkepanjangan.

Selagi sejarah kematian selalu beriring dengan sejarah tanah dan kekacauan, program-program MIFEE, LPN, PSN membuat tawaran uang dari pihak luar datang silih berganti. Institusi kekuasaan terus-menerus mendesak Malind Anim untuk menentukan posisi menerima atau menolak pelepasan tanah. Akibatnya, terjadilah *baku lapis* konflik, yaitu: konflik yang belum selesai di masa lalu mendasari konflik yang muncul kemudian. Itu sebabnya *suanggi* atau *kambara* menjadi mekanisme, yang tanpa disengaja oleh Malind Anim, telah mempermudah pengambilalihan kontrol atas tanah oleh pihak luar. Seorang laki-laki Malind menggambarkan hal ini dengan sangat mengena: "*Kita kase tanah, mati. Tidak kase, juga mati.*" Artinya, seturut tanah dilepaskan, sumber kehidupan pun hilang, tapi jika tak dilepaskan *suanggi* menyerang. "*Hilang jejak, hilang arah dalam kehidupan,*" sambung ungkapan itu oleh laki-laki lain dengan lirih.

Proses Pembukaan Lahan untuk Oplah yang dikawal oleh Pasukan TNI Ad bersenjata lengkap. Sumber foto: Istimewa.

Politik Dispnea: 'sesak napas' sebagai kerja nekropolitik

Menurut Kamus Istilah Kesehatan (*Medical Dictionary of Health Terms*) yang diterbitkan oleh Harvard Medical School,[63] *dyspnea* atau dispnea adalah istilah medis untuk kesulitan bernapas (*difficulty breathing* or *shortness of breath*) atau secara popular disebut sesak napas. Apabila sesak napas ini dibiarkan tanpa pengobatan, maka kematian akan datang, baik secara perlahan maupun tiba-tiba. Kecepatan datangnya kematian ini tergantung dari penyebab dan laju proses menuju titik kritis. Dalam konteks kajian ini, masalah tanah yang telah merongrong kehidupan Malind Anim dari generasi ke generasi ibarat kesesakan napas yang tak pernah diobati. Kekuasaan bagaimana yang membuat kehidupan jadi menyesakkan? Kehidupan seperti apa yang dijalani ketika napas pendek terus-menerus diderita? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk menemukan tempat bagi masalah kehidupan Malind Anim dari masa kolonial Belanda hingga hari ini di dalam teorisasi nekropolitik.

Di Merauke, negara menjadikan militerisasi sebagai metode kontrol dan pendisiplinan, serta determinan dari keberhasilan swasembada pangan. Swasembada pangan menjadi sebuah komando militer. Atas alasan adanya ancaman yang datang karena situasi geopolitik (perang) dan/atau kondisi perubahan iklim (kekeringan, banjir, kekurangan pangan), institusi militer dikerahkan oleh negara untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP) demi ketahanan pangan. Di sinilah negara menggunakan kedaulatannya untuk membuat swasembada pangan sebagai situasi pengecualian (*state of exception*), sehingga militerisasi menjadi norma.

Mobilisasi kekuatan militer untuk masuk ke dalam aktivitas harian masyarakat biasa, melemahkan kontrol sipil terhadap peran militer. Di mata publik, pelibatan militer dalam urusan non-tempur ini seakan tanpa masalah sebab tiga hal pokok. *Pertama*, karena krisis pangan menjadi dasar pengecualian; *kedua*, swasembada pangan sekaligus membuka kesempatan kerja bagi orang muda dan memodernisasi pertanian; dan *ketiga*, tugas militer juga mencakup Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sudah banyak kritik datang terhadap OMSP di sektor ekonomi dan politik, terutama menunjuk pada doktrin 'Dwifungsi ABRI' yang tidak mau mati, meskipun seharusnya sudah dikubur oleh UU No.34/2004 tentang TNI. Kritik ini ditaruh di sebuah kompartemen bernama 'suara-suara orang yang terganggu.'[64]

Bagi masyarakat tempatan yang kegiatan cari makan hariannya diintervensi oleh praktik militerisme, patriotisme swasembada pangan berhenti sebagai slogan. Sementara kemajuan masih ditunggu-tunggu, yang sudah hadir adalah teror. Kondisi teror yang mengiringi kehidupan sehari-hari berkelindan dengan krisis tanah akibat derasnya arus pelepasan tanah dalam sepuluh tahun terakhir. Situasi ini membuat sentimen rasial antara Malind Anim dengan pihak luar semakin buruk dan kekacauan tenurial di antara Malind Anim sendiri terus memakan korban.

---

63 https://www-health-harvard-edu.translate.goog/d-through i?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#D-terms

64 https://www.youtube.com/watch?v=Issg8Z3fl34

Peran militer yang masuk ke dalam keseharian secara intens dan manipulatif, sampai-sampai diangkat menjadi anak adat, telah mempertebal rasialisasi pertanian padi, sekaligus menambah lapisan kerentanan baru bagi para pemilik tanah adat. Tiga ungkapan penting muncul dari situasi ini, yaitu: 1) *Loreng dong masuk dong* ***kase hancur*** *Masyarakat. Masyarakat* ***mati****; 2) Kita kase tanah,* ***mati****. Tidak kase, juga* ***mati****;* kemudian, perkataan *kase hancur* dan *kase mati* diiringi dengan ekspresi disorientasi atas kehidupan, yaitu: 3) *hilang jejak, hilang arah.*

Dalam percakapan penulis dengan mereka yang bertutur tentang masalah tanah, kata "mati" di kalimat pertama digunakan penutur untuk menggambarkan hilangnya akses terhadap tanah akibat datangnya pihak luar yang membuat kehidupan menjadi sulit untuk dijalani. Pada kalimat kedua, kata "mati" dipakai dua kali oleh penutur untuk menunjukkan kematian sebagai konsekuensi atas hubungan dengan pihak luar, tapi juga sebagai konsekuensi internal. Dalam konteks pertama, mati bisa diartikan secara ketubuhan, secara kebudayaan, termasuk terhentinya aktivitas penghidupan, bahkan gabungan dari semua itu. Akan tetapi, dalam konteks konsekuensi internal, mati memiliki konotasi dengan *suanggi*. Selanjutnya, kalimat ketiga menunjukkan akibat dari 'kehancuran dan kematian' itu, yaitu: 'kehidupan tanpa arah.'

Dalam teorisasi Mbembe, *necropower* dijalankan oleh penguasa yang ingin memperlihatkan bahwa kematian bisa didiktekan. Artinya, penghancuran tubuh secara material tanpa konsekuensi terhadap si penghancur menjadi penanda dari kekuasaan tertinggi atas kehidupan. Genosida menjadi contoh paling mengena. Akan tetapi, Mbembe juga memasukkan kehidupan tanpa arah sebagai kehidupan para *living dead* atau mayat hidup yang dihasilkan oleh nekropolitik. Akibatnya, kelindan makna antara *sovereign power* dan kematian menjadi sangat cair.

Penuturan para marga pemilik tanah memperlihatkan bahwa kehidupan tanpa arah pertama-tama terjadi ketika kematian hadir secara lambat, belum terlihat nyata atau dekat dirasakan. Secara empiris, kondisi ini dimulai dari ketidakmungkinan memanfaatkan tanah dan alam sebagai piring makan. Di tempat dan saat yang sama, kematian juga bisa terjadi secara langsung dan cepat, baik karena senjata maupun *suanggi*. Keduanya hadir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas sehari-hari. Tuturan itu mengungkap bahwa menjalani hidup sebagai *living dead* tidak serta-merta berhadapan dengan penghancuran tubuh secara material. Penghancuran tubuh terjadi dimulai dari penghancuran harapan hidup. Hidup hanya dijalani oleh tubuh, tapi aspirasi dan harapan sudah mati.

Proses penghancuran harapan hidup terjadi ketika udara sesak oleh teror. Kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan membuat hidup menjadi gelap tak tentu arah. Kekuatan yang datang dari luar, pada awalnya seperti kawan baik, tapi perlahan-lahan ia mencekik menyesakkan napas. Ketika pelepasan tanah sudah tidak bisa ditunda, setiap ingatan tentang alam sebagai rumah yang dihancurkan selalu menyesakkan. Melepaskan tanah selalu mendatangkan penyesalan dan kecemasan atas masa depan anak cucu. Di sisi lain, pelepasan tanah bisa menyuburkan relasi permusuhan di antara kerabat dan sobat. Kematian yang tadinya jauh, bisa datang tiba-tiba tanpa memberi tanda, tanpa ada kekuatan senjata,

bahkan tanpa nama. Ketika satu demi satu anggota keluarga pergi jasad dan jiwanya, harapan hidup juga lenyap. Kesesakan napas yang diderita oleh Malind Anim memang akibat kekuatan mencekik yang datang dari luar, tapi kekuatan ini juga menggerakkan teror yang berasal dari dalam. Kekuasaan pencekik berkekuatan ganda inilah yang membuat dunia kematian selalu dekat.

Sejarah kolonialisme dulu dan kini, memperlihatkan bahwa kehidupan sebagian besar Malind Anim terus terengah-engah. Hidup sekedar mencoba bernafas agar tubuh tetap bernyawa sampai besok pagi. Menjadi *Anim-Ha* atau menjadi manusia sejati, sebagai aspirasi tertinggi manusia Malind, telah digerus terus-menerus oleh gelombang kekerasan. Maka ketika negara berperan secara tak henti dalam membentuk kekuatan pencekik, sesungguhnya negara sedang menjalankan politik dispnea. Dispnea, secara populer disebut sebagai kondisi sesak nafas.

Dengan begitu, pengalaman Malind Anim telah mengungkap bagaimana nekropolitik terjadi sebagai proses mematikan harapan, sebelum tubuh secara material pada akhirnya dihancurkan. Sesak napas, menjadi metafor atau jembatan konseptualisasi untuk dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana nekropolitik bekerja lewat tangan negara. Politik sesak napas (dispnea) adalah bagian dari kerja politik kematian.

Mentan Amran ditemani petinggi TNI meninjau pompanisasi di Desa Amunkay, Distrik Tanah Miring, Merauke, Rabu 17 April 2024.
Sumber foto : Humas Kementan.

Hutan Rawa dibongkar & dirusak dengan menggunakan alat berat untuk membuka lahan demi proyek Optimasi Lahan di Merauke.
Sumber foto: Pusaka Bentala Rakyat.

Daftar Pustaka

Agamben, G. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford University Press: Stanford, California

Bachtiar, H.W. 1993. Sejarah Irian Jaya, dalam Koentjaraningrat, 1993. Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk. Penerbit Djambatan:Jakarta

Baglioni, E., Campling, L., Coe, N M. & A. Smith. 2022. Labour Regimes and Global Production. Agenda Publishing; Newcastle, UKBartels et.al 1993

Bartels, MJGA., MWM Gruythuysen & AM Tempelaars. 1993. Inventaris van het archief van de Stichting Agrarische Bedrijven ten behoeve van Nederlands Nieuw-Guinea (SAB), (1954) 1957-1963 (1965). National Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur an Wetenschap

Beck, Mansfelt. 1957. Koembe Project. Risjtproefbedrijf Koembe Jaarverslag 1956

Belkhir, J.A. & B.N. Barnett. 2001. Race, Gender and Class Intersectionality. Race, Gender & Class , 2001, Vol. 8, No. 3, Amazigh Voices: The Berber Question (2001), pp. 157-174

Bernstein, H. 1998. "Labour regimes and social change under colonialism". In Survival and Change in the Third World, B. Crow & M. Thorpe (eds), 30– 50. New York: Oxford University Press.

Bernstein, H. 2010. Class Dynamics in Agrarian Change. Fernbook Publishing: London

Bernstein, H. 2017. Political Economy of Agrarian Change: Some Key Concepts and Questions. RUDN Journal of Sociology, Vol. 17, No.1, 7-18.

Boelaars, J. 1986. Manusia Irian Dahulu Sekarang Masa Depan. Gramedia:Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2023. Merauke dalam Angka. BPS: Merauke

Badan Pusat Statistik. 2024. Produksi Beras 2018-2023. BPS: Jakarta

Dewi, R. 2017. Hijacking Adat Recognition Through the Establishment of New Customary Community Council in Papua, Indonesia. Asia & the Pacific Policy Studies, vol. 4, no. 3, pp. 555–568

Crouch, H. 1979. Patrimonialism and Military Rule in Indonesia. World Politics / Volume 31 / Issue 04 / July 1979, pp 571 - 587

Foucault, M. 1978. History of Sexuality Vol.1. Random House, Inc: New York

Gietzelt,D. 1989. The Indonesianization of West Papua. Oceania, Vol. 59, No. 3 (Mar., 1989), pp. 201-221

Giorgio, O. 2023. A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. Journal of Agrarian Change 2024. DOI: 10.1111/joac.12560

Haripin, M. 2019. Civil–Military Re lations in Indonesia, The Politics of Military Operations Other Than War. Routledge: London, NY

Hernawan, B. 2018. Torture and Peacebuilding in Indonesia, The Case of Papua. Routledge: London, NY

Ito, T., Rachman, NF & LA. Savitri. 2014. Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. Journal of Peasant Studies, Vo.41. No.1, hlm. 29-50

Ikwanto A., Yusuf & HM Halkis .2019. Evaluasi Program Cetak Sawah Oleh Korem 174/Atw Di Merauke Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Strategi Perang Semesta | Agustus 2019 | Volume 5, Nomor 2

Imparsial. 2020. Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI. Imparsial: Jakarta

Ince, O.U. 2014. Primitive Accumulation, New Enclosures, and Global Land Grabs: A Theoretical Intervention. *Rural Sociology* 79(1), 2014, pp. 104–131

Ince, O.U. 2018. Between Equal Rights: Primitive Accumulation and Capital's Violence. Political Theory 2018, Vol. 46(6) 885–914

Kamim, ABM. 2019. Kawula Tani di Bawah Sepatu Lars: Militer dalam Program Upsus Pajale Tahun 2015–2017 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal PolGov Vol. I No. 1, 2019.

Katayama, T. 1963. Scientific Report on the Rice-Collection-Trip to the Philippines, New Guinea, Borneo and Java. Seiken Ziho 15 (1963).

Kingsburry,D. 2003. Power Politics and the Indonesian Military. Routledge: London

Lembaga Masyarakat Adat Malind 2007

Madison, D S. 2005. Critical Ethnography:Method, Ethics, and Performance. Sage Publication: Thousand Oaks

Malik,A. & Jamil, A. 2008, Kajian kelayakan teknologi usahatani padi sawah tadah hujan di Merauke, Papua. Caraka Tani XXl1J (1) Maret 2008, hlm.47-52.

Manning & Rumbiak 1989. Economic development, migrant labour and indigenous welfare in Irian Java 1970-84. Pacific Research Monograph no. 20. The Australian National University National Centre for Development Studies

Marx. K. 1976. Capital Vol.1. Penguin: New York.

Mbembe, A. 2003. Necropolitics. *Public Culture* 15(1): 11–40

Mbembe, A. & Corcoran,S. 2019. Necropolitics. Duke University Press

McCulloch. L. 2003. Trifungsi: The role of Indonesian Military in business, dalam J. Brömmelhölster & CW Paes. 2003. The Military as an Economic Actor: Soldier in Business. Palgrave McMillan:Hamphshire, NY

McNamee,L. 2023. Settling for Less, why states colonize and why they stop. Princeton University Press:Princeton.

Neilson, J & J. Wright. 2017. The state and food security discourses of Indonesia: feeding the bangsa. Geographical Research 2017. doi:10.1111/1745-5871.12210

Ogunrotifa, A.B. 2024. The class basis of racialisation: The missing link in neo-Marxist analysis of racism. Capital & Class 2024, Vol. 48(1) 3 –21Pakage 2018

Pakage, W.B. 2018. Maroka Ehe, Memahami orang Malind dan Keprihatinannya di Selatan Tanah Papua. Ondewerek: Jayapura

Pattenden, J. & M. Wastuti. 2021. Waiting for the call to prayer: exploitation, accumulation and social reproduction in rural Java, The Journal of Peasant Studies, DOI: 10.1080/03066150.2021.1970540

Prayoga, A., AA Setiawan, OD Aulia, RW Dewi. Tanpa Tahun. Multiusaha kehutanan dan potret pembangunan hutan tanaman energi di indonesia. Forest Watch Indonesia:Bogor

Rae,G. & T.Reuter. 2020. Lumbung Nation, Metaphors of food security in Indonesia. Indonesia and the Malay World, 48:142, 338-358, DOI: 10.1080/13639811.2020.1830535

Rasella, M. (ed). 2022. "Torang semua ini hanya jadi penonton saja": Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind, Laporan Dokumentasi. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat:Jakarta

Samkakai, F.O. 2009. Malindanim Dahulu, Sekarang, dan Masa Datang. Makalah disampaikan pada Kongres Pemuda Marindanim, Yalmasu 17 Juli 2009. Tidak diterbitkan

Savitri, L.A. 2013. Korporasi dan Politik Perampasan Tanah. Insist Press:Yogyakarta

Savitri, L.A. 2015. State Actor Brokerage in Large-scale Agricultural Investment in Indonesia. Conference Paper No. 77. An international academic conference of Land grabbing, conflict and agrarian environmental transformations: perspectives from East and Southeast Asia 5-6 June 2015, Chiang Mai University

Savitri, L.A. 2018. Reforma Agraria Kehutanan dan Perluasan Privatisasi Tanah di Merauke, Papua. Jurnal Wacana, Vol. 38. Insist Press: Yogyakarta.

Schoorl, P. 2001. Belanda Di Irian Jaya, Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962. KITLV Jakarta, Garba Budaya:Jakarta

Sebastian, LC., EA Syailendra, & K I Marzuki. 2018. Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period. Asia Policy , JULY 2018, Vol. 13, No. 3 (JULY 2018), pp. 49-78

Seskoad. 2015. Kajian Tentang Peran Tni Ad Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Energi Nasional. Seskoad: Bandung

Sukayat, Y., G Judawinata, R A B Kusumo 2023. Keputusan petani berusahatani padi sawah di merauke (Studi Kasus Pada Petani Padi Sawah di Kecamatan Kurik Kabupaten Merauke).

Syailendra, EA. 2017. In the name of food security. Inside Indonesia, 9 Januari 2017. https://www.insideindonesia.org/archive/articles/emirza-adi-syailendra

Van Baal,J. 1982. Dema: Description and Analysis of Marind-Anim Culture (South New Guinea). Martinus Nijhoff:The Hague

Verschueren, J. 1970. Marind-Anim Land Tenure. New Guinea Research Bulletin, No. 38. Australian National University.

Widyantari, IN., Jamhari, LR Waluyati & JH Mulyo. 2023. The Performance of Marketing and Distribution on Rice Supply Chain in Merauke Regency, Papua, Indonesia. Jurnal Economia, Volume 19, Number 2, October 2023

Widiastuti, MMD., Y. Syaukat, AF Falatehan & DB Hakim. 2023. Tinjauan Implementasi Program Food Estate Dan Prospeknya Di Merauke Papua. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 40 No. 2, Desember 2022: 119-133 DOI: http://dx.doi.org/10.21082/fae.v40n2.2022.119-133

Woodward,R. 2014. Military landscapes: Agendas and approaches for future research. Progress in Human Geography, Vol. 38(1) 40–61

PUSAKA
untuk memberdayakan hak - hak masyarakat

PUSAKA
untuk memberdayakan hak-hak masyarakat

Jln. Tebet Timur Dalam VII No. 20,
RT.05 / RW.06, Tebet Timur,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Jakarta (12820)

+62 21 27874913

+62 21 27874913

info@pusaka.or.id

www.pusaka.or.id

bentalarakyat

@Bentalarakyat

@Bentalarakyat

@Bentalarakyat